

# Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

*by Handa Abidin*

---

**Submission date:** 22-Aug-2023 10:53AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2149256462

**File name:** 2.\_Penguatan\_Posisi\_dan\_Peran\_indo-eng\_version\_turnitin.pdf (1.15M)

**Word count:** 34828

**Character count:** 186915



## **PENELITIAN:**

<sup>14</sup> Penguatan Posisi dan Peran  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
dalam Mendukung Pencapaian  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
di Indonesia

## 1. LATAR BELAKANG

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya: Komnas HAM) sebagai instansi pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya: TPB) masih terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya: Perpres 59/2017).<sup>1</sup> Perpres 59/2017 hanya menempatkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana TPB pada Tujuan 5 (gender dan perempuan) dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan)—itupun hanya meliputi beberapa Sasaran Global pada Tujuan 5 dan 16.<sup>2</sup> Sasaran Global pada Tujuan 5 hanya terbatas pada penghapusan kekerasan kepada perempuan.<sup>3</sup> Sedangkan Sasaran Global pada Tujuan 16 dibatasi pada penurunan kekerasan dan kematian,<sup>4</sup> kedaulatan hukum dan keadilan,<sup>5</sup> dan akses informasi dan kebebasan.<sup>6</sup>

Penelitian ini pada intinya akan membahas mengenai penguatan Komnas HAM dalam konteks TPB dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum bagi Komnas HAM dalam menjalankan TPB terutama dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya: UU 39/1999). Pada penelitian ini juga akan dijelaskan mengenai kegiatan apa yang telah dikerjakan oleh Komnas HAM terkait dengan TPB, khususnya pada kegiatan yang bersifat eksplisit memang ditujukan untuk kepentingan TPB. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai seberapa berdampak kegiatan terutama yang bersifat eksplisit tersebut terhadap TPB dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran penting dari hak asasi manusia dalam menjalankan TPB serta bagaimana seharusnya Komnas HAM menempatkan diri dalam mendukung pemerintah terkait hal ini dan bagaimana seharusnya arah pencapaian TPB Indonesia yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam melibatkan Komnas HAM. Penelitian ini merupakan awal dalam pembuatan penelitian yang lebih detail dan teknis terhadap penguatan Komnas HAM terkait dengan hak asasi manusia dan TPB.

Proses penelitian ini juga dilakukan dengan melaksanakan dua kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 di mana peserta dari FGD ini adalah tiga komisioner Komnas HAM dan enam belas staf Komnas HAM (selanjutnya:

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017) (selanjutnya: Perpres 59/2017), Lampiran, 29-30, 77, 79-80, dan 90.

<sup>2</sup> Ibid. Lihat juga: United Nations General Assembly Resolution 70/1, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (diadopsi 25 September 2015) (selanjutnya: UNGA Res. 70/1), 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.2) dan 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.1 dan Sasaran 16.3) - 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.10.).

<sup>3</sup> Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 30. Lihat juga: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.2.).

<sup>4</sup> Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 77. Lihat juga: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.1.).

<sup>5</sup> Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 79-80. Lihat juga: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.3.).

<sup>6</sup> Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran, 90. Lihat juga: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.10.).

FGD Internal Komnas HAM).<sup>7</sup> FGD kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021 dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari pihak eksternal di luar Komnas HAM (selanjutnya: FGD Eksternal Komnas HAM), yaitu (urutan sesuai dengan alfabet): Bina Swadaya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Migrant CARE, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (selanjutnya: UNESCO), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.<sup>8</sup>

## 2. DASAR HUKUM

Komnas HAM memiliki tujuan yang luas terkait dengan hak asasi manusia.<sup>9</sup> Pertama terkait dengan “mengembangkan kondisi” yang mendukung implementasi hak asasi manusia di Indonesia.<sup>10</sup> Kedua mengenai penguatan “perlindungan dan penegakan hak asasi manusia” di “berbagai bidang kehidupan” di Indonesia.<sup>11</sup> Dua tujuan di atas dapat digunakan sebagai dasar secara umum mengapa Komnas HAM perlu diberikan pengakuan oleh pemerintah untuk memperoleh peran lebih dalam implementasi TPB di Indonesia.

Penting juga untuk diinformasikan dalam konteks internasional, Office of the High Commissioner for Human Rights (selanjutnya: OHCHR) telah melakukan identifikasi, walau hanya untuk kepentingan penggambaran saja, mengenai kaitan TPB dengan pasal-pasal yang relevan dengan traktat terkait hak asasi manusia di mana pada sejumlah traktat Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum dan juga pada produk kebijakan yang berkarakter *soft law* (yang untuk mengetahui kekuatan hukumnya pada Indonesia perlu dianalisis terlebih dahulu kontennya satu per satu).<sup>12</sup> Instrumen-instrumen internasional di

<sup>7</sup> *Focus Group Discussion* Internal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (26 Januari 2021) (selanjutnya: FGD Internal Komnas HAM).

<sup>8</sup> *Focus Group Discussion* Eksternal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (29 Januari 2021). (selanjutnya: FGD Eksternal Komnas HAM).

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disahkan 23 September 1999, diundangkan 23 September 1999) (selanjutnya: UU 39/1999), Pasal 75.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 75 Huruf a.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 75 Huruf b.

<sup>12</sup> Office of the High Commissioner for Human Rights, “Summary Table on the Linkages Between the SDGs and Relevant International Human Rights Instruments”, diakses tanggal 30 Desember 2020, [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG\\_HR\\_Table.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf) (tautan awal: <https://www.ohchr.org/en/issues/SDGs/pages/the2030agenda.aspx>). Lihat juga: Office of the High Commissioner for Human Rights, “Transforming Our World: Human Rights in the 2030 Agenda for Sustainable Development” diakses tanggal 30 Desember 2020, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost2015.pdf>. Sebagai perbandingan mengenai kaitan antara hak asasi manusia dan TPB dalam konteks instrumen internasional, lihat juga: Danish Institute for Human Rights, *The Human Rights Guide to the SDGs, DIHR*, diakses tanggal 12 Januari 2021, <https://www.humanrights.dk/human-rights-guide-sdgs>. Salah satu traktat yang sudah menjadi bagian hukum Indonesia, misalnya International Covenant on Civil and Political Rights, lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (disahkan 28 Oktober 2015, diundangkan 28 Oktober 2015).

atas tidak akan dibahas secara khusus karena identifikasi kaitan antara TPB dan hak asasi manusia telah dilakukan oleh OHCHR. Untuk setiap instrumen internasional yang mengikat Indonesia secara hukum pada identifikasi OHCHR tersebut, maka tentunya juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung perluasan peran Komnas HAM pada seluruh Tujuan di TPB.<sup>13</sup>

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama pembahasan terletak pada UU 39/1999 terutama mengenai hak asasi manusia apa saja yang relevan dengan 17 TPB. Komnas HAM memiliki hubungan yang erat dengan hak-hak yang ada pada UU 39/1999 dikarenakan Komnas HAM dan hak-hak tersebut diatur sama-sama di dalam UU 39/1999.<sup>14</sup> Selain UU 39/1999 terdapat sejumlah produk hukum nasional terkait lainnya di mana Komnas HAM diberikan peran secara khusus antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya: UU 40/2008).<sup>15</sup> Pada UU 40/2008, Komnas HAM diberikan wewenang untuk mengawasi terhapusnya tindakan diskriminasi ras dan etnis.<sup>16</sup> Secara umum pasal mengenai tindak diskriminatif UU 40/2008 relevan dengan misalnya Sasaran 10.2. TPB.<sup>17</sup> Selain itu terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di mana Komnas HAM merupakan bagian dari satuan tugas dalam hal terjadinya konflik yang bersifat nasional.<sup>18</sup> Persoalan konflik dapat dikaitkan dengan misalnya pengurangan kekerasan dengan signifikan yang diatur pada Sasaran 16.1.<sup>19</sup> Di luar Tujuan 16, persoalan anti-kekerasan pada perempuan dan anak yang dapat relevan juga apabila terjadi konflik diatur pada Sasaran 5.2.<sup>20</sup> Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 (selanjutnya: UU 26/2000) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan peran kepada Komnas HAM sebagai penyelidik terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berstatus berat.<sup>21</sup> Peran Komnas HAM pada UU 26/2000 tersebut dapat dikaitkan dengan Sasaran 16.3. yang mengatur mengenai akses kepada keadilan serta kepastian hukum.<sup>22</sup>

<sup>13</sup> UU 39/1999 (n. 9), Menimbang Huruf d, Pasal 7 beserta penjelasan, Pasal 67, Pasal 71, Penjelasan Umum lihat juga: Pasal 89 Ayat (1) Huruf a.

<sup>14</sup> Lihat secara umum: *ibid.*, UU 39/1999.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (disahkan 10 November 2008, diundangkan 10 November 2008) (selanjutnya: UU 40/2008), Pasal 8 beserta penjelasan dan Pasal 10 Huruf b beserta penjelasan.

<sup>16</sup> *Ibid.*, UU 40/2008, Pasal 8 beserta penjelasan, lihat juga: Pasal 10 Huruf b beserta penjelasan.

<sup>17</sup> (1) *Ibid.*, UU 40/2008, Pasal 4; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 21 (Tujuan 10, Sasaran 10.2.).

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (disahkan 10 Mei 2012, diundangkan 10 Mei 2012) (selanjutnya: UU 7/2012), Pasal 49 Ayat (1)-(2) dan Pasal 45 Huruf c.

<sup>19</sup> (1) *Ibid.*, UU 7/2012, Pasal 12 Huruf a beserta penjelasan; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 25, (Tujuan 16, Sasaran 16.1.).

<sup>20</sup> (1) *Ibid.*, UU 7/2012; dan (2) *Ibid.*, UNGA Res. 70/1, 18, (Tujuan 5, Sasaran 5.2.).

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (disahkan 23 November 2000, diundangkan 23 November 2000) (selanjutnya: UU 26/2000), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 25.

<sup>22</sup> (1) *Ibid.*, UU 26/2000; dan (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 25, (Tujuan 16, Sasaran 16.3.).

Agenda 2030 memiliki 17 TPB, diikuti dengan sasaran/target dan indikator yang melekat pada masing-masing tujuannya.<sup>23</sup> Seluruh TPB terdapat lengkap pada Perpres 59/2017.<sup>24</sup> Namun tidak semua sasaran yang ada berdasarkan Resolusi United Nations General Assembly 70/1 Tahun 2015 (selanjutnya: UNGA Res. 70/1) terkait dengan pembangunan berkelanjutan dimasukkan ke dalam sasaran global yang ada pada Perpres 59/2017.<sup>25</sup> Perlu disampaikan bahwa pada UNGA Res. 70/1 (di luar konten tujuan dan sasaran TPB), elemen hak asasi manusia telah menjadi bagian penting dari pelaksanaan TPB.<sup>26</sup> Instrumen lain yang perlu disampaikan adalah Mérida Declaration di mana deklarasi yang dibuat oleh Global Alliance of National Human Rights Institutions (selanjutnya: GANHRI) tersebut turut berperan sebagai perekat hubungan hak asasi manusia dengan 17 tujuan pada TPB sejak awal dari tahun 2015.<sup>27</sup>

Tujuan 1 TPB fokus pada persoalan kemiskinan.<sup>28</sup> Tujuan 1 TPB khususnya Sasaran 1.1. dan 1.2. terkait dengan penurunan kemiskinan relevan dengan hak hidup, hak peningkatan taraf hidup, dan hak hidup layak dalam UU 39/1999.<sup>29</sup> Hak kebutuhan dasar dan hak pengembangan diri juga berkaitan dengan Sasaran 1.1. dan 1.2.<sup>30</sup> Sasaran 1.3. mengenai sistem perlindungan sosial dapat berhubungan dengan hak kolektif pengembangan diri dan hak jaminan sosial.<sup>31</sup> Mengenai hak jaminan sosial, terdapat hak kemudahan serta perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, antara lain anak-anak dan perempuan hamil.<sup>32</sup> Sasaran 1.4. yang salah satu isinya menyinggung mengenai hak milik memiliki semangat yang sama dengan hak milik pada UU 39/1999.<sup>33</sup> UU 39/1999 yang secara khusus mengatur hak perempuan dapat dikaitkan dengan Sasaran 1.b. yang menargetkan pembentukan kebijakan dengan pertimbangan gender.<sup>34</sup>

<sup>23</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 15-27. Untuk daftar indikator dari sasaran TPB, lihat: (1) United Nations General Assembly Resolution 71/313, Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/71/313 (diadopsi 6 Juli 2017); dan (2) “SDG Indicators”, United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 28 Desember 2020, <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>.

<sup>24</sup> Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran.

<sup>25</sup> (1) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 15-27; dan (2) Ibid., Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran.

<sup>26</sup> Lihat: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 1 (Pembukaan, Paragraf 3) dan 3-4, 6, 8-9, 29, 31-32 (Deklarasi, Paragraf 3, Paragraf 8, Paragraf 10, Paragraf 19, Paragraf 20, Paragraf 29, Paragraf 35, Paragraf 67, dan Paragraf 74 huruf (e)).

<sup>27</sup> Lihat secara umum: The Mérida Declaration: The Role of National Human Rights Institutions in Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development (diadopsi 10 Oktober 2015). Lihat juga: “12<sup>th</sup> International Conference”, GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021, <https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/12IC/Pages/default.aspx>.

<sup>28</sup> Untuk lebih lengkapnya, lihat: UNGA Res. 70/1 (n. 2), 18 (Tujuan 1, Sasaran 1.1.-1.5. dan Sasaran 1.a.-1.b.). Lihat juga: Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 1-10.

<sup>29</sup> (1) *Ibid.*, UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.1.-1.2.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 40.

<sup>30</sup> (1) *Ibid.*, UNGA Res. 70/1; dan (2) *Ibid.*, UU 39/1999, Pasal 11 dan Pasal 15.

<sup>31</sup> (1) *Ibid.*, UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.3); dan (2) *Ibid.*, UU 39/1999, Pasal 15 dan Pasal 41 beserta penjelasan.

<sup>32</sup> (1) *Ibid.*, UNGA Res. 70/1; dan (2) *Ibid.*, UU 39/1999, Pasal 41 beserta penjelasan dan Pasal 62, serta lihat juga Pasal 5 Ayat (3).

<sup>33</sup> (1) *Ibid.*, UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.4.); dan (2) *Ibid.*, UU 39/1999, Pasal 36-37.

<sup>34</sup> (1) *Ibid.*, UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 1, Sasaran 1.b.); dan (2) *Ibid.*, UU 39/1999, Bagian Kesembilan.

Tujuan 2 fokus pada persoalan kelaparan, pangan, dan pertanian berkelanjutan.<sup>35</sup> Sasaran 2.1. dan Sasaran 2.2. dapat dipasangkan dengan hak hidup, hak kebutuhan dasar, dan hak hidup layak.<sup>36</sup> Penekanan Sasaran 2.1. pada bayi dan Sasaran 2.2. pada anak di bawah usia 5 tahun dapat diakomodir dengan hak anak yang sudah dilindungi mulai anak berada di kandungan.<sup>37</sup>

Tujuan 3 fokus pada kesehatan.<sup>38</sup> Sasaran 3.1. mengenai tingkat keselamatan ibu hamil dapat dikaitkan dengan hak hidup secara umum dan secara khusus dapat dikaitkan dengan hak khusus yang dimiliki oleh perempuan hamil yang memberikan perlindungan secara khusus bagi mereka.<sup>39</sup> Sama seperti Sasaran 3.1., Sasaran 3.2. mengenai keselamatan bayi dan balita juga dapat dikaitkan dengan hak hidup secara umum dan juga secara spesifik terdapat hak anak untuk hidup, hak dirawat, dan hak perlindungan kepada anak dari kekerasan serta kejahatan lainnya.<sup>40</sup> Sasaran 3.4., 3.5., dan 3.9. mengenai penanganan penyakit erat relevansinya dengan hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.<sup>41</sup> Sasaran 3.5. mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dikaitkan dengan hak perlindungan anak terhadap narkotika.<sup>42</sup>

Tujuan 4 adalah mengenai persoalan pendidikan.<sup>43</sup> Sasaran 4.1. dan 4.2. mengenai pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah relevan dengan hak pendidikan anak.<sup>44</sup> Sasaran 4.5. dan 4.a. mengenai salah satunya akses pendidikan ke anak dapat dikaitkan dengan hak khusus terkait pendidikan anak disabilitas.<sup>45</sup> Sasaran 4.3.-4.4. dan 4.6.-4.7. mengenai pendidikan laki-laki, perempuan, dan pemuda secara umum dapat diakomodir dengan hak mendapatkan pendidikan.<sup>46</sup>

<sup>35</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 15-16 (Tujuan 2).

<sup>36</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 15 (Tujuan 2, Sasaran 2.1-2.2.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4 dan Pasal 9 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 40.

<sup>37</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (2), dan Pasal 53 Ayat (1).

<sup>38</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 16-17 (Tujuan 3).

<sup>39</sup> Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.1.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (3) beserta penjelasan, dan Pasal 49 Ayat (2) beserta penjelasan dan Ayat (3).

<sup>40</sup> Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1) beserta penjelasan, Pasal 53 Ayat (1), Pasal 57 Ayat (1)-(3), Pasal 58 Ayat (1)-(2), dan Pasal 64-66. Untuk definisi "anak", lihat Pasal 1 Angka 5 UU 39/1999. Untuk pendapat yang mengaitkan Tujuan 3 TPB dengan vaksin serta hak kesehatan anak, lihat: Mimin Dwi Hartono, "Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan", Kompas.com, dipublikasi tanggal 12 Agustus 2017, <https://sains.kompas.com/read/2017/08/12/205030323/vaksinasi-dan-hak-anak-atas-kesehatan?page=all>.

<sup>41</sup> Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.3.-3.4. dan Sasaran 3.9.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 9 Ayat (3). Untuk kesehatan anak dikaitkan dengan pekerja anak, lihat: Pasal 64.

<sup>42</sup> Ibid., (1) UNGA Res. 70/1, 16 (Tujuan 3, Sasaran 3.5.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 65 beserta penjelasan.

<sup>43</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4).

<sup>44</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4, Sasaran 4.1.-4.2.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 60.

<sup>45</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4, Sasaran 4.5.-4.a.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 54 beserta penjelasan.

<sup>46</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Tujuan 4, Sasaran 4.3.-4.4. dan Sasaran 4.6.-4.7.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 12-13 dan mengenai perempuan dapat dilihat di Pasal 48.

## PENELITIAN

Tujuan 5 adalah mengenai penyetaraan gender.<sup>47</sup> Sasaran 5.1. mengenai diskriminasi perempuan dapat dihubungkan dengan hak perlindungan bagi perempuan hamil dan anak.<sup>48</sup> Sasaran 5.2. mengenai kekerasan terhadap perempuan di mana dicontohkan dengan antara lain perdagangan perempuan yang dapat dikaitkan dengan pelarangan perdagangan perempuan dan anak pada UU 39/1999.<sup>49</sup> Sasaran 5.3. mengenai kekerasan pada anak seperti pernikahan dini secara umum dapat terkait dengan pasal yang mengatur calon istri memiliki kebebasan untuk menikah dengan sukarela.<sup>50</sup> Kekerasan lain pada Sasaran 5.3. dapat dihubungkan juga dengan hak perlindungan anak dari kekerasan.<sup>51</sup> Secara umum Sasaran 5.3. juga terkait hak rasa aman.<sup>52</sup> Sasaran 5.6. mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dapat dihubungkan dengan hak perempuan memperoleh perlindungan reproduksi pada dunia kerja.<sup>53</sup> Sasaran 5.a. yang antara lain membahas hak milik perempuan terkoneksi dengan hak milik pada UU 39/1999.<sup>54</sup> Sasaran 5.c. mengenai penguatan kebijakan dan legislasi penyetaraan gender relevan dengan pengaturan hak perempuan untuk terlibat di sektor publik dan swasta.<sup>55</sup>

Tujuan 6 adalah mengenai air dan sanitasi.<sup>56</sup> Secara umum sasaran yang ada pada Tujuan 6 yang membahas pengelolaan kualitas air dan sanitasi relevan dengan hak asasi manusia terkait dengan lingkungan hidup baik dan sehat.<sup>57</sup>

Tujuan 7 adalah mengenai energi berkelanjutan.<sup>58</sup> Sasaran pada Tujuan 7 yang fokus pada energi terbarukan dan pengurangan energi fosil dapat dikaitkan juga dengan hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup baik dan sehat.<sup>59</sup>

Tujuan 8 fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketenagakerjaan.<sup>60</sup> Sasaran 8.3. mengenai penciptaan lapangan kerja yang layak dan juga Sasaran 8.5.-8.6. dan 8.b.

---

<sup>47</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5).

<sup>48</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.1.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 5 beserta penjelasan.

<sup>49</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 65. Lihat juga: catatan kaki nomor 3.

<sup>50</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.3.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 10 Ayat (2) beserta penjelasan.

<sup>51</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 58 dan Pasal 66 Ayat (1).

<sup>52</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 30 dan Pasal 33.

<sup>53</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.6.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 49 Ayat (2) beserta penjelasan dan Ayat (3).

<sup>54</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.a.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 36 beserta penjelasan.

<sup>55</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Tujuan 5, Sasaran 5.c.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 46 beserta penjelasan, Pasal 49, dan Pasal 38 Ayat (3) dan (4).

<sup>56</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 18-19 (Tujuan 6).

<sup>57</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18-19 (Tujuan 6, Sasaran 6.1.-6.6. dan Sasaran 6.a.-6.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3).

<sup>58</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Tujuan 7).

<sup>59</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Tujuan 7, Sasaran 7.2. dan Sasaran 7.a.-7.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3).

<sup>60</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Tujuan 8).



mengenai perolehan lapangan kerja yang layak relevan dengan hak atas pekerjaan layak.<sup>61</sup> Untuk Sasaran 8.6. dan 8.b. yang juga membahas pendidikan terkait juga dengan hak pendidikan secara umum ataupun yang terkait dengan hak pendidikan anak.<sup>62</sup> Sasaran 8.7. yang membahas mengenai antara lain kerja paksa termasuk kerja paksa terhadap anak, perdagangan manusia, dan juga menjadikan anak sebagai prajurit relevan dengan larangan perdagangan budak, hak perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya, dan juga hak untuk tidak terlibat sebagai prajurit pada suatu perang.<sup>63</sup> Sasaran 8.8. terkait dengan perlindungan pekerja migran juga relevan dengan hak perempuan mendapatkan upah adil dan perlindungan dalam bekerja khususnya terkait dengan reproduksi perempuan.<sup>64</sup> Sasaran 8.4. terkait degradasi lingkungan terkait dengan hak atas lingkungan hidup.<sup>65</sup>

Tujuan 9 adalah mengenai infrastruktur.<sup>66</sup> Sasaran 9.4. yang membahas mengenai persoalan teknologi bersih dan tamah lingkungan pada infrastruktur dan industri relevan terhadap hak atas lingkungan hidup.<sup>67</sup>

Tujuan 10 fokus pada ketidaksetaraan.<sup>68</sup> Sasaran 10.2. mengenai pemberdayaan inklusi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak diskriminatif,<sup>69</sup> relevan dengan kebebasan berpendapat dan berpendapat, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak membentuk partai politik, dan hak terlibat dalam pemerintahan.<sup>70</sup> Persoalan diskriminasi pada Sasaran 10.3. juga relevan dengan hak-hak di UU 39/1999 yang disampaikan pada konteks Sasaran 10.2.<sup>71</sup> Sasaran 10.4. mengenai kebijakan perlindungan sosial dapat dikaitkan dengan hak jaminan sosial.<sup>72</sup>

Tujuan 11 fokus pada kota dan tempat tinggal berkelanjutan.<sup>73</sup> Sasaran 11.1.-11.4., 11.5.-11.7., dan 11.a.-11.b. yang secara umum ingin meningkatkan kualitas tempat tinggal dengan memperhatikan salah satunya aspek lingkungan relevan dengan hak lingkungan baik dan sehat dan hak tempat tinggal dan hidup layak.<sup>74</sup> Sasaran 11.4. yang juga membahas

<sup>61</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Tujuan 8, Sasaran 8.3., 8.5.-8.6. dan Sasaran 8.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 38 dan Pasal 49.

<sup>62</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Tujuan 8, Sasaran 8.6. dan Sasaran 8.b.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 12-13 dan Pasal 60.

<sup>63</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Tujuan 8, Sasaran 8.7.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 20, Pasal 63, dan Pasal 64.

<sup>64</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Tujuan 8, Sasaran 8.8.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 38 Ayat (2)-(4) dan Pasal 49 Ayat (2) beserta penjelasan dan Ayat (3).

<sup>65</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Tujuan 8, Sasaran 8.4.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 9 Ayat (3).

<sup>66</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 20-21 (Tujuan 9).

<sup>67</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Tujuan 9, Sasaran 9.4.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3).

<sup>68</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Tujuan 10).

<sup>69</sup> Untuk definisi "diskriminasi", lihat: UU 39/1999 (n. 9), Pasal 1 Angka 3.

<sup>70</sup> (1) UNGA Res. 70/1, 21 (n. 9) (Tujuan 10, Sasaran 10.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 17, Pasal 23-25, Pasal 39 beserta penjelasan, Pasal 43-44, Bagian Kesembilan beserta penjelasan, dan Bagian Kesepuluh beserta penjelasan.

<sup>71</sup> Ibid. Lihat juga: ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Tujuan 10, Sasaran 10.3.).

<sup>72</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Tujuan 10, Sasaran 10.4.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 41 beserta penjelasan.

<sup>73</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Tujuan 11).

<sup>74</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Tujuan 11, Sasaran 11.1.-11.4., Sasaran 11.5.-11.7., dan Sasaran 11.a.-11.b.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 40.

mengenai tentang perlindungan warisan budaya relevan dengan perlindungan masyarakat hukum adat termasuk kepada budaya mereka.<sup>75</sup>

Tujuan 12 membahas mengenai konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, Tujuan 13 mengenai perubahan iklim, Tujuan 14 tentang pelestarian laut, dan Tujuan 15 terkait dengan perlindungan ekosistem terestrial.<sup>76</sup> Seluruh sasaran yang ada pada Tujuan 12-15 relevan dengan hak lingkungan baik dan sehat pada UU 39/1999.<sup>77</sup>

Tujuan 16 adalah tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan.<sup>78</sup> Sasaran 16.1. mengenai pengurangan kekerasan dan kematian akibat kekerasan relevan dengan hak hidup, hak tidak disiksa, dan hak untuk tidak dibunuh.<sup>79</sup> Sasaran 16.2. yang fokus pada kekerasan pada anak terkait dengan hak hidup anak, hak perlindungan hukum terhadap kekerasan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, dan hak untuk tidak disiksa.<sup>80</sup> Sasaran 16.9. mengenai identitas hukum anak terkait dengan hak nama dan kewarganegaraan.<sup>81</sup> Sasaran 16.3. terkait dengan kepastian hukum pada tingkat nasional dan internasional relevan dengan hak upaya hukum tingkat nasional dan internasional.<sup>82</sup> Sasaran 16.10. mengenai akses informasi publik terkait dengan hak informasi.<sup>83</sup> Sasaran 16.6. dan 16.7. mengenai partisipasi mengenai pembuatan keputusan dan penguatan kelembagaan dapat dikaitkan dengan hak berpendapat untuk diberikan kepada pemerintah.<sup>84</sup>

Tujuan 17 fokus pada kolaborasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.<sup>85</sup> Komnas HAM dapat berperan dalam pengembangan data untuk memantau Agenda 2030 dan TPB dari aspek hak asasi manusia sebagaimana diatur Sasaran 17.18.<sup>86</sup> Data ini dapat terkait dengan hak informasi pada UU 39/1999.<sup>87</sup>

<sup>75</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Tujuan 11, Sasaran 11.4.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 6 beserta penjelasan.

<sup>76</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 22-25 (Tujuan 12-15).

<sup>77</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 22-25 (Tujuan 12, Sasaran 12.1.-12.8. dan Sasaran 12.a.-12.c.; Tujuan 13, Sasaran 13.1.-13.3. dan Sasaran 13.a.-13.c.; Tujuan 14, Sasaran 14.1.-14.7. dan Sasaran 14.a.-14.c.; dan Tujuan 15, Sasaran 15.1.-15.9. dan Sasaran 15.a.-15.c.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 9 Ayat (3).

<sup>78</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 25-26 (Tujuan 16).

<sup>79</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.1.); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1) beserta penjelasan, dan Pasal 33 beserta penjelasan. Lihat juga: catatan kaki nomor 4.

<sup>80</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.2.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 53 Ayat (1), Pasal 58 Ayat (1)-(2), dan Pasal 63-66.

<sup>81</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.9.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 53 Ayat (2) beserta penjelasan.

<sup>82</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Tujuan 16, Sasaran 16.3.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 7 beserta penjelasan. Lihat juga: catatan kaki nomor 5.

<sup>83</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.10.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 14 dan Pasal 32. Lihat juga: (1) Catatan kaki nomor 6; dan (2) Yuli Asmini, "Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan" SUAR, No. 3 Tahun 2015, 46 (Kolom).

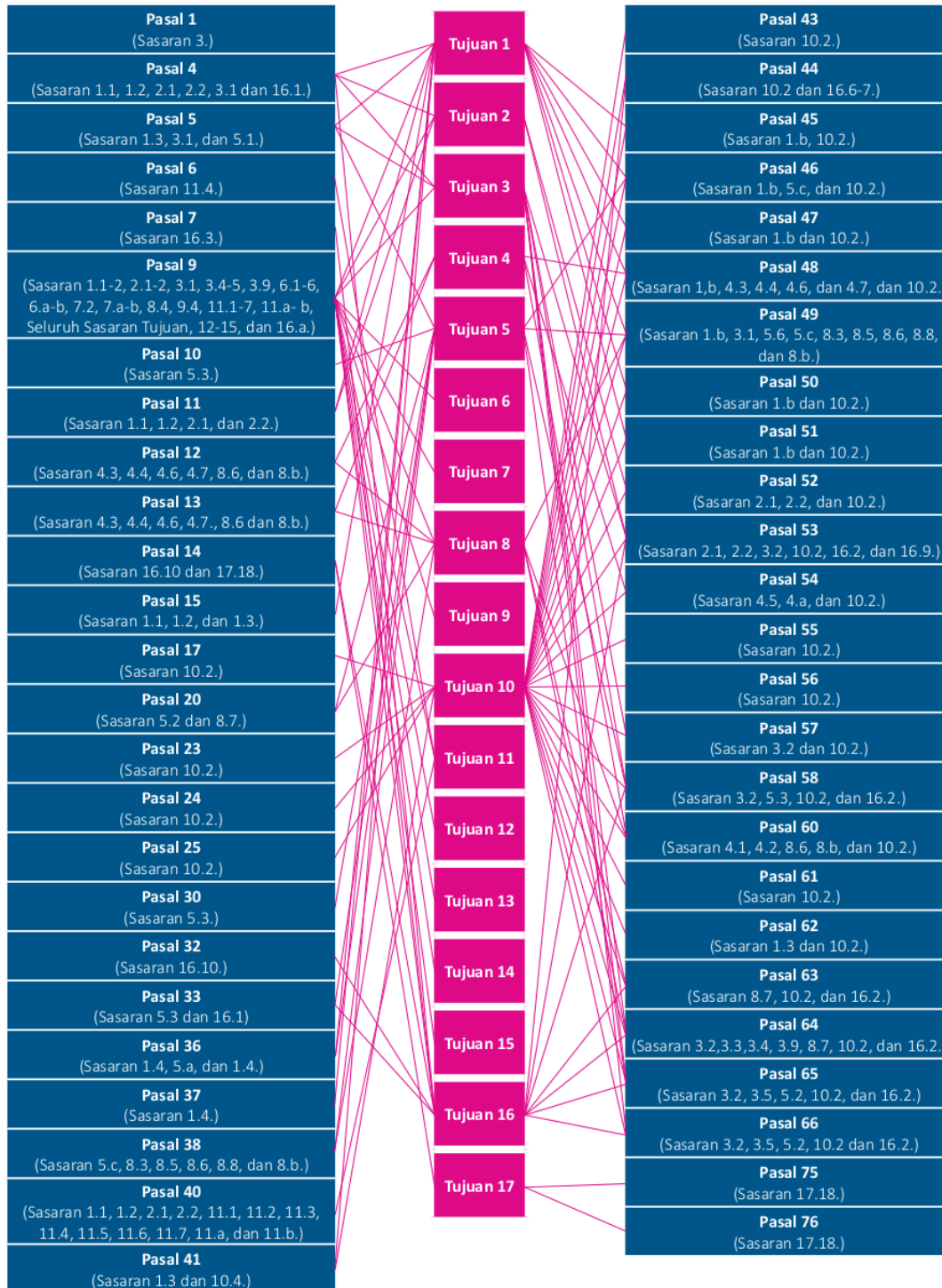
<sup>84</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 16, Sasaran 16.6.-16.7.); dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 44.

<sup>85</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 26-27 (Tujuan 17).

<sup>86</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Tujuan 17, Sasaran 17.18); dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 75 dan Pasal 76 Ayat (1).

<sup>87</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; dan (2) Ibid., UU 39/1999, Pasal 14 Ayat (2).

**KAITAN TUJUAN 1-17 DENGAN PASAL HAK ASASI MANUSIA DI UU 39/1999:**



### 3. PERAN KOMNAS HAM DALAM PENCAPAIAN TPB

Penting untuk digarisbawahi bahwa pada prinsipnya kegiatan Komnas HAM yang tidak secara eksplisit ditujukan khusus untuk pencapaian TPB sangat dapat dikaitkan dengan TPB. Salah satu cara untuk melakukan identifikasi terhadap hal tersebut dapat dengan melihat hubungan antara pasal yang ada pada UU 39/1999 dengan tujuan dan sasaran pada TPB berdasarkan UNGA Res. 70/1 seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2.

Secara umum Komnas HAM menerima 32.136 berkas pengaduan pada kurun waktu 2015-2019.<sup>88</sup> Tidak semuanya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>89</sup> Misalnya sekitar 15,8 persen berkas pengaduan di tahun 2019 tidak terkait dengan hak asasi manusia.<sup>90</sup> Komnas HAM juga telah memberikan pengelompokan terhadap hak asasi manusia yang paling tertinggi pada berkas pengaduan di tahun 2019.<sup>91</sup> Dari 4.778 berkas pengaduan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, hak terkait kesejahteraan berada pada peringkat 1 dengan persentase sekitar 50,7% dan hak terkait keadilan berada di posisi 2 dengan persentase sekitar 31%.<sup>92</sup> Kesejahteraan misalnya dapat dikaitkan dengan Tujuan 1 yang fokus pada isu kemiskinan dan keadilan dapat dikaitkan dengan Tujuan 16.<sup>93</sup>

Contoh lain misalnya dalam konteks penanganan mediasi. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, mediasi terkait dengan persoalan lahan selalu menjadi mediasi dengan tingkat kasus tertinggi.<sup>94</sup> Kecuali pada tahun 2017, angka mediasi terkait dengan lahan selalu di atas persentase 45%.<sup>95</sup> Tingkat kasus mediasi tertinggi kedua adalah mediasi ketenagakerjaan yang selalu menempati peringkat kedua kasus tertinggi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.<sup>96</sup> Sama seperti pendapat di atas Komnas HAM dapat melihat pasal atau hak asasi manusia apa yang biasa digunakan dan relevan terhadap kasus terkait dengan sengketa lahan dan ketenagakerjaan lalu mengaitkannya dengan tujuan dan sasaran pada TPB. Lalu, TPB ini dapat diintegrasikan pada saat pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM terkait dengan fungsi mediasi.<sup>97</sup>

<sup>88</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (2020) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019"), 41.

<sup>89</sup> Ibid., "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019".

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid., 42.

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> (1) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015, "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" (2016) (selanjutnya: "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015"), 112; (2) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016, "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016" (2017) (selanjutnya: "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016"), 84; (3) Komnas HAM, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (2017) (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017"), 72; (4) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (selanjutnya: "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018") (2019), 37; dan (5) Ibid., "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019", 50.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (4) beserta penjelasan.

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai sejumlah kegiatan Komnas HAM yang direncanakan secara khusus untuk kepentingan pencapaian TPB dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM apabila dilihat dari aspek TPB dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kegiatan yang meliputi seluruh TPB secara umum. Kedua, kegiatan yang spesifik terkait dengan satu tujuan pada TPB atau lebih namun tidak sampai meliputi seluruh tujuan TPB. Bab ini akan mengklasifikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan Komnas HAM yang memiliki dampak strategis bagi Komnas HAM untuk mengeksplorasi perannya pada seluruh tujuan pada TPB. Dalam memaparkan kegiatan tersebut aspek tugas dan wewenang terkait fungsi Komnas HAM akan turut diidentifikasi.<sup>98</sup>

Perlu diketahui Tim Sustainable Development Goals Komnas HAM (selanjutnya: Tim SDGs Komnas HAM) telah melakukan inventaris kegiatan TPB yang dilaksanakan Komnas HAM pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.<sup>99</sup> Inventaris tersebut terutama pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.<sup>100</sup> Untuk tahun 2016 dan 2017 hanya tercatat masing-masing satu kegiatan saja pada inventaris Tim SDGs Komnas HAM.<sup>101</sup> Pada inventaris kegiatan tahun 2016-2018, Tim SDGs Komnas HAM juga telah secara khusus mengidentifikasi tujuan pada TPB apa yang terkait pada kegiatan yang dilaksanakan.<sup>102</sup> Sedangkan pada inventaris 2020 tidak terdapat identifikasi tersebut dan pada inventaris 2019 hanya diidentifikasi TPB pada dua kegiatan.<sup>103</sup> Selain bersumber pada kegiatan TPB yang dilaksanakan oleh Komnas HAM berdasarkan inventaris dari Tim SDGs Komnas HAM, penelitian ini juga akan melihat sumber dari Komnas HAM lainnya seperti laporan tahunan, rencana strategis, laporan kinerja serta berdasarkan sumber terkait lainnya di luar Komnas HAM.

**” TPB memiliki 17 tujuan diikuti dengan sasaran/target dan indikator yang melekat pada masing-masing. Seluruh tujuan TPB terdapat lengkap pada Perpres 59/2017. Namun tidak semua sasaran yang ada berdasarkan Resolusi United Nations General Assembly 70/1 Tahun 2015 terkait dengan pembangunan berkelanjutan dimasukkan ke dalam sasaran global yang ada pada Perpres 59/2017.**

<sup>98</sup> Untuk tugas dan wewenang terkait fungsi Komnas HAM, lihat: *ibid.*, UU 39/1999, Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 89.

<sup>99</sup> (1) Komnas HAM, “Laporan Kegiatan Tim Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM Tahun 2020” (selanjutnya: “Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020”); (2) Komnas HAM, “Laporan dan Review Kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM 2019” (selanjutnya: “Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019”); dan (3) Komnas HAM, “Komnas HAM List of SDGs Activities [List of SDGs’ Activities]” (selanjutnya: “Komnas HAM List of SDG’s Activities”).

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, “Komnas HAM List of SDG’s Activities”.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> (1) “Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020” (n. 99); dan (2) “Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019” (n. 99).

Tim SDGs Komnas HAM dibentuk pada tahun 2019.<sup>104</sup> Pembentukan Tim SDGs Komnas HAM merupakan langkah penting untuk memastikan terdapat pemain kunci yang dapat bekerja secara khusus dan fokus pada TPB dan hak asasi manusia dalam Komnas HAM.<sup>105</sup> Terbentuknya tim ini merupakan langkah awal yang positif dalam memperkuat peran Komnas HAM dalam pencapaian TPB di Indonesia. Di tahun 2016 Komnas HAM diberikan kepercayaan sebagai koordinator TPB untuk Asia Pasifik oleh GANHRI.<sup>106</sup> Pada bulan Februari 2018, Komnas HAM turut menghadiri Sidang Tahunan GANHRI yang salah satu topik pembahasannya adalah mengenai TPB.<sup>107</sup> Posisi sebagai koordinator ini strategis karena penguatan peran Komnas HAM pada TPB dapat didukung dan menjadi inspirasi bagi National Human Rights Institutions (selanjutnya: NHRI) di negara wilayah Asia Pasifik.

Hadirnya *web-based tool* TPB berbasis indikator hak asasi manusia dapat dikatakan merupakan salah satu kegiatan strategis yang dilakukan oleh Komnas HAM pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 terkait dengan TPB dan hak asasi manusia.<sup>108</sup> *Web-based tool*/TPB dan hak asasi manusia tersebut strategis karena memuat standar indikator hak asasi manusia yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tujuan pada TPB.<sup>109</sup> Selain itu cakupan tujuan yang dibahas pada *web-based tool* tersebut meliputi bukan hanya Tujuan 5 dan 16 namun juga Tujuan 1-4, 6, 8, dan 10.<sup>110</sup> Kedepannya juga telah direncanakan untuk melengkapi tujuan yang belum dimuat pada *web-based tool* tersebut.<sup>111</sup> Hadirnya *web-based tool* ini merupakan salah satu bukti penting kinerja Komnas HAM dalam memberikan kontribusi pencapaian TPB di luar Tujuan 5 dan 16 yang dapat diakses oleh semua pihak.

Pembuatan *web-based tool* tersebut merupakan salah satu implementasi nota kesepahaman

<sup>104</sup> Lihat: (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 94; dan (2) Ibid., "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019", 5.

<sup>105</sup> Lihat: *ibid.*

<sup>106</sup> Feri/IBN, "Integrasi HAM dalam Sustainable Development Goals", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 10 September 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/10/1145/integrasi-ham-dalam-sustainable-development-goals.html>. Untuk latar belakang GANHRI, lihat: "A Brief History of GANHRI", GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021, <https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/History.aspx>.

<sup>107</sup> RO/OL-3, "GANHRI Anugerahi Penghargaan Tertinggi Kepada Komnas HAM 'Akreditasi A'", *MediaIndonesia.com*, dipublikasi tanggal 24 Februari 2018, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/146685/ganhri-anugerahi-penghargaan-tertinggi-kepada-komnas-ham-akreditasi-a>.

<sup>108</sup> Komnas HAM, UNESCO, dan UNSDG, "Human Rights Based Development in Indonesia", diakses tanggal 2 Januari 2021, <https://sdg.komnasham.go.id/en/sdgs/> (selanjutnya: *web-based tool*). Lihat juga: (1) Laporan Tahunan Komnas HAM 2017 (n. 94), 91 dan 43; (2) Tim Penyusun Laporan Kinerja Biro Renwakes Komnas HAM, "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama" (selanjutnya: "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama"), 24-25 dan 27; (3) Komnas HAM List of SDG's Activities (n. 99); dan (4) MDH, "Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 April 2017, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/6/12/351/tindak-lanjut-kerjasama-komnas-ham-unesco-asia-pasifik.html>.

<sup>109</sup> *Ibid.*, *web-based tool*.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Lihat: (1) MDH, "Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 Maret 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/20/1014/kerjasama-dengan-unesco-mendorong-kebijakan-berbasis-bukti.html>; (2) MDH, "Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM" (n. 108); dan (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 95.

antara Komnas HAM dengan UNESCO di bulan Juni 2017 dan juga didukung oleh United Nations Sustainable Development Group (selanjutnya: UNSDG).<sup>112</sup> Kualitas *web-based tool* tersebut juga terus dikembangkan dari segi aplikasinya terhadap misalnya topik seperti disabilitas dan demografi<sup>113</sup> serta pengembangan dari aspek teknis teknologi informasi.<sup>114</sup> Di tahun 2019 alat bantu indikator hak asasi manusia Komnas HAM dan UNESCO digunakan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai salah satu landasan penelitian yang telah dipublikasikan.<sup>115</sup> *Web-based tool* tersebut juga telah dipromosikan oleh Komnas HAM, misalnya pada bulan Maret 2018 ketika perwakilan Komnas HAM menjadi pembicara pada Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2018 di Thailand dan menjelaskan mengenai *web-based tool* indikator hak asasi manusia dalam TPB yang berfungsi sebagai alat yang mendukung pelaksanaan TPB.<sup>116</sup>

Pembuatan *web-based tool* indikator hak asasi manusia bersama dengan UNESCO dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM khususnya mengenai kolaborasi dengan mitra asing.<sup>117</sup> Selain itu *web-based tool* tersebut juga dapat berperan sebagai salah satu bentuk implementasi fungsi penyuluhan dari Komnas HAM.<sup>118</sup> Kegiatan pertemuan dengan mitra kerja sama di atas dapat diklasifikasikan sebagai implementasi pengkajian dan penelitian berbentuk pembahasan dan kolaborasi hak asasi manusia dengan pihak mitra.<sup>119</sup> Sedangkan kegiatan perwakilan Komnas HAM menjadi pembicara dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kolaborasi penyuluhan dengan mitra.<sup>120</sup>

Komnas HAM menempatkan TPB pada posisi penting ketika memasukkan TPB dalam laporan tahunan dan rencana strategis. Laporan tahunan adalah dokumen yang wajib dibuat oleh Komnas HAM untuk diberikan kepada unsur eksekutif (Presiden),

<sup>112</sup> (1) Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (12 Juni 2017); (2) *Web-based tool* (n. 108); (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (n. 94), 91 dan 43; dan (4) "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama" (n. 108), 24-25 dan 27.

<sup>113</sup> (1) MDH, "Disiapkan, Perangkat Monitoring SDGs Berbasis Web", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 18 Oktober 2017, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/18/425/disiapkan-perangkat-monitoring-sdgs-berbasis-web.html>; (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 94; dan (3) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 2.

<sup>114</sup> "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (n. 94), 19.

<sup>115</sup> (1) Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, "Linking SDGs and Human Rights: Demography Aspects" (Final Report) (2019); (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 94; (3) "Komnas HAM List of SDG's Activities" (n. 99); dan (4) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 2.

<sup>116</sup> MDH, "Pendekatan HAM untuk Mencapai SDGs", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 30 Maret 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/30/511/pendekatan-ham-untuk-mencapai-sdgs.html>.

<sup>117</sup> UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf f.

<sup>118</sup> Ibid., UU 39/1999, Pasal 89 Ayat (2) Huruf a-c.

<sup>119</sup> (1) Ibid., UU 39/1999, Pasal 89 Ayat (1) Huruf e dan f; dan (2) Catatan kaki nomor 113-114.

<sup>120</sup> (1) Ibid., UU 39/1999, Pasal 89 Ayat (2) Huruf c; dan (2) Catatan kaki nomor 116.

legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan yudikatif (Mahkamah Agung).<sup>121</sup> Pelaporan TPB yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM menjadi langkah strategis bagi Komnas HAM untuk menunjukkan Komnas HAM layak dan telah melaksanakan upaya pencapaian tujuan pada TPB melebihi dari Tujuan 5 dan 16 saja kepada pihak-pihak strategis di atas. Pelaporan kegiatan TPB telah dilakukan sejak laporan pada tahun 2017 sampai dengan laporan tahun 2019.<sup>122</sup> Pada laporan tahunan 2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM jauh meningkat apabila dibandingkan dengan laporan tahunan 2017 dan 2018 yang tidak banyak menyinggung mengenai TPB dan hak asasi manusia.<sup>123</sup> Laporan tahunan 2017, 2018, dan 2019 sama-sama melaporkan pelaksanaan kegiatan implementasi TPB secara umum.<sup>124</sup> Pada laporan tahunan 2019 tujuan spesifik pada tujuan TPB tertentu sudah mulai dilaporkan walaupun tidak semuanya secara eksplisit dijelaskan.<sup>125</sup> Pada saat penelitian ini dikerjakan laporan tahunan 2020 belum dipublikasikan.

Sedangkan rencana strategis penting karena dokumen ini merupakan pedoman bagi Komnas HAM dalam menjalankan aktivitasnya. Komnas HAM telah menempatkan TPB sebagai bagian kebijakan dan strategi Komnas HAM sejak Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.<sup>126</sup> Namun demikian, tujuh isu prioritas yang ditetapkan oleh Komnas HAM dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 membatasi diri dan terlihat menyesuaikan dengan Tujuan 16, khususnya di Sasaran 16.1., 16.3., dan 16.6. saja.<sup>127</sup> Menurut penjelasan Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM / Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM) pemilihan tujuh isu prioritas menggunakan pendekatan berdasarkan apa yang utamanya dibutuhkan oleh masyarakat berbasis data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. Pada rencana strategis sebelumnya di periode 2015-2019, persoalan TPB belum dimasukkan dan tidak ada versi revisi terhadap rencana strategis tersebut.<sup>128</sup>

Kolaborasi Komnas HAM baik dengan mitra dari luar negeri maupun dalam negeri telah menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif terkait dengan TPB dan hak asasi manusia. Kolaborasi ini sesuai dengan tugas dan wewenang Komnas HAM terkait kerja sama di bidang pengkajian dan penelitian serta penyuluhan.<sup>129</sup> Kolaborasi ini penting karena dapat memaksimalkan upaya Komnas HAM dalam menjalankan kegiatan TPB dengan perspektif hak asasi manusia dengan dukungan pihak ketiga. Contoh mitra luar negeri Komnas HAM dalam berkolaborasi pada bidang TPB dan hak asasi manusia yang telah memiliki nota

<sup>121</sup> Lihat: *ibid.*, UU 39/1999 (n. 9), Pasal 97.

<sup>122</sup> (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" (n. 94), 91 dan 43; (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (n. 94), 36, 54, dan 90-91; dan (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 36, 91, 94-95, 110, 114-116, 118, dan 120. Lihat juga secara umum: (1) "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" (n. 94); dan (2) "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016" (n. 94).

<sup>123</sup> Bandingkan: *ibid.*

<sup>124</sup> Bandingkan: *ibid.*

<sup>125</sup> "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 94-95 dan 114.

<sup>126</sup> Komnas HAM Republik Indonesia, "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024", 43-46.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Lihat secara umum: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019". Lihat juga: UNGA Res. 70/1 (n. 2).

<sup>129</sup> UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf f dan Ayat (2) Huruf c.



kesepahaman dengan Komnas HAM antara lain UNESCO,<sup>130</sup> Danish Institute for Human Rights (selanjutnya: DIHR),<sup>131</sup> Human Rights Commission of Malaysia.<sup>132</sup>

UNESCO dan DIHR dapat dikatakan merupakan dua mitra luar negeri Komnas HAM yang paling menonjol dalam berkolaborasi dengan Komnas HAM. Hasil kolaborasi dengan UNESCO yang menonjol adalah pembuatan *web-based tool* indikator hak asasi manusia yang dikaitkan dengan TPB dan berbagai kegiatan pendukung serta turunannya yang telah dijelaskan di atas. Hasil kolaborasi yang menonjol dengan DIHR adalah antara lain pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas Komnas HAM dan pihak terkait lainnya dalam TPB dan hak asasi manusia terutama pada tahun 2019 dan 2020.<sup>133</sup> Salah satu kegiatan yang baru-baru ini dilaksanakan misalnya pada bulan Desember 2020 Komnas HAM menyelenggarakan *webinar* mengenai peran NHRI dalam TPB di mana perwakilan DIHR turut menjadi salah satu narasumber.<sup>134</sup> Contoh kegiatan lain, pada bulan Maret 2019, salah satu Komisioner Komnas HAM menyampaikan perspektif Indonesia mengenai kaitan demografi dengan TPB pada salah satu sesi pada kegiatan Asia-Pacific People's Forum on Sustainable Development 2019 di mana DIHR merupakan salah satu mitra kerja sama Komnas HAM dalam penyelenggaraan sesi tersebut.<sup>135</sup> Terdapat dua tujuan yang disebut secara eksplisit sebagai latar belakang acara ini yaitu Tujuan 10 dan 16.<sup>136</sup>

<sup>130</sup> (1) Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (12 Juni 2017); dan (2) "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama" (n. 108), 24-25 dan 27.

<sup>131</sup> (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 110; (2) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM, "Laporan Kinerja 2018", 26; dan (3) Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia LKIP Laporan Kinerja 2018" (2018), 67.

<sup>132</sup> (1) Memorandum of Understanding (MOU) between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and the National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), with the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP) as an Official Observer on Statelessness Issues in Sabah (23 April 2019); dan (2) Ibid., "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019", 115-116.

<sup>133</sup> Misalnya seperti yang tercatat pada: (1) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 3-4 dan 6-9; (2) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020" (n. 99), 2-5 dan 8-9.

<sup>134</sup> (1) Komnas HAM, *Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic*, Youtube video, menit ke 52-53, diakses tanggal 30 Desember 2020, [https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t\\_0tM&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t_0tM&feature=youtu.be); (2) AAP/IW, "Komnas HAM Kawal Capaian SDGs pada Masa Pandemi COVID-19", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 23 Desember 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/12/23/1635/komnas-ham-kawal-capaian-sdgs-pada-masa-pandemi-covid-19.html>; dan (3) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2020" (n. 99), 9.

<sup>135</sup> (1) Nur Afifa Fauzia, "Aspek Demografi Sebagai Salah Satu Pendekatan Pemantauan SDGs di Indonesia", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 1 April 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/4/1/776/aspek-demografi-sebagai-salah-satu-pendekatan-pemantauan-sdgs-di-indonesia.html>; (2) "Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights", (29 Maret 2019) (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development), <https://www.unescap.org/apfsd/6/document/sidevents/Empowering%20the%20most%20marginalized%20and%20Ensuring%20Inclusiveness%20and%20Equality.pdf>; (3) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 115; dan (4) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM, "Laporan Kinerja 2019", 33.

<sup>136</sup> Ibid., "Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights".

Mitra dalam negeri juga tidak kalah penting dalam mendukung Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatan TPB dan hak asasi manusia. Misalnya pada bulan Juni 2015, konsep TPB telah diperkenalkan oleh Komnas HAM pada kegiatan *workshop* dan pelatihan mengenai kota hak asasi manusia terkait dengan pembangunan Kabupaten Wonosobo.<sup>137</sup> Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama pada nota kesepakatan bersama Komnas HAM dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (selanjutnya: ELSAM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (selanjutnya: INFID) yang sebelumnya telah ditandatangani oleh para pihak pada bulan Mei 2015.<sup>138</sup> *Workshop* dan pelatihan ini juga didukung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Friedrich Naumann Foundation.<sup>139</sup> Di tahun yang sama pada bulan November, Komnas HAM bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta ELSAM dan INFID mengeluarkan pernyataan pers mengenai kota ramah hak asasi manusia dan mengaitkannya dengan TPB.<sup>140</sup> Tema mengenai kota ramah hak asasi manusia sangat relevan dengan Tujuan 11 TPB.<sup>141</sup> Pada bulan November 2018 Komnas HAM berkolaborasi dengan antara lain pemerintah pusat, provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Wonosobo serta INFID berhasil mendorong terwujudnya Deklarasi Wonosobo yang mendukung keberhasilan TPB secara umum di mana Tim SDGs Komnas HAM mengaitkan kegiatan ini dengan Tujuan 5, 10, 11, dan 16.<sup>142</sup> Kolaborasi dengan pemerintah pusat (Kantor Staf Presiden) dan daerah (Pemerintah Kabupaten Jember) serta INFID terkait TPB kembali berlanjut pada misalnya acara Festival Hak Asasi Manusia 2019.<sup>143</sup>

Kerja sama antara Komnas HAM serta mitra dalam dan luar negeri juga terjadi ketika Komnas HAM berkolaborasi bersama INFID, United Cities and Local Governments Asia Pacific, dan Raoul Wallenberg Institute menyelenggarakan acara bertemakan kota hak asasi manusia dan TPB di Korea Selatan.<sup>144</sup>

Dalam FGD Internal Komnas HAM ditanyakan melalui kuesioner antara lain mengenai sejauh apa dampak lima pengelompokan kegiatan Komnas HAM mengenai TPB pada bab

<sup>137</sup> Yuli Asmini, "Loklatih *Human Rights Cities* di Wonosobo" SUAR, No. 1 Tahun 2015, 40.

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> "Pemantauan Workshop Pengarusutamaan HAM Dalam Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah HAM", Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipublikasi tanggal 7 Juni 2015, <http://ham.go.id/pemantauan-workshop-pengarusutamaan-ham-dalam-pengembangan-wonosobo-sebagai-kabupaten-ramah-ham/>.

<sup>140</sup> (1) Komnas HAM, INFID, ELSAM, dan Kemenkumham, "Siaran Pers Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia"; dan (2) Eva Nila Sari, "Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 13 November 2015, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/11/13/229/komnas-ham-ri-infid-elsam-dan-kemenkumham-ri-dorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.html>.

<sup>141</sup> Lihat: catatan kaki nomor 73-75.

<sup>142</sup> (1) "Deklarasi Wonosobo dalam Festival HAM Indonesia 2018", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 15 November 2018, [komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/deklarasi-wonosobo-dalam-festival-ham-indonesia-2018.html](http://komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/deklarasi-wonosobo-dalam-festival-ham-indonesia-2018.html); (2) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (n. 94), 90-91; dan (3) "Komnas HAM List of SDG's Activities" (n. 99).

<sup>143</sup> (1) "Laporan Kegiatan Tim SDGs Komnas HAM 2019" (n. 99), 8; dan (1) "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (n. 88), 32-34 dan 110.

<sup>144</sup> Yuli Asmini, "Forum Kota HAM Dunia dan Peran Penting Komnas HAM", Komnas HAM, dipublikasi tanggal 24 Oktober 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/24/651/forum-kota-ham-dunia-dan-peran-penting-komnas-ham.html>.

ini kepada pencapaian TPB di Indonesia dikaitkan dengan hak asasi manusia.<sup>145</sup> Terdapat lima belas orang yang mengisi kuesioner tersebut termasuk di antaranya terdapat tiga orang komisioner Komnas HAM. Berikut jawaban dari pertanyaan tersebut:

**DAMPAK KEGIATAN TERHADAP PENCAPAIAN TPB DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PESERTA FGD TANGGAL 26 JANUARI 2021 DARI KOMNAS HAM:<sup>146</sup>**

| No. | Kegiatan   | Dampak Kegiatan Terhadap TPB dan Hak Asasi Manusia |                  |                   |            |                   |
|-----|--|--|------------------|-------------------|------------|-------------------|
|     |  | Tidak Mengetahui                                   | Tidak Bermanfaat | Kurang Bermanfaat | Bermanfaat | Sangat Bermanfaat |
| 1.  | Pembentukan Tim SDGs Komnas HAM                                | 0  | 6,7%             | 0                 | 73,3%      | 20%               |
| 2.  | Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik          | 6,7%   | 0                | 6,7%              | 66,7%      | 20%               |
| 3.  | <i>Web-based Tool</i> TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia | 0  | 20%              | 0                 | 80%        | 0                 |
| 4.  | Laporan Tahunan dan Rencana Strategis                          | 6,7%   | 0                | 6,7%              | 66,7%      | 20%               |
| 5.  | Kolaborasi dengan Mitra dari Luar dan/ atau Dalam Negeri       | 6,7%   | 0                | 6,7%              | 60%        | 26,7%             |

<sup>145</sup> Penting untuk disampaikan bahwa ketika responden ditanya mengenai pertanyaan tertutup (ya atau tidak) apakah responden mengetahui atau pernah mendengar mengenai (1) Pembentukan Tim SDGs Komnas HAM terdapat 1 responden (6,7%) yang memilih tidak; (2) Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik terdapat 2 responden (13,3%) yang memilih tidak; (3) *Web-based Tool* TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia terdapat 1 responden (6,7%) yang memilih tidak; (4) Laporan Tahunan dan Rencana Strategis terdapat 3 responden (20%) yang memilih tidak; dan (5) Kolaborasi dengan Mitra dari Luar dan/atau Dalam Negeri terdapat 1 responden (6,7%) yang memilih tidak. Data yang digunakan pada matriks adalah menggunakan jawaban responden terhadap pertanyaan yang dibuat secara khusus untuk kepentingan pembuatan matriks ini bukan dari data pertanyaan tertutup tersebut.

<sup>146</sup> Terdapat dua kegiatan yang tidak dimasukkan ke dalam matriks dikarenakan terdapat konfirmasi pada FGD Internal Komnas HAM bahwa salah satu kegiatan tersebut yaitu: (1) Memberikan komentar mengenai perda terkait dengan HIV/AIDS kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara eksplisit dengan TPB (berdasarkan informasi Mimin Dwi Hartono); sedangkan kegiatan satu yang lainnya yaitu: (2) Salah satu komisioner Komnas HAM menjadi saksi ahli pada suatu perkara pengadilan pidana terkait dengan penahanan seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat adat tidak dapat diingat apakah terkait secara langsung dengan TPB atau tidak (berdasarkan informasi Sandrayati Moniaga), sumber: (1) FGD Internal Komnas HAM (n. 7); dan (2) Komnas HAM List of SDG's Activities" (n. 99).

**UKURAN PENILAIAN:**

1. Tidak Mengetahui: Tidak pernah mengetahui sama sekali kegiatan tersebut.
2. Tidak Bermanfaat: Tidak ada dampak positif sama sekali terhadap pencapaian TPB dan HAM.
3. Kurang Bermanfaat: Hanya sedikit berdampak positif terhadap pencapaian TPB dan HAM. Kegiatannya hampir tidak terdengar bahkan di internal Komnas HAM. Belum menjadi pemicu terlaksananya kegiatan TPB lainnya.
4. Bermanfaat: Berdampak positif terhadap pencapaian TPB dan HAM, namun belum menjadi pemicu terlaksananya kegiatan TPB lainnya.
5. Sangat Bermanfaat: Sangat berdampak positif terhadap pencapaian TPB dan HAM dan menjadi pemicu sejumlah kegiatan TPB lainnya.

Beberapa temuan yang menarik misalnya adalah kolaborasi Komnas HAM dengan mitra kerja sama luar dan/atau dalam negeri dipilih sebagai kegiatan yang paling “sangat bermanfaat” (26,7%) terhadap TPB dan hak asasi manusia. Secara mayoritas, responden mengatakan 5 kegiatan yang ada pada matriks di atas berada pada kategori “bermanfaat”. Namun demikian, masih terdapat 1 responden (6,7%) yang belum mengetahui bahwa Komnas HAM adalah Koordinator TPB untuk Asia Pasifik (GANHRI) dan memiliki pelaporan TPB pada laporan tahunan serta perencanaan TPB pada Rencana Strategis; lalu masih terdapat 1 responden (6,7%) yang belum mengetahui kolaborasi yang telah Komnas HAM jalankan dengan mitra dari luar dan/atau dalam negeri. Selain itu, *Web-based Tool* TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia dianggap tidak bermanfaat oleh sebanyak 3 responden (20%).

Hasil yang didapatkan dari jawaban pada kuesioner FGD Eksternal Komnas HAM yang ditanyakan kepada 10 responden menunjukkan Komnas HAM belum mempromosikan pelaksanaan kegiatan TPB secara optimal kepada sejumlah pihak strategis di luar Komnas HAM. Berikut adalah hasilnya:

| No. | Kegiatan  | Apakah Anda mengetahui dan/atau pernah mendengar (untuk web-based tool, dan/atau memanfaatkan) |       |
|-----|---|--|-------|
|     |   | Ya   | Tidak |
| 1.  | Kegiatan Komnas HAM dalam Pencapaian TPB                    | 40%  | 60%   |
| 2.  | Web-based Tool TPB Berbasis Indikator Hak Asasi Manusia     | 20%  | 80%   |
| 3.  | TPB pada Laporan Tahunan dan Rencana Strategis Komnas HAM   | 50%  | 50%   |
| 4.  | Tim SDGs Komnas HAM   | 20%  | 80%   |
| 5.  | Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik       | 10%  | 90%   |
| 6.  | Kolaborasi TPB dengan Mitra dari Luar dan/atau Dalam Negeri | 30%  | 70%   |

Pada prinsipnya Komnas HAM perlu secara komprehensif mengintegrasikan pelaksanaan Tujuan 1-17 TPB dalam menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal ini dapat dimulai dengan menyatakan secara tegas di dokumen-dokumen strategis Komnas HAM yang menjadi acuan Komnas HAM dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya di dalam rencana strategis.<sup>147</sup> Selanjutnya hasil pelaksanaan dari rencana strategis tersebut diharapkan secara rutin dilaporkan dan tercatat secara resmi pada laporan tahunan Komnas HAM. Sandrayati Moniaga juga mengingatkan mengenai perlunya tindak lanjut identifikasi secara komprehensif terhadap kegiatan Komnas HAM yang dapat dikaitkan dengan TPB untuk memperkuat laporan tahunan.

Pola alur pelaksanaan suatu kegiatan berbasis fungsi Komnas HAM dapat bermacam-macam. Berikut ini hanya salah satu contoh saja, misalnya, alur integrasi dapat dimulai dari pembahasan persoalan TPB dan hak asasi manusia pada masing-masing tujuan di TPB.<sup>148</sup> Setelah pokok pembahasan ditetapkan dapat lanjut untuk mencari mitra kolaborasi relevan untuk melakukan pengkajian dan penelitian serta nantinya untuk kepentingan penyuluhan TPB dan hak asasi manusia.<sup>149</sup> Bentuk pengkajian dan penelitian dapat berupa misalnya analisis terhadap instrumen internasional terkait TPB dan hak asasi manusia yang perlu disahkan oleh Indonesia dan/atau rekomendasi terkait pembuatan dan revisi peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran TPB dan hak asasi manusia.<sup>150</sup> Cara mengerjakan pengkajian dan penelitian dapat dengan menggunakan misalnya pendekatan dari negara lain yang telah berhasil melakukan integrasi hak asasi manusia pada TPB.<sup>151</sup> Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan perlu diterbitkan dan dapat diakses oleh umum dengan mudah.<sup>152</sup> Hasil kajian dan penelitian tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra Komnas HAM pada institusi pendidikan baik formal maupun informal.<sup>153</sup> Beka Ulung Hapsara menyampaikan perlunya terdapat strategi dalam diseminasi dan menjelaskan persoalan TPB secara lebih luas.

Terkait dengan fungsi pemantauan dan mediasi, pada prinsipnya Komnas HAM dapat menerima pelaporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai pihak yang diatur pada UU 39/1999 di mana para pihak tersebut memiliki hak untuk melapor.<sup>154</sup> Pelaporan yang diberikan kepada Komnas HAM tersebut dapat Komnas HAM tindak lanjuti dengan mengaitkan bukan hanya pasal-pasal hak asasi manusia pada UU 39/1999 namun juga TPB yang relevan pada pasal-pasal tersebut. Di sisi yang lain masyarakat juga perlu dijelaskan bahwa hak-hak yang pada UU 39/1999 relevan dengan TPB jadi masyarakat dapat mengintegrasikan TPB dalam pelaporan maupun usulannya.<sup>155</sup> Sille Stidsen dari DIHR

<sup>147</sup> Kumiasari Novita Dewi (Bagian Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM) mengingatkan pentingnya TPB terintegrasi selain pada rencana strategis namun juga pada antara lain anggaran, lihat: FGD Internal Komnas HAM (n. 7).

<sup>148</sup> Lihat: UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf e.

<sup>149</sup> Lihat: *ibid.*, Pasal 89 Ayat (1) Huruf f dan Pasal 89 Ayat (2) Huruf c.

<sup>150</sup> Lihat: *ibid.*, Pasal 89 Ayat (1) Huruf a dan b.

<sup>151</sup> Lihat: *ibid.*, Pasal 89 Ayat (1) Huruf d.

<sup>152</sup> Lihat: *ibid.*, Pasal 89 Ayat (1) Huruf c.

<sup>153</sup> Lihat: *ibid.*, Pasal 89 Ayat (2) Huruf a-b.

<sup>154</sup> Lihat: *ibid.*, Pasal 89 Ayat (3) Huruf b-g serta Ayat (4), Pasal 90, dan Pasal 101.

<sup>155</sup> Lihat: *ibid.*, Pasal 89 Ayat (3) Huruf a dan h.

mengemukakan pentingnya untuk “initiating dialogue with relevant duty bearers in relation to patterns of neglect and violations found in the handling of complaints” [memulai diskusi dengan pihak berwenang terkait pola kelalaian dan pelanggaran yang ditemukan dalam menangani aduan]. Menurut Stidsen, “when such patterns emerge, it could be brought up in dialogue with the relevant ministries and local authorities—and pointed out that this neglect is out of sync with commitments under the SDGs” [ketika pola tersebut timbul, hal itu dapat dibicarakan dalam diskusi dengan menteri dan pejabat yang berwenang—dan dapat ditunjukkan bahwa kelalaian tersebut tidaklah sesuai dengan komitmen-komitmen dalam TPB]. Komnas HAM juga perlu menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif, salah satu contohnya yaitu dengan mengawasi perlindungan HAM di masyarakat dan menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan HAM kepada ketua pengadilan dan mengaitkannya dengan TPB. Tindakan ini tentunya akan memperkuat implementasi dan integrasi TPB pada Komnas HAM. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan fungsi Komnas HAM tersebut, *web-based tool* TPB dan indikator hak asasi manusia misalnya dapat diberdayakan secara optimal sebagai alat bantu.

Berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh Komnas HAM pada tahun 2015 sampai dengan 2020 pada Bab 3 dapat terlihat sejumlah kegiatan yang fokus pada bidang pengkajian dan penelitian (Pasal 89 Ayat (1) UU 39/1999) dan penyuluhan (Pasal 89 Ayat (2) UU 39/1999). Namun demikian, perlu disampaikan bahwa tidak ditemukan kegiatan eksplisit mengenai TPB dan hak asasi manusia yang terkait dengan mediasi (Pasal 89 Ayat (4) UU 39/1999) dan kegiatan yang terkait dengan fungsi pemantauan (Pasal 89 Ayat (3) UU 39/1999).

Salah satu pihak sentral yang dapat menjadi penggerak utama untuk memastikan Komnas HAM mendukung pencapaian TPB dikaitkan dengan hak asasi manusia adalah Tim SDGs Komnas HAM—yang tentunya memerlukan dukungan penuh dari seluruh komisioner dan staf. Dari internal Komnas HAM, disampaikan oleh Asri Oktavianty Wahono (Koordinator Bidang Mediasi Komnas HAM) pada kuesioner mengenai pentingnya terdapat evaluasi terhadap Tim SDGs Komnas HAM termasuk adanya program kerja yang mendukung pelaksanaan TPB dan hak asasi manusia pada Komnas HAM secara lebih mendalam.<sup>156</sup> Tim SDGs Komnas HAM juga perlu memperkuat kinerjanya dengan pihak ketiga strategis mengingat hanya 20% yang mengetahui adanya Tim SDGs Komnas HAM berdasarkan kuesioner yang ditanyakan pada peserta FGD Eksternal Komnas HAM.

Terkait dengan kolaborasi, dari perspektif internal Komnas HAM, misalnya Asri Oktavianty Wahono menyatakan Komnas HAM perlu aktif menjemput bola untuk melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait TPB.<sup>157</sup> Dari aspek eksternal, fakta bahwa hanya 30% dari responden yang mengetahui kegiatan kolaborasi Komnas HAM dengan pihak ketiga berdasarkan hasil kuesioner merupakan suatu tanda bahwa memang kolaborasi Komnas HAM dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya: Kementerian PPN / Bappenas), instansi pelaksana lainnya pada Perpres 59/2017, serta pihak lain yang terkait perlu ditingkatkan dan dipromosikan secara lebih baik.<sup>158</sup> Secara spesifik, Indriana Nugraheni

<sup>156</sup> Dielaborasi juga oleh Asri Oktavianty Wahono pada: FGD Internal Komnas HAM (n. 7).

<sup>157</sup> Ibid.

<sup>158</sup> Lihat: (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran; dan (2) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 89 Ayat (1) Huruf f, Ayat (2) Huruf e, dan Pasal 103. Lihat juga: Pasal 102.

(Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals / Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) menyampaikan perlunya Komnas HAM melakukan koordinasi secara lebih mendalam dengan Kementerian PPN / Bappenas.<sup>159</sup> Melalui kolaborasi ini diharapkan semua pihak bergotong-royong untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab terpenuhinya hak asasi manusia di Indonesia sekaligus mendukung pencapaian TPB di Indonesia.<sup>160</sup> Kolaborasi dengan mitra asing seperti UNESCO dan DIHR di atas juga akan baik sekali apabila ditingkatkan terutama terkait penguatan internal Komnas HAM.

Hanya 10% dari responden dari FGD Eksternal Komnas HAM yang mengetahui Komnas HAM sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik, GANHRI. Dari internal, menjawab pertanyaan kuesioner, Sri Nur Fathya (Sub Koordinator Bidang kerja Sama Antar Lembaga) juga memberikan saran agar Komnas HAM memperkuat perannya sebagai Koordinator TPB untuk Asia Pasifik, GANHRI. Komnas HAM sebetulnya dapat mengenalkan dan mengembangkan kualitas *web-based tool* kepada dan bersama dengan NHRI lain di Asia Pasifik.

*Web-based tool* TPB dan indikator hak asasi manusia berpotensi menjadi alat perekat yang dapat membantu Komnas HAM dan pemerintah dalam mencapai TPB dengan menjalankan aspek hak asasi manusia. Sangat disayangkan hasil survei pada FGD Eksternal Komnas HAM menyatakan hanya 20% yang mengetahui dan/atau memanfaatkan *web-based tool* tersebut. Secara internal, Komnas HAM telah membahas mengenai *web-based tool* perlu diperkuat dengan penambahan indikator hak asasi manusia pada tujuan-tujuan pada TPB lain yang belum dibuat.<sup>161</sup> Dari pihak eksternal Komnas HAM, misalnya, Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Indriana Nugraheni mengusulkan sejumlah saran untuk penguatan *web-based tool* seperti pencapaian yang sudah diperoleh.<sup>162</sup> Indriana Nugraheni juga menyampaikan antara lain mengenai standar teknis indikator yang dapat diukur.<sup>163</sup>

Selain itu perlu juga indikator hak asasi manusia dikaitkan dengan produk hukum dan kebijakan terkait, salah satu yang dapat dimasukkan adalah hasil identifikasi kaitan hak pada UU 39/1999 dengan tujuan pada TPB yang telah disampaikan pada Bab 2 penelitian ini. Komnas HAM perlu mengenalkan *web-based tool* indikator hak asasi manusia kepada instansi lain dan publik serta membuat indikator tersebut sebagai pedoman untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, untuk memperkuat posisi indikator hak asasi manusia tersebut dalam hukum Indonesia, baiknya indikator tersebut dapat diakui dalam peraturan presiden mendatang mengenai TPB atau paling tidak pada tingkat peraturan Komnas HAM.

<sup>159</sup> FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

<sup>160</sup> Lihat: (1) UU 39/1999 (n. 9), Pasal 8; dan (2) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran.

<sup>161</sup> Lihat: MDH, “Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti” (n. 111).

<sup>162</sup> (1) Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mengenai “Penyampaian Respon Focus Group Discussion “Dampak Pandemi COVID-19 dalam Pencapaian SDGs” (28 Januari 2021); (2) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (29 Januari 2021); dan (3) FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

<sup>163</sup> (1) Ibid, Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs; dan (2) Ibid., FGD Eksternal Komnas HAM. Lihat juga: (1) “Tier Classification for Global SDG Indicators: As of 28 December 2020”, United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021, [https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators\\_28%20Dec%202020\\_web.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf); dan (2) “SDG Indicators: Metadata Repository” United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021, <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>.

## 4. PENGUATAN POSISI DAN PERAN KOMNAS HAM: PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI AWAL

Kementerian PPN / Bappenas memiliki peran penting dan strategis dalam merencanakan dan memastikan TPB dapat tercapai.<sup>164</sup> Dalam Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Menteri PPN / Kepala Bappenas merupakan Koordinator Pelaksana dan juga Anggota Dewan Pengarah pada tim tersebut.<sup>165</sup> Sedangkan **Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN / Bappenas** menduduki posisi sebagai Ketua Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Nasional.<sup>166</sup> Selain itu, Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berada di Kementerian PPN / Bappenas dan berada di bawah kepemimpinan dari Ketua Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Nasional.<sup>167</sup> Salah satu peran strategis dari Menteri PPN / Kepala Bappenas berdasarkan Perpres 59/2017 adalah perannya sebagai pihak yang menerima laporan tahunan implementasi TPB mulai dari tingkat daerah dan tingkat nasional yang diberikan oleh gubernur, menteri, dan kepala lembaga (termasuk oleh Ketua Komnas HAM).<sup>168</sup> Selanjutnya, Menteri PPN / Kepala Bappenas akan memberikan laporan TPB secara keseluruhan kepada Presiden.<sup>169</sup>

Komnas HAM memiliki dasar kuat untuk mendukung pencapaian TPB pada seluruh tujuan. Pada penelitian ini khususnya pada Bab 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan pada TPB dapat dikaitkan dengan hak-hak yang ada pada UU 39/1999. Selain itu, secara praktis,

<sup>164</sup> (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Pasal 4-18 dan 20-21; dan lihat secara umum: (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 26 April 2018, diundangkan 2 Mei 2018) (selanjutnya: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018); serta (3) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 (ditetapkan 16 November 2018) (selanjutnya: Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018).

<sup>165</sup> (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 8-9; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 6; dan (3) Ibid., Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018, Lampiran (Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019).

<sup>166</sup> (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 10; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, lihat misalnya: Pasal 4 dan Pasal 7; dan (3) Ibid., Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.

<sup>167</sup> (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 13; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, lihat misalnya: Pasal 11-13; dan (3) Ibid., Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.

<sup>168</sup> (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 17 Ayat (1)-(2); dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 27. Berdasarkan *Focus Group Discussion* pada tanggal 26 Januari 2021 bersama dengan Komnas HAM dijelaskan oleh Sandrayati Moniaga dan Mimin Dwi Hartono sepengetahuan mereka tidak ada laporan secara khusus yang diberikan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas terkait TPB, namun Sandrayati Moniaga pernah diwawancara oleh perwakilan Bappenas terkait dengan Tujuan 16 dan Mimin Dwi Hartono pernah berpartisipasi dalam menghadiri undangan Bappenas terkait dengan konsultasi publik mengenai TPB, sumber: FGD Internal Komnas HAM. Diani Sadiawati dan Indriana Nugraheni juga menyampaikan Komnas HAM turut memberikan kontribusi dalam pembuatan Rencana Aksi Nasional TPB 2017-2019, lihat: (1) Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) (n. 162), 3; dan (2) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (n. 162), 4.

<sup>169</sup> (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 17 Ayat (3); dan Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Pasal 27.



seperti yang dijelaskan pada Bab 3 penelitian ini, juga telah dibuktikan bahwa Komnas HAM sudah melaksanakan kegiatan TPB dan hak asasi manusia secara eksplisit melebihi dan tidak terbatas pada Tujuan 5 dan 16 saja dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi Komnas HAM—walaupun banyak perbaikan yang perlu dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh tim peneliti dan oleh berbagai pihak.

Namun demikian, pada Perpres 59/2017,<sup>170</sup> Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018), dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 (selanjutnya: Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018) peran Komnas HAM dalam pencapaian belum diakomodir secara maksimal.<sup>170</sup> Seperti yang telah disampaikan pada Bab 1, Perpres 59/2017 hanya menaruh Komnas HAM sebagai instansi pelaksana pada Tujuan 5 dan 16 saja.<sup>171</sup> Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 merupakan peraturan turunan dari Perpres 59/2017.<sup>172</sup> Dalam Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 dibahas lebih spesifik sampai kepada indikator TPB, bukan hanya tujuan dan sasaran TPB saja.<sup>173</sup> Pada Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 ini, Komnas HAM ditempatkan sebagai sumber data untuk Indikator 10.3.1.(b) dan Indikator 16.10.1.(a) mengenai total pengaduan kasus hak asasi manusia serta Indikator 16.a.1. mengenai peningkatan kualitas kelembagaan Komnas HAM.<sup>174</sup> Pada Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Komnas HAM juga menjadi instansi pelaksana pada Indikator 5.2.2.(a) Program 2 Kegiatan 1.1.-1.3. mengenai mekanisme sistem manajemen pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan, Indikator 10.3.1(b) Program 1 Kegiatan 1.1.-1.3. mengenai mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran terhadap komunitas terpinggirkan, Indikator 16.10.1.(a) Program 1 Kegiatan 1.1.-1.5. mengenai penanganan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM, dan Indikator 16.a.1. Program 1 Kegiatan 1-6 (1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 4.3., 5.1., dan 6.1.-6.2.) mengenai peningkatan kualitas kelembagaan Komnas HAM.<sup>175</sup>

Dapat terlihat Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 konsisten menjadikan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana pada indikator yang terkait dengan Sasaran 5.2. dan Sasaran 16.10., namun tidak memberikan peran pada Sasaran 16.1. dan 16.3. padahal di Perpres 59/2017 Komnas HAM menjadi instansi pelaksana pada sasaran tersebut.<sup>176</sup>

<sup>170</sup> (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 30, 77, 79-80, dan 90; (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, Lampiran II (129, 210, dan 254-255), Anak Lampiran I (448-449), Anak Lampiran II (851-852), dan Anak Lampiran III (1319 dan 1324-1325); dan (3) Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Lampiran, 49.

<sup>171</sup> Ibid., Perpres 59/2017, Lampiran 30, 77, 79-80, dan 90.

<sup>172</sup> Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Menimbang.

<sup>173</sup> Lihat secara umum: *ibid.*

<sup>174</sup> Ibid., Lampiran II (129, 210, dan 254-255). Lihat: footnote nomor 71 dan 83.

<sup>175</sup> Ibid., Anak Lampiran I (448-449), Anak Lampiran II (851-852), dan Anak Lampiran III (1319 dan 1324-1325). Lihat: footnote nomor 49, 71, dan 83.

<sup>176</sup> Bandingkan: (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 30, 77, 79-80, dan 90; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Anak Lampiran I (448-449) dan Anak Lampiran III (1319).

Namun demikian, dapat terlihat Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 menambahkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana pada indikator yang terkait dengan Sasaran 10.3. dan Sasaran 16.a. padahal Komnas HAM tidak menjadi instansi pelaksana pada dua sasaran tersebut dalam Perpres 59/2017.<sup>177</sup>

Komnas HAM juga ditempatkan sebagai institusi yang menyediakan data pada sasaran yang berbeda dengan posisi Komnas HAM sebagai instansi pelaksana di Perpres 59/2017, yaitu pada indikator yang terkait dengan Sasaran 10.3. dan 16.a.1.<sup>178</sup> Indikator pada sasaran selain yang terkait dengan Sasaran 16.10 dilewatkan pada Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 ini.<sup>179</sup> Sedangkan pada Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018, Komnas HAM hanya dilibatkan pada Sub Kelompok Kerja Tujuan 16.<sup>180</sup> Komnas HAM tidak masuk dalam keanggotaan pada paling tidak di Tujuan 5 di mana Perpres 59/2017 memasukkan Komnas HAM sebagai instansi pelaksana.<sup>181</sup>

Penting untuk disampaikan bahwa sebetulnya Perpres 59/2017 dan Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 harus segera diperbarui. Alasannya sangat vital, yaitu Perpres 59/2017 dan Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 membahas implementasi TPB dalam kaitannya dengan integrasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (selanjutnya: RPJMN 2015-2019) padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (selanjutnya: RPJMN 2020-2024) telah diberlakukan sehingga lebih tepat apabila TPB Indonesia dikaitkan pada RPJMN 2020-2024 bukan pada RPJMN 2015-2019.<sup>182</sup> Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 juga perlu segera diperbarui dikarenakan kepmen tersebut hanya mengatur susunan keanggotaan dari tim pelaksana, kelompok kerja serta tim pakar khusus untuk periode 2017-2019 saja—padahal saat penelitian ini dikerjakan sudah tahun 2021.<sup>183</sup>

Pada suatu acara *webinar* pada bulan Desember 2020, perwakilan dari Kementerian PPN / Kepala Bappenas, Diani Sadiawati, menyatakan Bappenas telah mengaitkan TPB dengan RPJMN 2020-2024.<sup>184</sup> Indriana Nugraheni pada FGD Eksternal Komnas HAM dan berdasarkan pernyataan tertulis menanggapi pertanyaan kunci FGD Eksternal Komnas HAM memberikan

<sup>177</sup> Bandingkan: (1) Ibid., Perpres 59/2017; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Anak Lampiran II (851-852) dan Anak Lampiran III (1324-1325).

<sup>178</sup> Bandingkan: (1) Ibid., Perpres 59/2017; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Lampiran II (210 dan 255).

<sup>179</sup> Bandingkan: (1) Ibid., Perpres 59/2017; dan (2) Ibid., Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), Lampiran II (254).

<sup>180</sup> Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Lampiran, 49.

<sup>181</sup> Bandingkan: (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Lampiran, 30, 77, 79-80, dan 90; dan (2) Ibid.

<sup>182</sup> (1) Ibid., Perpres 59/2017, Pasal 2 dan Lampiran, lihat juga Pasal 16; (2) Lihat secara umum: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (ditetapkan 17 Januari 2020, diundangkan 20 Januari 2020) (selanjutnya: Perpres 18/2020).

<sup>183</sup> Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Lampiran.

<sup>184</sup> (1) Expert Staff to the Minister on Institutional Interrelation Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency / Head of SDGs Pillar on Law and Governance, "Covid-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs" (Presentasi PowerPoint pada Webinar Side Event 3 Festival HAM 2020 dengan tema "NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic", 17 [16] Desember 2020); dan (2) Komnas HAM, *Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic* (n. 134).

informasi bahwa Perpres 59/2017 dan juga Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018 dalam proses revisi.<sup>185</sup> Selain perpres dan kepmen tersebut tentunya Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 perlu juga disesuaikan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah revisi peraturan dan keputusan di atas sebetulnya dapat menjadi pintu masuk untuk penguatan aspek hak asasi manusia dalam pencapaian TPB yang dapat dijalankan oleh Komnas HAM. Perlu digarisbawahi, perwakilan Kementerian PPN / Bappenas pun sebetulnya mengakui bahwa Komnas HAM dapat berperan di seluruh bagian TPB bukan hanya terbatas pada Tujuan 16.<sup>186</sup> Integrasi pelaksanaan TPB pada kegiatan Komnas HAM juga telah didorong oleh perwakilan Kementerian PPN / Bappenas.<sup>187</sup> Diani Sadiawati dan Indriana Nugraheni dalam pernyataan tertulis untuk kepentingan FGD Eksternal Komnas HAM menyampaikan perlunya Komnas HAM untuk terlibat di semua tujuan.<sup>188</sup> Namun pendekatan terlibat pada semua tujuan yang dijelaskan oleh Diani Sadiawati dan Indriana Nugraheni lebih kepada optimalisasi peran Komnas HAM pada Tujuan 16 yang dapat menjadi pendorong terlaksananya tujuan-tujuan lain pada TPB.<sup>189</sup> Beka Ulung Hapsara mengingatkan sebetulnya hak asasi manusia lebih besar cakupannya dari persoalan hukum dan juga mengenai keadilan. Namun demikian penting juga untuk diketahui bahwa pada FGD Eksternal Komnas HAM, Indriana Nugraheni menyatakan keterbukaannya apabila Komnas HAM diposisikan secara formal di semua tujuan namun dengan sejumlah catatan.<sup>190</sup>

Pada FGD Eksternal Komnas HAM ditanyakan kepada responden melalui kuesioner apakah menurut mereka Komnas HAM perlu terlibat aktif dalam rangka mencapai seluruh tujuan TPB dengan mengaitkannya pada hak asasi manusia. Dari sepuluh responden yang mengisi kuesioner sembilan responden menjawab ya (90%), dan hanya satu yang menjawab tidak (10%). Responden yang menjawab tidak adalah Theresia Iswarini (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) yang menyatakan pada intinya hal tersebut bukan merupakan wilayah Komnas HAM dan lebih mengarahkan yang bertanggung jawab terhadap TPB adalah pemerintah—walaupun Theresia Iswarini juga menyatakan idealnya Komnas HAM berada dalam keadaan untuk terlibat pada seluruh tujuan pada TPB.<sup>191</sup> Selain itu dipertanyakan juga oleh Theresia Iswarini mengenai kesanggupan Komnas HAM jika pun terlibat pada seluruh Tujuan TPB.<sup>192</sup>

<sup>185</sup> (1) FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8); dan (2) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (n. 162).

<sup>186</sup> (1) “Laporan Tahunan Komnas HAM 2019” (n. 88), 95; dan (2) MDH, “Sharing Pengetahuan SDGs dan HAM”, Komnas HAM, dipublikasi tanggal 28 Februari 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019./2/28/747/sharing-pengetahuan-sdgs-dan-ham.html>.

<sup>187</sup> MDH, “Anggaran Komnas HAM Semestinya Ditambah”, Komnas HAM, dipublikasi tanggal 2 Mei 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/2/527/anggaran-komnas-ham-semestinya-ditambah.html>.

<sup>188</sup> (1) Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) (n. 162); dan (2) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (n. 162).

<sup>189</sup> (1) Ibid; dan (2) FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

<sup>190</sup> FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

<sup>191</sup> Ibid.

<sup>192</sup> Ibid.

## PENELITIAN

Mengenai persoalan sanggup atau tidaknya Komnas HAM juga disampaikan oleh Indriana Nugraheni yang menyatakan apabila Komnas HAM dimasukkan pada semua tujuan, maka Komnas HAM juga harus siap untuk melaksanakan apa akibatnya, misalnya untuk menjalankan program dari tujuan-tujuan tersebut.<sup>193</sup> Indriana Nugraheni juga menekankan persoalannya pentingnya penguatan internal Komnas HAM terhadap TPB dan hak asasi manusia.<sup>194</sup> Muhamad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyampaikan hal yang hampir serupa di mana Komnas HAM perlu mengukur diri mengenai kesanggupan apabila menangani semua tujuan TPB dan mengingatkan kembali untuk berpatokan pada rencana strategis.<sup>195</sup>

Wahyu Susilo dari Migrant CARE menyampaikan hal menarik yaitu berdasarkan pengalaman yang bersangkutan mengurus persoalan TPB pada praktiknya aspek hak asasi manusia adalah suatu yang bukan menjadi prioritas ketika membahas tujuan-tujuan tertentu di TPB, misalnya untuk hal yang terkait dengan maritim.<sup>196</sup> Wahyu Susilo menyatakan Komnas HAM dapat terlibat pada kekosongan ini dengan memberikan bantuan teknis.<sup>197</sup> Keterlibatan Komnas HAM pada kekosongan hak asasi manusia tersebut juga didorong oleh Shevierra Danmadiyah dari ELSAM.<sup>198</sup>

Dari perspektif internal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menyampaikan bahwa Komnas HAM tidak bermaksud untuk mengajukan suatu peran.<sup>199</sup> Yang diinginkan oleh Komnas HAM menurut Sandrayati Moniaga adalah pentingnya Bappenas memahami pekerjaan Komnas HAM apabila dikaitkan dengan TPB.<sup>200</sup> Sandrayati Moniaga juga menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan komunikasi dengan Bappenas terkait hal ini.<sup>201</sup> Pemahaman mengenai hal pekerjaan Komnas HAM akan membantu pemerintah dalam menempatkan Komnas HAM di posisi yang tepat dan tentunya ini akan memperkuat pelaksanaan TPB berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Beka Ulung Hapsara juga menyatakan mengenai situasi di mana Komnas HAM belum terlalu dilibatkan oleh kementerian atau lembaga lain dalam pelaksanaan TPB.<sup>202</sup> Beka Ulung Hapsara juga menyampaikan bahwa Bappenas belum melihat secara utuh peran Komnas HAM yang memiliki jangkauan luas dari aspek hak asasi manusia terhadap TPB.<sup>203</sup> Hairansyah (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi Komnas HAM) menyetujui pernyataan Beka Ulung Hapsara mengenai luasnya hak asasi manusia yang dapat dikaitkan dengan TPB.<sup>204</sup> Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan

---

<sup>193</sup> Ibid.

<sup>194</sup> (1) Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (n. 162); dan (2) FGD Eksternal Komnas HAM (n. 8).

<sup>195</sup> Ibid.

<sup>196</sup> Ibid.

<sup>197</sup> Ibid.

<sup>198</sup> Ibid.

<sup>199</sup> FGD Internal Komnas HAM (n. 7).

<sup>200</sup> Ibid.

<sup>201</sup> Ibid.

<sup>202</sup> Ibid.

<sup>203</sup> Ibid.

<sup>204</sup> Ibid.

Penelitian Komnas HAM) juga menyinggung mengenai kewenangan Komnas HAM yang besar namun belum dilibatkan peran yang lebih luas terkait dengan TPB.<sup>205</sup>

Kekhawatiran apakah Komnas HAM sanggup mendukung pencapaian seluruh tujuan pada TPB disampaikan oleh Kurniasari Novita Dewi.<sup>206</sup> Asri Oktavianty Wahono, Kurniasari Novita Dewi, dan Nur Afifa Fauzia (Sekretaris Tim SDGs Komnas HAM) mengenai belum membuminya TPB dalam internal Komnas HAM.<sup>207</sup>

Walaupun Komnas HAM didukung secara tidak langsung oleh UU 39/1999 dalam hal terwujudnya TPB, namun demikian tidak dapat dipungkiri peraturan dan keputusan mengenai TPB menjadi produk hukum yang sangat strategis dalam memaksimalkan peran Komnas HAM dalam pencapaian TPB secara teknis implementasi. Untuk memaksimalkan potensi Komnas HAM dalam pencapaian TPB, berdasarkan penelitian ini idealnya memang Komnas HAM perlu dimasukkan pada peraturan dan keputusan yang akan direvisi di atas. Masuknya Komnas HAM dalam peraturan dan keputusan tersebut pada intinya perlu fokus pada fungsi yang akan dijalankan oleh Komnas HAM yaitu terutama dalam memastikan hak asasi manusia dapat dihormati pada seluruh tujuan TPB. Menurut Sandrayati Moniaga, Komnas HAM lebih tepat ditempatkan sebagai pengawas bukan sebagai instansi pelaksana. Memang betul, apabila namanya tetap dinamakan sebagai instansi pelaksana, maka ditakutkan akan memberikan berbagai tafsir mengenai peran Komnas HAM di luar dari fungsi pengawasan.

Peluang keterlibatan Komnas HAM sebagai instansi pengawas dan dalam keanggotaan yang bersifat mengawasi aspek hak asasi manusia pada Tim Koordinasi Nasional TPB perlu dilihat bukan sebagai beban tambahan bagi Komnas HAM maupun oleh pemerintah, namun hal ini perlu dilihat sebagai peluang mengintegrasikan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia secara sistematis dan tidak sporadis melalui sektor-sektor yang sangat strategis secara nasional.

Pengaitan antara hak asasi manusia, TPB, dan RPJMN disampaikan oleh Sandrayati Moniaga dan Asri Oktavianty Wahono.<sup>208</sup> Memang betul TPB terkait dengan RPJMN.<sup>209</sup> RPJMN terkait dengan anggaran.<sup>210</sup> Hadirnya Komnas HAM pada peraturan dan keputusan tersebut akan memperkuat anggaran hak asasi manusia Komnas HAM.<sup>211</sup> Selain itu Komnas HAM berpeluang untuk mendapatkan anggaran TPB dari sumber lainnya dalam konteks peraturan mengenai TPB di tingkat nasional yang dipayungi oleh peraturan presiden.<sup>212</sup> Hadirnya Komnas HAM dalam mendukung pemerintah dalam pencapaian TPB dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia merupakan hal penting mengingat TPB memiliki kaitan yang sangat erat dengan hak asasi manusia seperti yang disampaikan pada Bab 2.

---

<sup>205</sup> Ibid.

<sup>206</sup> Ibid.

<sup>207</sup> Ibid.

<sup>208</sup> Ibid.

<sup>209</sup> Ibid.

<sup>210</sup> Lihat: (1) Perpres 59/2017 (n. 1), Pasal 2 dan Lampiran, lihat juga Pasal 16; (2) Lihat secara umum: Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018 (n. 164), dan (3) Perpres 18/2020.

<sup>211</sup> Lihat: *ibid.*

<sup>212</sup> Lihat: *ibid.*, Perpres 59/2017, Pasal 19.

Sebagai pengingat, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, tidak semua sasaran relevan untuk Komnas HAM, namun semua tujuan relevan dengan Komnas HAM.

Perlu ditekankan semangat keterlibatan Komnas HAM harus sesuai dengan tujuan dan fungsi dari Komnas HAM dan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan tugas dan wewenangnya. Perpres, permen, kepmen, dan produk hukum dan kebijakan yang mengatur atau memuat TPB juga harus mengikuti hal tersebut dan tidak bertentangan dengan UU 39/1999. Komnas HAM tidak perlu mengerjakan yang bukan menjadi fungsi serta tugas dan wewenangnya. Salah satu hal strategis yang dapat dilakukan Komnas HAM dengan cepat adalah pendekatan analisis dokumen perencanaan kegiatan yang terkait dengan Tujuan 1-17 TPB dan memastikan perencanaan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Kegiatan lain dan pembahasan teknis mengenai kegiatan tersebut dapat dibahas secara lebih mendalam pada penelitian selanjutnya.

Hal penting yang perlu kita ingat bersama adalah pemerintah sebetulnya memiliki kepentingan tinggi dalam mendukung Komnas HAM untuk melaksanakan peran ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah merupakan penanggung jawab terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia.<sup>213</sup> Penguatan Komnas HAM yang terintegrasi formal pada TPB dan RPJMN diharapkan akan membantu pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia tersebut.

## REKOMENDASI AWAL

### Untuk Komnas HAM dan Pemerintah:

- Komnas HAM perlu segera melakukan komunikasi dengan Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional TPB dan juga dengan Menteri PPN / Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana Tim Koordinasi Nasional TPB mengenai penguatan posisi dan peran Komnas HAM.<sup>214</sup> Pemerintah perlu menyambut komunikasi tersebut dengan semangat memperkuat hak asasi manusia pada TPB dan mengoptimalkan tujuan, fungsi, serta tugas dan wewenang Komnas HAM yang diatur pada UU 39/1999.
- Pemerintah perlu memasukkan Komnas HAM sebagai pengawas hak asasi manusia untuk seluruh tujuan TPB pada peraturan serta keputusan baru yang akan menggantikan Perpres 59/2017, Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, dan Kepmen PPN / Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018.
- Komnas HAM perlu segera memperbaiki kapasitas internalnya dalam persoalan hak asasi manusia dan TPB sehingga dapat melaksanakan perannya dengan optimal baik apabila usulan pada poin kedua di atas diterima maupun tidak.

<sup>213</sup> Lihat catatan kaki nomor 160.

<sup>214</sup> Lihat: Perpres 59/2017 (n. 1), Pasal 9.

**Untuk DIHR:**

DIHR dapat membantu melakukan penguatan kapasitas internal Komnas HAM sesuai dengan poin tiga di atas dengan berbagai kegiatan. Misalnya dengan penguatan pengetahuan TPB dan hak asasi manusia berbasis standar internasional bagi internal Komnas HAM. Perencanaan kegiatan penguatan perlu dibuat secara sistematis demi memaksimalkan peran Komnas HAM pada TPB dan hak asasi manusia baik apabila Komnas HAM ditempatkan sebagai instansi pengawas maupun tidak. Kami sepenuhnya setuju dengan komentar Stidsen bahwa "capacity building followed by cooperation on specific products is more fruitful than capacity-building alone" [penguatan kapasitas yang diikuti kerja sama dalam produk spesifik akan lebih bermanfaat dibandingkan peningkatan kapasitas saja].

## DAFTAR PUSTAKA

### **Instrumen Internasional:**

United Nations General Assembly Resolution 70/1. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (diadopsi 25 September 2015).

United Nations General Assembly Resolution 71/313. Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/71/313 (diadopsi 6 Juli 2017).

The Mérida Declaration: The Role of National Human Rights Institutions in Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development (diadopsi 10 Oktober 2015).

### **Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan:**

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 (ditetapkan 16 November 2018).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 26 April 2018, diundangkan 2 Mei 2018)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (ditetapkan 17 Januari 2020, diundangkan 20 Januari 2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (disahkan 10 Mei 2012, diundangkan 10 Mei 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (disahkan 28 Oktober 2015, diundangkan 28 Oktober 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (disahkan 23 November 2000, diundangkan 23 November 2000).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disahkan 23 September 1999, diundangkan 23 September 1999).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (disahkan 10 November 2008, diundangkan 10 November 2008).

**Sumber Lain:**

“12th International Conference.” GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021. <https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/12IC/Pages/default.aspx>.

“A Brief History of GANHRI.” GANHRI, diakses tanggal 15 Januari 2021. <https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/History.aspx>

“Deklarasi Wonosobo dalam Festival HAM Indonesia 2018.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 15 November 2018. <https://komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/deklarasi-wonosobo-dalam-festival-ham-indonesia-2018.html>.

“Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights.” Asia-Pacific Forum on Sustainable Development, dipublikasi tanggal 29 Maret 2019. <https://www.unescap.org/apfsd/6/document/sidevents/Empowering%20the%20ost%20marginalize2nd%20suring%20Inclusiveness%20and%20Equality.pdf>.

“Pemantauan Workshop Pengarusutamaan HAM Dalam Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah HAM.” Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipublikasi tanggal 7 Juni 2015. <http://ham.go.id/pemantauan-workshop-pengarusutamaan-ham-dalam-pengembangan-wonosobo-sebagai-kabupaten-ramah-ham/>.

“SDG Indicators.” United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 28 Desember 2020. <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>.

“SDG Indicators: Metadata Repository.” United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021. <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>.

“Tier Classification for Global SDG Indicators: As of 28 December 2020.” United Nations (dikelola oleh United Nations Statistics Division), diakses tanggal 8 Januari 2021. [https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators\\_28%20Dec%202020\\_web.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf).

AAP/IW. “Komnas HAM Kawal Capaian SDGs pada Masa Pandemi COVID-19.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 23 Desember 2020. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/12/23/1635/komnas-ham-kawal-capaian-sdgs-pada-masa-pandemi-covid-19.html>.

Asmini, Yuli. “Forum Kota HAM Dunia dan Peran Penting Komnas HAM.” Komnas HAM, Dipublikasi tanggal 24 Oktober 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/24/651/forum-kota-ham-dunia-dan-peran-penting-komnas-ham.html>.

- Asmini, Yuli. "Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan." SUAR, No. 3 Tahun 2015.
- Asmini, Yuli. "Loklatih Human Rights Cities di Wonosobo." SUAR, No. 1 Tahun 2015.
- Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM. "Laporan Kinerja 2018."
- Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM. "Laporan Kinerja 2019."
- Expert Staff to the Minister on Institutional Interrelation Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency / Head of SDGs Pillar on Law and Governance. "Covid-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs." (Presentasi PowerPoint pada Webinar Side Event 3 Festival HAM 2020 dengan tema "NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic", 17 [16] Desember 2020).
- Fauzia, Nur Afifa. "Aspek Demografi Sebagai Salah Satu Pendekatan Pemantauan SDGs di Indonesia." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 1 April 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/4/1/776/aspek-demografi-sebagai-salahsatu-pendekatan-pemantauan-sdgs-di-indonesia.html>.
- Feri/IBN. "Integrasi HAM dalam Sustainable Development Goals." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 10 September 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/10/1145/integrasi-ham-dalam-sustainable-development-goals.html>.
- Focus Group Discussion* Internal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (26 Januari 2021).
- Focus Group Discussion* Eksternal Komnas HAM bersama dengan Tim Peneliti (29 Januari 2021).
- Hartono, Mimin Dwi. "Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan." Kompas.com, dipublikasi tanggal 12 Agustus 2017. <https://sains.kompas.com/read/2017/08/12/205030323/vaksinasi-dan-hak-anak-atas-kesehatan?page=all>.
- Komnas HAM Republik Indonesia. "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024."
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019."
- Komnas HAM. "Komnas HAM List of SDGs Activities [List of SDGs' Activities]."
- Komnas HAM. "Laporan dan Review Kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM 2019."
- Komnas HAM. "Laporan Kegiatan Tim Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM Tahun 2020."

- Komnas HAM. “Laporan Tahunan Komnas HAM 2017” (2017).
- Komnas HAM, INFID, ELSAM, dan Kemenkumham. “Siaran Pers Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia.”
- Komnas HAM. Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI’s Role and SDG’s Achievements During Covid-19 Pandemic. Youtube video, menit ke 52-53, diakses tanggal 30 Desember 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t\\_OtM&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t_OtM&feature=youtu.be).
- Komnas HAM, UNESCO, dan UNSDG. “Human Rights Based Development in Indonesia.” diakses tanggal 2 Januari 2021. <https://sdg.komnasham.go.id/en/sdgs/>.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. “Linking SDGs and Human Rights: Demography Aspects” (Final Report) (2019).
- MDH. “Anggaran Komnas HAM Semestinya Ditambah.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 2 Mei 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/2/527/anggaran-komnas-ham-semestinya-ditambah.html>.
- MDH. “Disiapkan, Perangkat Monitoring SDGs Berbasis Web.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 18 Oktober 2017. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/18/425/disiapkan-perangkat-monitoring-sdgs-berbasis-web.html>.
- MDH. “Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 Maret 2018. <https://www.komnas-ham.go.id/index.php/news/2018/3/20/1014/kerjasama-dengan-unesco-mendorongkebijakan-berbasis-bukti.html>.
- MDH. “Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 20 April 2017. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/6/12/351/tindak-lanjut-kerjasama-komnas-ham-unescoasiapasifik.html>.
- MDH. “Pendekatan HAM untuk Mencapai SDGs.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 30 Maret 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/30/511/pendekatan-ham-untuk-mencapai-sdgs.html>.
- MDH. “Sharing Pengetahuan SDGs dan HAM.” Komnas HAM, dipublikasi tanggal 28 Februari 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019./2/28/747/sharing-pengetahuan-sdgs-dan-ham.html>.
- Memorandum of Understanding (MOU) between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and the National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), with the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP) as an Official Observer on Statelessness Issues in Sabah (23 April 2019).
- Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (12

Juni 2017).

Office of the High Commissioner for Human Rights. "Summary Table on the Linkages Between the SDGs and Relevant International Human Rights Instruments." diakses tanggal 30 Desember 2020. [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG\\_HR\\_Table.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf).

Office of the High Commissioner for Human Rights. "Transforming Our World: Human Rights in the 2030 Agenda for Sustainable Development." Diakses tanggal 30 Desember 2020. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost2015.pdf>.

RO/OL-3. "GANHRI Anugerahi Penghargaan Tertinggi Kepada Komnas HAM 'Akreditasi A.'" [Mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com), dipublikasi tanggal 24 Februari 2018. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/146685/ganhri-anugerahi-penghargaan-tertinggi-kepada-komnas-ham-akreditasi-a>.

Sari, Eva Nila. "Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia." Komnas HAM, dipublikasi tanggal 13 November 2015. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/11/13/229/komnas-ham-ri-infid-elsam-dan-kemenkumham-ri-dorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.html>.

Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mengenai "Penyampaian Respon Focus Group Discussion "Dampak Pandemi COVID-19 dalam Pencapaian SDGs" (28 Januari 2021).

Pernyataan Tertulis dari Sekretariat Nasional TPB/SDGs (29 Januari 2021).

Tim Penyusun Laporan Kinerja Biro Renwakes Komnas HAM. "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama."

Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM. "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia LKIP Laporan Kinerja 2018" (2018).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015. "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" (2016).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016. "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016".

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" (2019).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" (2020).



# PRELIMINARY RESEARCH:

Strengthening the Position and  
the Roles of the National Commission  
on Human Rights in Supporting  
the Achievement of the Sustainable  
Development Goals in Indonesia

## 1. BACKGROUND

The role of the National Commission on Human Rights (hereinafter: NCHR) as an institution that plays a role in the implementation of the Sustainable Development Goals (hereinafter: SDGs) is still limited to the provisions under the President Regulation Number 59 of 2017 concerning the Implementation to Achieve the Sustainable Development Goals (hereinafter: President Regulation 59/2017).<sup>1</sup> The President Regulation 59/2017 only placed an institutional responsibility with the NCHR under Goals 5 (gender and women) and 16 (peace, justice, and institution)—and only for specific targets (Global Targets) under Goals 5 and 16.<sup>2</sup> Global Targets contained in Goal 5 are only limited to the eradication of violence against women.<sup>3</sup> Meanwhile, Global Targets contained in Goal 16 are only limited to the reduction of violence and death,<sup>4</sup> the sovereignty of law and justice,<sup>5</sup> and access to information and freedom.<sup>6</sup>

This research will mainly discuss the strengthening of the NCHR in the context of the SDGs and human rights. This research will provide explanations about the legal basis for the NCHR to implement the SDGs particularly by using the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights (hereinafter: Law 39/1999). This research will also provide explanations about what activities have been conducted by the NCHR in relation to the SDGs, especially for activities that are explicitly designated for the SDGs. Furthermore, there will be an elaboration in regards to how impactful the activities have been, in particular, activities with explicit character towards the SDGs and human rights. In addition, this research will also discuss the important roles of human rights in implementing the SDGs as well as how the NCHR should position itself in supporting the government, and how the government should include the NCHR in determining the course of the achievement of SDGs in Indonesia, considering that the achievement of SDGs is the responsibility of the government. This research is a preliminary stage to the creation of a more detailed and technical research to strengthen the NCHR in relation to human rights and the SDGs.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [President Regulation Number 59 of 2017 concerning the Implementation to Achieve the Sustainable Development Goals] (stipulated on 4 July 2017, promulgated on 10 July 2017) (hereinafter: President Regulation 59/2017), Annex, 29-30, 77, 79-80, and 90.

<sup>2</sup> Ibid. See also: United Nations General Assembly Resolution 70/1, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (adopted on 25 September 2015) (hereinafter: UNGA Res. 70/1), 18 (Goal 5, Target 5.2) and 25 (Goal 16, Target 16.1. and Target 16.3.) - 26 (Goal 16, Target 16.10.).

<sup>3</sup> Ibid., President Regulation 59/2017, Annex, 30. See also: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5, Target 5.2.).

<sup>4</sup> Ibid., President Regulation 59/2017, Annex, 77. See also: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 25 (Goal 16, Target 16.1.).

<sup>5</sup> Ibid., President Regulation 59/2017, Annex, 79-80. See also: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 25 (Goal 16, Target 16.3.).

<sup>6</sup> Ibid., President Regulation 59/2017, Annex, 90. See also: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 26 (Goal 16, Target 16.10.).

The process of this research also includes the implementation of two Focus Group Discussions (FGD). The first FGD was held on 26 January 2021, where the FGD participants were consisted of three commissioners of the NCHR and sixteen staffs of the NCHR (hereinafter: NCHR Internal FGD).<sup>7</sup> The second FGD was held on 29 January 2021 and was attended by the participants from external parties aside of the NCHR (hereinafter: NCHR External FGD), namely (sequenced in alphabetical order): Indonesia Center for Law and Policy Studies, Indonesian Legal Aid Foundation, Institute for Policy Research and Advocacy, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Migrant CARE, National Commission on Violence Against Women, National Secretariat of the Sustainable Development Goals / Secretariat for the National Coordination Team of the Sustainable Development Goals, Self Reliant Development Foundation, and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter: UNESCO).<sup>8</sup>

## 2. LEGAL BASIS

The NCHR has a broad range of objectives in relation to human rights.<sup>9</sup> First, in relation to “developing condition” which supports the implementation of human rights in Indonesia.<sup>10</sup> Second, in relation to strengthening the “protection and enforcement of human rights” in “various aspects of life” in Indonesia.<sup>11</sup> The two purposes above could be used as a general basis on how the NCHR needs to be recognized by the government in order to obtain more roles in implementing the SDGs in Indonesia.

Within the international context, it is important to note that the Office of the High Commissioner for Human Rights (hereinafter: OHCHR) has identified, although only for the purpose of depiction, the connection between the SDGs and the relevant articles in the treaties related to human rights, to which Indonesia also has legally bound itself to a number of those treaties and also products of policies with soft law characteristics (in which

**” The international instrument mentioned above will not be discussed in a specific manner, since the identification of connection between the SDGs and human rights has been done by the OHCHR.**

<sup>7</sup> NCHR Internal Focus Group Discussion with the Researcher Team (26 January 2021) (hereinafter: NCHR Internal FGD).

<sup>8</sup> NCHR External Focus Group Discussion with the Researcher Team (29 January 2021). (hereinafter: NCHR External FGD).

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights] (authorised on 23 September 1999, promulgated on 23 September 1999) (hereinafter the Law 39/1999), Article 75.

<sup>10</sup> Ibid., Article 75 Letter a.

<sup>11</sup> Ibid., Article 75 Letter b.

to understand its bindingness to Indonesia, further analysis for each content is required).<sup>12</sup> The international instrument mentioned above will not be discussed in a specific manner, since the identification of connection between the SDGs and human rights has been done by the OHCHR. For each of the international instruments that legally binds Indonesia in the said identification made by the OHCHR, could indeed be used as a basis to support the expansion of roles of the NCHR in all goals in the SDGs.<sup>13</sup>

In the context of this research, the main focus of discussion lies in the Law 39/1999 particularly with regards to what human rights aspects are relevant to the 17 SDGs. The NCHR has a close connection with the rights in the Law 39/1999 since the NCHR and those rights are both regulated under the Law 39/1999.<sup>14</sup> Aside from the Law 39/1999, there are several other relevant products of national law where the NCHR is given specific roles, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2008 concerning Eradication of Discrimination against Race and Ethnicity (hereinafter Law 40/2008).<sup>15</sup> In the Law 40/2008, the NCHR is given the authority to supervise the eradication of acts of discrimination against race and ethnicity.<sup>16</sup> In general, articles related to the discrimination act in the Law 40/2008 are relevant with, for example, Target 10.2. in the SDGs.<sup>17</sup> Besides that, there is also the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Management where the NCHR is a part of the duties force in the event of national scale conflict.<sup>18</sup> Social conflict could be connected to, for example, the significant reduction of violence which would serve to contribute to the achievement of Target 16.1.<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Office of the High Commissioner for Human Rights, "Summary Table on the Linkages Between the SDGs and Relevant International Human Rights Instruments," accessed on 30 December 2020, [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG\\_HR\\_Table.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf) (first link: <https://www.ohchr.org/en/issues/SDGS/pages/the2030agenda.aspx>). See also: Office of the High Commissioner for Human Rights, "Transforming Our World: Human Rights in the 2030 Agenda for Sustainable Development" accessed on 30 December 2020, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost2015.pdf>. As a comparison on the relation between human rights and the SDGs in the context of international instrument, see also: Danish Institute for Human Rights, The Human Rights Guide to the SDGs, DIHR, accessed on 12 January 2021, <https://www.humanrights.dk/human-rights-guide-sdgs>. One of the treaties that has become a part of Indonesian law, for instance, the International Covenant on Civil and Political Rights, see: Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (authorised on 28 October 2015, promulgated on 28 October 2015).

<sup>13</sup> Law 39/1999 (n. 9), Considering Letter d, Article 7 along with the explanation, Article 67, Article 71, General Explanation. See also: Article 89 Paragraph (1) Letter a.

<sup>14</sup> See in general: *ibid.*, Law 39/1999.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis [Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2008 concerning the Eradication of Discrimination against Race and Ethnicity] (authorised on 10 November 2008, promulgated on 10 November 2008) (hereinafter: Law 40/2008), Article 8 and its explanation and Article 10 Letter b and its explanation.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Law 40/2008, Article 8 and its explanation, See also: Article 10 Letter b and its explanation.

<sup>17</sup> (1) *Ibid.*, Law 40/2008, Article 4; and (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 21 (Goal 10, Target 10.2.).

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial [Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2012 concerning the Social Conflict Management] (authorised on 10 May 2012, promulgated on 10 May 2012) (hereinafter: Law 7/2012), Article 49 Paragraphs (1)-(2) and Article 45 Letter c.

<sup>19</sup> (1) *Ibid.*, Law 7/2012, Article 12 Letter (a) and its explanation; and (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 25, (Goal 16, Target 16.1.).



Outside of Goal 16, matters related to the anti-violence against women and children could also be relevant to the conflict addressed by Target 5.2.<sup>20</sup> Besides that, there is also the Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court (hereinafter: Law 26/2000) that gives roles to the NCHR as the investigator for grave human rights violation cases.<sup>21</sup> The roles of the NCHR in the said Law 26/2000 could be connected with Target 16.3. which entails provisions on the access to justice and legal certainty.<sup>22</sup>

The 2030 Agenda contain 17 SDGs, followed by targets and indicators attached to each of those goals.<sup>23</sup> All SDGs are fully contained in the President Regulation 59/2017.<sup>24</sup> However, not all targets under the United Nations General Assembly Resolutions 70/1 of 2015 (hereinafter: UNGA Res. 70/1) related to sustainable development are included in the global targets contained in the President Regulation 59/2017.<sup>25</sup> It is necessary to note that in the UNGA Res. 70/1 (outside of the contents with regards to the goals and targets of the SDGs), human rights elements have become an important part of the SDGs implementation.<sup>26</sup> Another instrument that is necessary to be pointed out is the Mérida Declaration which was made by the Global Alliance of National Human Rights Institutions (hereinafter: GANHRI) and has contributed as consolidating element to the relation between human rights and the 17 SDGs since its commencement, as of 2015.<sup>27</sup>

Goal 1 in the SDGs focuses on the matters of poverty.<sup>28</sup> SDG 1, particularly Targets 1.1. and 1.2. related to the reduction of poverty, is relevant to the right to life, the right to enhance living standard, and the right to adequate standard of living in the Law 39/1999.<sup>29</sup> The right to basic needs and the right to self-development are also related to Targets 1.1. and 1.2.<sup>30</sup> Target 1.3. on the social protection system could be related to the collective right of self-development (individuals/groups have the rights to protect their self-development

<sup>20</sup> (1) Ibid., Law 7/2012; and (2) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18, (Goal 5, Target 5.2.).

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [Law of the Republic of Indonesia Number 26 Year 2000 concerning the Human Rights Court] (authorised on 23 November 2000, promulgated on 23 November 2000) (hereinafter: Law 26/2000), Article 18, Article 20, and Article 25.

<sup>22</sup> (1) Ibid., Law 26/2000; and (2) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 25, (Goal 16, Target 16.3.).

<sup>23</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 15-27. For the list of indicators from the SDGs target, see: (1) United Nations General Assembly Resolution 71/313, Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/71/313 (adopted on 6 July 2017); and (2) "SDG Indicators," United Nations (managed by the United Nations Statistics Division), accessed on 28 December 2020, <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>.

<sup>24</sup> President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex.

<sup>25</sup> (1) UNGA Res. 70/1 (n. 2), 15-27; and (2) Ibid., President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex.

<sup>26</sup> See: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 1 (Preamble, Paragraph 3) and 3-4, 6, 8-9, 29, 31-32 (Declaration, Paragraph 3, Paragraph 8, Paragraph 10, Paragraph 19, Paragraph 20, Paragraph 29, Paragraph 35, Paragraph 67, and Paragraph 74 Letter (e)).

<sup>27</sup> See in general: The Mérida Declaration: The Role of National Human Rights Institutions in Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development (adopted on 10 October 2015). See also: "12<sup>th</sup> International Conference," GANHRI, accessed on 15 January 2021, <https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/12IC/Pages/default.aspx>.

<sup>28</sup> For more details, see: UNGA Res. 70/1 (n. 2), 18 (Goal 1, Targets 1.1.-1.5. and Targets 1.a.-1.b.). See also: President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex, 1-10.

<sup>29</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 15 (Goal 1, Targets 1.1.-1.2.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 4, Article 9 Paragraph (1), and Article 40.

<sup>30</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 11 and Article 15.

Goal 4 concerns on the matters of education.<sup>43</sup> Targets 4.1. and 4.2. concerning pre-school, primary school, and middle-school education are relevant to children's right to education.<sup>44</sup> Targets 4.5. and 4.a. are concerning, among others, access to education for children, it could be related with the special rights connected to the education for children with disabilities.<sup>45</sup> Targets 4.3.-4.4. and 4.6.-4.7. concerns the matters of education for men, women, and young people in general, this may be accommodated by the right to access to education.<sup>46</sup>

Goal 5 concerns on the matters of gender equality.<sup>47</sup> Target 5.1. concerning discrimination against women could be related to the rights to protection for pregnant women and children.<sup>48</sup> Target 5.2. concerning violence against women where in this regard, an example could be taken from women's trafficking relates with the prohibition of women's and children's trafficking in the Law 39/1999.<sup>49</sup> Target 5.3. concerning violence against children such as early marriage, which in general correlates to the articles regulating that the prospective wife shall have the freedom to get married consensually.<sup>50</sup> Other violence in Target 5.3. is also related to the right of children to be protected against violence.<sup>51</sup> In general, Target 5.3. is related to the right to security.<sup>52</sup> Target 5.6. concerning sexual and reproductive health could be related to the right of women to be protected from threats against their reproductive ability in the working environment.<sup>53</sup> Target 5.a. which among others discusses women's right to ownership is connected with the right to ownership in the Law 39/1999.<sup>54</sup> Target 5.c. concerning the reinforcement of gender equalities policies and legislation is relevant with the regulation of women's right to be involved in the public and private sectors.<sup>55</sup>

<sup>43</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Goal 4).

<sup>44</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Goal 4, Targets 4.1.-4.2.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 60.

<sup>45</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Goal 4, Targets 4.5.-4.a.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 54 and its explanation.\

<sup>46</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 17 (Goal 4, Targets 4.3.-4.4. and Targets 4.6.-4.7.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Articles 12-13 and concerning women may be seen in Article 48.

<sup>47</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5).

<sup>48</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5, Target 5.1.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 5 and its explanation.

<sup>49</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5, Target 5.2.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 20 Paragraph (2) and Article 65. See also: footnote number 3.

<sup>50</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5, Target 5.3.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 10 Paragraph (2) and its explanation.

<sup>51</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 58 and Article 66 Paragraph (1).

<sup>52</sup> (1) Ibid., UNGA Res.70/1; and (2) Ibid, Law 39/1999, Articles 30 and 33.

<sup>53</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5, Target 5.6.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 49 Paragraph (2) and its explanation and Paragraph (3).

<sup>54</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5, Target 5.a.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 36 and its explanation.

<sup>55</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18 (Goal 5, Target 5.c.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 46 and its explanation, Article 49, and Article 38 Paragraphs (3) and (4).

Goal 6 concerns on the matters of water and sanitation.<sup>56</sup> In general, the targets in Goal 6 that discusses the water and sanitation quality management are relevant to the rights to an adequate and healthy environment.<sup>57</sup>

Goal 7 concerns on the matters of sustainable energy.<sup>58</sup> The targets in Goal 7 focusing on renewable energy and the reduction of fossil fuels could also be related to the rights to an adequate and healthy environment.<sup>59</sup>

Goal 8 focuses on sustainable economic growth and manpower.<sup>60</sup> Target 8.3. concerning the creation of decent employment as well as Targets 8.5.-8.6. and 8.b. concerning decent employment acquisition are all relevant with the rights to decent work.<sup>61</sup> Targets 8.6. and 8.b. which also discusses education, are also connected with the rights to education in general, or the children's right to education.<sup>62</sup> Target 8.7. which discusses, among others, forced labor, including forced child labor, human trafficking, and the creation of child soldiers, are all relevant to the prohibition of slave trafficking, the right to protection from dangerous works, and also the right not to be involved as soldiers in a war.<sup>63</sup> Target 8.8. related to the protection of migrant workers is also relevant with women's rights to obtain fair wages and protection at work, particularly related to women's reproductive health.<sup>64</sup> Target 8.4. concerning environmental degradation, is related to the right to a healthy environment.<sup>65</sup>

Goal 9 concerns matters of infrastructure.<sup>66</sup> Target 9.4. concerning clean and environment-friendly technologies in the infrastructures and industries is relevant to the right to a healthy environment.<sup>67</sup>

<sup>56</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 18-19 (Goal 6).

<sup>57</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 18-19 (Goal 6, Targets 6.1.-6.6. and Targets 6.a.-6.b.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 9 Paragraph (3).

<sup>58</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Goal 7).

<sup>59</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Goal 7, Target 7.2. and Targets 7.a.-7.b.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 9 Paragraph (3).

<sup>60</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Goal 8).

<sup>61</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Goal 8, Targets 8.3., 8.5.-8.6. and Target 8.b.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 38 and Article 49.

<sup>62</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19-20 (Goal 8, Target 8.6. and Target 8.b.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Articles 12-13 and Article 60.

<sup>63</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Goal 8, Target 8.7.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 20, Article 63, and Article 64.

<sup>64</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Goal 8, Target 8.8.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 38 Paragraphs (2)-(4) and Article 49 Paragraph (2) and its explanation and Paragraph (3).

<sup>65</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 19 (Goal 8, Target 8.4.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 9 Paragraph (3).

<sup>66</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 20-21 (Goal 9).

<sup>67</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 20 (Goal 9, Target 9.4.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 9 Paragraph (3).

Goal 10 focuses on inequality.<sup>68</sup> Target 10.2. concerning non-discriminatory empowerment and inclusion in social, economic, and political affairs,<sup>69</sup> is relevant to the freedom of politics and speech, the right to express one's opinion, the right to association and assembly, the right to establish political parties, and the right to be involved in the government.<sup>70</sup> Matters related to discrimination in Target 10.3. are also related to provisions under Law 39/1999 which was described in the context of Target 10.2.<sup>71</sup> Target 10.4. concerning policies in social protection could be related to the right to social security.<sup>72</sup>

Goal 11 focuses on the sustainable cities and settlement.<sup>73</sup> Targets 11.1.-11.4., 11.5.-11.7., and 11.a.-11.b. which generally intend to enhance settlement qualities by taking into consideration, among others, environmental aspects, are relevant towards the right to an adequate and healthy environment and the right to a place to live and an adequate standard of living.<sup>74</sup> Target 11.4. which also discusses the protection of cultural heritage is relevant for the protection of indigenous people's rights, including to their cultures.<sup>75</sup>

Goal 12 discusses sustainable consumption and production, Goal 13 concerns the matters of climate change, Goal 14 concerns the matters of marine conservation, and Goal 15 concerns the matters of protection of the terrestrial ecosystem.<sup>76</sup> All targets contained in Goals 12-15 are relevant for the right to an adequate and healthy environment in the Law 39/1999.<sup>77</sup>

Goal 16 concerns the matters of peace, justice, and strong institutions.<sup>78</sup> Target 16.1. concerning the reduction of violence and death due to violence is relevant for the right to

---

<sup>68</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Goal 10).

<sup>69</sup> For definition of "discrimination," see: Law 39/1999 (n. 9), Article 1 Number 3.

<sup>70</sup> (1) UNGA Res. 70/1, 21 (n. 9) (Goal 10, Target 10.2.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 17, Articles 23-25, Article 39 and its explanation, Articles 43-44, Part Ninth and its explanation, and Part Tenth and its explanation.

<sup>71</sup> Ibid. See also: *ibid.*, UNGA Res. 70/1, 21 (Goal 10, Target 10.3.).

<sup>72</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21 (Goal 10, Target 10.4.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 41 and its explanation.

<sup>73</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Goal 11).

<sup>74</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Goal 11, Targets 11.1.-11.4., Targets 11.5.-11.7., and Targets 11.a.-11.b.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 9 Paragraph (3) and Article 40.

<sup>75</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 21-22 (Goal 11, Target 11.4.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 6 and its explanation.

<sup>76</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 22-25 (Goals 12-15).

<sup>77</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 22-25 (Goal 12, Targets 12.1.-12.8. and Targets 12.a.-12.c.; Goal 13, Targets 13.1.-13.3. and Targets 13.a.-13.c.; Goal 14, Targets 14.1.-14.7. and Targets 14.a.-14.c.; and Goal 15, Targets 15.1.-15.9. and Targets 15.a.-15.c.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 9 Paragraph (3).

<sup>78</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 25-26 (Goal 16).

life, the right not to be tortured, and the right not to be killed.<sup>79</sup> Target 16.2. focusing on the violence against children is related to children's right to life, the right to legal protection against violence, the right to be protected from exploitation, and the right to not be tortured.<sup>80</sup> Target 16.9. concerning the legal identity of children is related to the rights to name and nationality.<sup>81</sup> Target 16.3. concerning legal certainty in national and international levels are relevant to legal remedies in the national and international level.<sup>82</sup> Target 16.10. concerning the access to public information is related to the right to information.<sup>83</sup> Targets 16.6 and 16.7. concerning participation in the decision making and strengthening of institution could be related to the right to express one's opinion towards the government.<sup>84</sup>

Goal 17 focuses on the collaboration in the implementation of sustainable development.<sup>85</sup> The NCHR could take a role in the data collection to monitor progress under the 2030 Agenda and the SDGs, from the human rights' perspective, as regulated under Target 17.18.<sup>86</sup> This data could be related to the right to information in the Law 39/1999.<sup>87</sup>

**” The 2030 Agenda contain 17 SDGs, followed by targets and indicators attached to each of those goals. All SDGs are fully contained in the President Regulation 59/2017. However, not all targets under the United Nations General Assembly Resolutions 70/1 of 2015 (hereinafter: UNGA Res. 70/1) related to sustainable development are included in the global targets contained in the President Regulation 59/2017.**

<sup>79</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Goal 16, Target 16.1.); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 4, Article 9 Paragraph (1) and its explanation, and Article 33 and its explanation. See also: footnote number 4.

<sup>80</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Goal 16, Target 16.2.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 53 Paragraph (1), Article 58 Paragraphs (1)-(2), and Articles 63-66.

<sup>81</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Goal 16, Target 16.9.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 53 Paragraph (2) and its explanation.

<sup>82</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 25 (Goal 16, Target 16.3.); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 7 and its explanation. See also: footnote number 5.

<sup>83</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Goal 16, Target 16.10); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 14 and Article 32. See also: (1) footnote number 6; and (2) Yuli Asmini, “Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan” [Rights to Information and Sustainable Development Agenda] SUAR, No. 3 of 2015, 46 (Column).

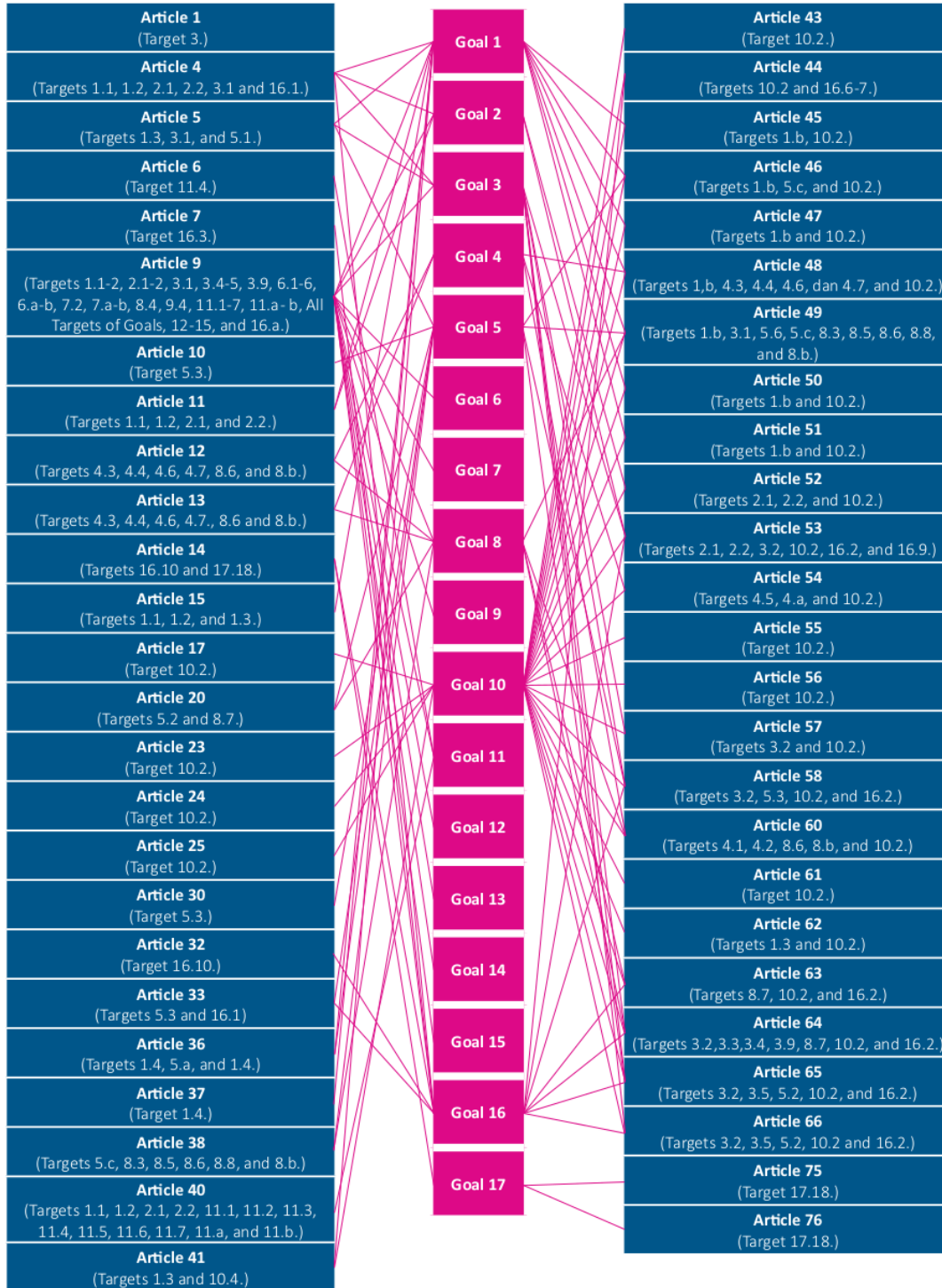
<sup>84</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Goal 16, Targets 16.6-16.7); and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 44.

<sup>85</sup> Ibid., UNGA Res. 70/1, 26-27 (Goal 17).

<sup>86</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1, 26 (Goal 17, Target 17.18); and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 75 and Article 76 Paragraph (1).

<sup>87</sup> (1) Ibid., UNGA Res. 70/1; and (2) Ibid., Law 39/1999, Article 14 Paragraph (2).

CONNECTION BETWEEN GOALS 1-17 WITH ARTICLES ON HUMAN RIGHTS IN THE LAW 39/1999:



### 3. THE ROLES OF THE NCHR IN ACHIEVING THE SDGs

It is important to note that in principle, the NCHR's activities that are not explicitly aimed to specifically achieve the SDGs, can still very much be connected with the SDGs. One way to identify that is to see the relation between articles in the Law 39/1999 and the goals and targets in the SDGs according to the UNGA Res. 70/1 as elaborated in the Chapter 2.

In general, the NCHR received 32,136 complaint files from 2015 to 2019.<sup>88</sup> However, not all of them are related to the violation of human rights.<sup>89</sup> For instance, around 15.8% of the complaint files in 2019 were not related with human rights.<sup>90</sup> The NCHR has also made a classification based on the highest number of human rights violations among the complaint files in 2019.<sup>91</sup> From 4,778 complaint files considered as a human rights violation, the right to welfare is on the first rank amounting to approximately 50.7% and the right to obtain justice is ranked second amounting to approximately 31%.<sup>92</sup> Welfare for example, could be related to Goal 1 which is focusing on poverty and justice could be connected to Goal 16.<sup>93</sup>

Other examples, for instance, in the context of managing mediation. As of 2015 until 2019, mediation concerning land dispute has always ranked as the highest case.<sup>94</sup> With the exception of the year 2017, the amount of mediation in land dispute was always above 45%.<sup>95</sup> Meanwhile, employment case always ranked as the second highest case from 2015 until 2019.<sup>96</sup> Similar to the previous opinion, the NCHR could identify articles or rights that are usually utilized and relevant with the cases related to land dispute and manpower,

<sup>88</sup> Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" [NCHR 2019 Annual Report] (2020) (hereinafter: "NCHR 2019 Annual Report"), 41.

<sup>89</sup> Ibid., "NCHR 2019 Annual Report."

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid., 42.

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> (1) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015, "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" [Restitution of Rights of the Victim of the Human Rights Violation: NCHR 2015 Annual Report] (2016) (hereinafter: "Restitution of Rights of the Victim of the Human Rights Violation: NCHR 2015 Annual Report"), 112; (2) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016, "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas and Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016" [The Fulfillment of Rights of the Minority and Vulnerable Group in Indonesia: NCHR 2016 Annual Report] (2017) (hereinafter: "The Fulfillment of Rights of the Minority and Vulnerable Group in Indonesia: NCHR 2016 Annual Report"), 84; (3) Komnas HAM, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" [NCHR 2017 Annual Report] (2017) (hereinafter: "NCHR 2017 Annual Report"), 72; (4) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" [NCHR 2018 Annual Report] (hereinafter: "NCHR 2018 Annual Report") (2019), 37; and (5) Ibid., "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" [NCHR 2019 Annual Report], 50.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Ibid.

then correlate it with the goals and targets in the SDGs. Subsequently, the SDGs could be integrated at the time of the NCHR's implementation of its duties and authorities in relation to its function of mediation.<sup>97</sup>

This chapter will explain a number of the NCHR's activities which were specifically planned for the interest of achieving the SDGs that took the human rights aspects into consideration. From the SDGs' perspective, activities that have been conducted by the NCHR could be divided into two large parts. First, activities involving all of the SDGs in general. Second, activities specifically connected to one or more goals in the SDGs, however, do not cover all of the SDGs. This chapter will classify activities that have been conducted by the NCHR that have had strategic impacts for the NCHR to explore its role in all the SDGs. In order to elaborate on such activities, identification will also be made on the aspects of duties and authorities in the NCHR's functions.<sup>98</sup>

It is necessary to note that the NCHR's Sustainable Development Goals Team (hereinafter NCHR's SDGs Team) has made a list of the SDGs activities implemented by the NCHR from 2016 until 2020.<sup>99</sup> The list consists of activities conducted from 2018 until 2020.<sup>100</sup> In both 2016 and 2017, there is only one recorded activity in each year from the NCHR's SDGs Team's list.<sup>101</sup> In the list of activities during 2016-2018, the NCHR's SDGs Team also have specifically identified relevant goals of the SDGs that were connected to the activities.<sup>102</sup> Meanwhile, in the 2020 list, there is no such identification, and in the 2019 list, the SDGs are only identified in two activities.<sup>103</sup> Aside from relying upon the SDGs activities conducted by the NCHR according to the list made by the NCHR's SDGs Team, this research also see resources from other NCHR's documents such as annual reports, strategic plans, performance reports as well as other relevant resources outside of the NCHR.

The NCHR's SDGs Team was established in 2019.<sup>104</sup> The establishment was an important step in ensuring the existence of a key-player who can specifically work and focus on the SDGs and human rights in the NCHR.<sup>105</sup> The establishment of this team is a positive preliminary step in strengthening the roles of the NCHR in achieving the SDGs in Indonesia. In 2016, the

<sup>97</sup> Law 39/1999 (n. 9), Article 89 Paragraph (4) and its explanation.

<sup>98</sup> For the duties and authorities related to the NCHR functions, see: *ibid.*, Law 39/1999, Article 76 Paragraph (1) and Article 89.

<sup>99</sup> (1) Komnas HAM, "Laporan Kegiatan Tim Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM Tahun 2020" [Activity Report of the NCHR's Sustainable Development Goals (SDGs) Team 2020] (hereinafter: "Activity Report of the NCHR's SDGs Team 2020"); (2) Komnas HAM, "Laporan dan Review Kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM 2019" [Report and Review of the NCHR's Sustainable Development Goals (SDGs) Activities 2019] (hereinafter: "Report and Review of the NCHR's SDGs Activities 2019"); and (3) Komnas HAM, "Komnas HAM List of the SDGs' Activities" [NCHR's List of the SDGs' Activities] (hereinafter: "NCHR's List of the SDGs' Activities").

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, "NCHR's List of the SDGs' Activities".

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> (1) "Activity Report of the NCHR's SDGs Team 2020" (n. 99); and (2) "Report and Review of the NCHR's SDGs Activities 2019" (n. 99).

<sup>104</sup> See: (1) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 94; and (2) *Ibid.*, "Report and Review of the NCHR's SDGs Activities 2019", 5.

<sup>105</sup> See: *ibid.*



NCHR was trusted as the SDGs coordinator for Asia Pacific by the GANHRI.<sup>106</sup> In February 2018, the NCHR participated in the Annual Session of GANHRI, where one of the discussion topics was concerning the SDGs.<sup>107</sup> The NCHR's position as the coordinator was strategic since it could support the strengthening of the NCHR's roles in achieving the SDGs and inspire the National Human Rights Institutions (hereinafter: NHRIs) in Asia Pacific region.

The presence of the SDGs web-based tool based on human rights indicators can be considered as one of the strategic activities that the NCHR has conducted from 2015 to 2020, with respect to the SDGs and human rights.<sup>108</sup> The SDGs and human rights web-based tool is strategic since it contains indicators standard for human rights that could be used as guidelines in implementing the SDGs.<sup>109</sup> Besides that, the scope of goals discussed within the web-based tool encompass not only Goals 5 and 16, however, it also covers Goals 1-4, 6, 8, and 10.<sup>110</sup> In the future, there is a plan to complete the goals that have not been included in the web-based tool.<sup>111</sup> The presence of the web-based tool is one of the important evidences of the NCHR's work in giving contribution to achieve the SDGs outside of Goals 5 and 16 that can be accessed by all stakeholders.

**” The NCHR places the SDGs in an important position within the inclusion of the SDGs into the NCHR's annual reports and strategic plan. An annual report is a document mandatorily made by the NCHR to be delivered to the executive (President), legislative (House of Representatives), and judicative (Supreme Court) bodies.**

<sup>106</sup> Feri/IBN, “Integrasi HAM dalam Sustainable Development Goals” [Integration of Human Rights in the Sustainable Development Goals], Komnas HAM, published on 10 September 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/10/1145/integrasi-ham-dalam-sustainable-development-goals.html>. For GANHRI's background, see: “A Brief History of GANHRI”, GANHRI, accessed on 15 January 2021, <https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/History.aspx>.

<sup>107</sup> RO/OL-3, “GANHRI Anugerahi Penghargaan Tertinggi Kepada Komnas HAM ‘Akreditasi A’” [GANHRI Granted the Highest Award to the NCHR ‘A Accreditation’], *MediaIndonesia.com*, published on 24 February 2018, <https://mediaindonesia.com/politik-and-hukum/146685/ganhri-anugerahi-penghargaan-tertinggi-kepada-komnasham-akreditasi-a>.

<sup>108</sup> Komnas HAM, UNESCO, and UNSDG, “Human Rights Based Development in Indonesia”, accessed on 2 January 2021, <https://sdg.komnasham.go.id/en/sdgs/> (hereinafter: web-based tool). See also: (1) NCHR 2017 Annual Report (n. 94), 91 and 43; (2) Tim Penyusun Laporan Kinerja Biro Renwakes Komnas HAM, “LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal and Kerjasama” [Planning, Internal Supervision and Partnership Bureau LKIP 2017] (hereinafter: Planning, Internal Supervision and Partnership Bureau LKIP 2017), 24-25 and 27; (3) NCHR List of SDG's Activities (n. 99); and (4) MDH, “Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM” [NCHR-UNESCO Partnership Prioritize the SDGs and Human Rights], Komnas HAM, published on 20 April 2017, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/6/12/351/tindak-lanjut-kerja-sama-komnasham-unesco-asia-pasifik.html>.

<sup>109</sup> *Ibid.*, web-based tool.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> See: (1) MDH, “Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti” [Partnership with UNESCO, Encourages Evidence-Based Policies], Komnas HAM, published on 20 March 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/20/1014/kerjasama-dengan-unesco-mendorong-kebijakan-berbasis-bukti.html>; (2) “NCHR-UNESCO Partnership Prioritize the SDGs and Human Rights” (n. 108); and (3) “NCHR 2019 Annual Report” (n. 88), 95.

The creation of the web-based tool is one of the implementations from the memorandum of understanding between the NCHR and UNESCO in June 2017 and was supported by the United Nations Sustainable Development Group (hereinafter: UNSDG).<sup>112</sup> The quality of the web-based tool is also developed continuously in terms of its application towards various topics such as disabilities and demographics,<sup>113</sup> as well as in terms of technical aspects in information technology.<sup>114</sup> In 2019, the supporting tools for the human rights indicator crafted by the NCHR and the UNESCO were used by Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia as one of the research basis in the published research.<sup>115</sup> The web-based tool also has been promoted by the NCHR, for example in March 2018, when the NCHR's representative became a speaker in the Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2018 in Thailand, the representative explained the human rights indicator web-based tool in SDGs function as a tool to support the implementation of the SDGs.<sup>116</sup>

The creation of the human rights indicator web-based tool in collaboration with the UNESCO could be categorized as an implementation of the NCHR's function to conduct study and research particularly concerning the collaboration with foreign partners.<sup>117</sup> Besides, the web-based tool could also take a role as a form of implementation of the NCHR's function to conduct dissemination.<sup>118</sup> The meeting with partners as mentioned above could be classified as an implementation of the NCHR's function to conduct study and research in form of discussion and collaboration of human rights with partners.<sup>119</sup> Meanwhile, the NCHR's representative activities in becoming a speaker could be categorized as an implementation of collaborative dissemination with partners.<sup>120</sup>

<sup>112</sup> (1) Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia [Memorandum of Understanding between the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia (NCHR) and the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) concerning the Partnership in Promoting Connection between the Sustainable Development Goals and the Human Rights in Indonesia] (12 June 2017); (2) web-based tool (n. 108); (3) "NCHR 2017 Annual Report" (n. 94), 91 and 43; and (4) "Planning, Internal Supervision and Partnership Bureau LKIP 2017" (n. 108), 24-25 and 27.

<sup>113</sup> (1) MDH, "Disiapkan, Perangkat Monitoring SDGs Berbasis Web" [Prepared, a Web-Based SDGs Monitoring Device], Komnas HAM, published on 18 October 2017, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/18/425/disiapkan-perangkat-monitoring-sdgs-berbasis-web.html>; (2) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 94; and (3) "Report and Review of the NCHR's SDGs Activities 2019" (n. 99), 2.

<sup>114</sup> "NCHR 2018 Annual Report" (n. 94), 19.

<sup>115</sup> (1) Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, "Linking SDGs and Human Rights: Demography Aspects" (Final Report) (2019); (2) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 94; (3) "NCHR List of SDG's Activities" (n. 99); and (4) "Report and Review of the NCHR's SDGs Activities 2019" (n. 99), 2.

<sup>116</sup> MDH, "Pendekatan HAM untuk Mencapai SDGs" [Human Rights Approach to Achieve the SDGs], Komnas HAM, published on 30 March 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/30/511/pendekatan-ham-untuk-mencapai-sdgs.html>.

<sup>117</sup> Law 39/1999 (n. 9), Article 89 Paragraph (1) Letter f.

<sup>118</sup> Ibid., Law 39/1999, Article 89 Paragraph (2) Letters a-c.

<sup>119</sup> (1) Ibid., Law 39/1999, Article 89 Paragraph (1) Letters e and f; and (2) Footnotes number 113-114.

<sup>120</sup> (1) Ibid., Law 39/1999, Article 89 Paragraph (2) Letter c; and (2) Footnote number 116.

The NCHR places the SDGs in an important position within the inclusion of the SDGs into the NCHR's annual reports and strategic plan. An annual report is a document mandatorily made by the NCHR to be delivered to the executive (President), legislative (House of Representatives), and judicative (Supreme Court) bodies.<sup>121</sup> Reporting the SDGs activities performed by the NCHR has become a strategic step to show that the NCHR is capable and has performed endeavors to contribute to the achievement of the SDGs beyond Goals 5 and 16 for the strategic stakeholders mentioned above. The performed SDGs activities have been reported from its 2017 report until 2019 report.<sup>122</sup> In the 2019 annual report, activities conducted by the NCHR had significantly increased compared to those within the annual reports in 2017 and 2018, where there was less frequency of discussion concerning the SDGs and human rights.<sup>123</sup> The 2017, 2018, and 2019 annual reports presented the activities towards implementing the SDGs in general.<sup>124</sup> The 2019 annual report has already started to report specific goals of the SDGs, although not all were explicitly explained.<sup>125</sup> When this research was made, the 2020 annual report has not yet been published.

Meanwhile, the strategic plan is important since it serves as a guideline for the NCHR to conduct its activities. The NCHR has placed the SDGs as a part of its policies and strategies as of the NCHR Strategic Plan 2020-2024.<sup>126</sup> However, the seven prioritized issues in the NCHR Strategic Plan 2020-2024 is limiting and appear to adjust itself to Goal 16, particularly only to Targets 16.1, 16.3, and 16.6.<sup>127</sup> According to Beka Ulung Hapsara (Coordinator for the Sub-Commission of the Advancement of Human Rights / Commissioner for Education and Dissemination for the National Commission on Human Rights), the seven prioritized issues were selected by using the people's primary need approach based on the complaints data the NCHR received. In the previous strategic plan during the 2015-2019 period, matters concerning the SDGs were not included yet and there was no revised version of the strategic plan.<sup>128</sup>

Collaborations between the NCHR and either its foreign or domestic partners have produced positive activities in relation to the SDGs and human rights. These collaborations are in accordance with the duties and authorities of the NCHR to establish partnerships in the field of study and research as well as dissemination.<sup>129</sup>

<sup>121</sup> See: *ibid.*, Law 39/1999 (n. 9), Article 97.

<sup>122</sup> (1) "NCHR 2017 Annual Report" (n. 94), 91 and 43; (2) "NCHR 2018 Annual Report (n. 94), 36, 54, and 90-91; and (3) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 36, 91, 94-95, 110, 114-116, 118, and 120. See also in general: (1) "Restitution of Rights of the Victim of the Human Rights Violation: NCHR 2015 Annual Report" (n. 94); and (2) "The Fulfillment of Rights of the Minority and Vulnerable Group in Indonesia: NCHR 2016 Annual Report" (n. 94).

<sup>123</sup> Compare to: *ibid.*

<sup>124</sup> Compare to: *ibid.*

<sup>125</sup> "2019 NCHR Annual Report" (n. 88), 94-95 and 114.

<sup>126</sup> Komnas HAM Republik Indonesia, "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024" [Strategic Plan of the National Commission on Human Rights 2020-2024], 43-46.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> See in general: Komnas HAM, "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019" [Strategic Plan of the National Commission on Human Rights 2015-2019]. See also: UNGA Res. 70/1 (n. 2).

<sup>129</sup> Law 39/1999 (n. 9), Article 89 Paragraph (1) Letter f and Paragraph (2) Letter c.

These collaborations are important since it could maximize the NCHR's effort to implement the SDGs activities from human rights perspective with support from third parties. Examples of the NCHR's foreign partner in collaborating within the field of the SDGs and human rights and who have signed the memorandum of understanding with the NCHR are the UNESCO,<sup>130</sup> the Danish Institute for Human Rights (hereinafter: DIHR),<sup>131</sup> and the Human Rights Commission of Malaysia.<sup>132</sup>

The UNESCO and the DIHR could be considered as the two most prominent foreign partners who have collaborated with the NCHR. The most prominent collaboration result between the NCHR and the UNESCO were the human rights indicator web-based tool which is related with the SDGs and various supporting activities and their derivatives as explained above. Meanwhile, the most prominent collaboration result with the DIHR was the implementation of various capacity-building activities for the NCHR and other relevant parties in the SDGs and human rights, particularly in 2019 and 2020.<sup>133</sup> One of the activities recently conducted was held in December 2020, whereas the NCHR held a webinar on the NHRI's roles in SDGs where the DIHR representative participated as one of the speakers.<sup>134</sup> Another example of activity is in March 2019, where one of the NCHR Commissioner delivered Indonesia's perspective on the correlation between demography and the SDGs in one of the sessions of the Asia-Pacific People's Forum on Sustainable Development 2019, the DIHR was one of the NCHR's partners in that session.<sup>135</sup> There were two goals mentioned explicitly as the

<sup>130</sup> (1) "Memorandum of Understanding between the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia (NCHR) and the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) concerning the Partnership in Promoting Connection between the Sustainable Development Goals and the Human Rights in Indonesia" (n. 112); and (2) "Planning, Internal Supervision and Partnership Bureau LKIP 2017" (n. 108), 24-25 and 27.

<sup>131</sup> (1) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 110; (2) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM, "Laporan Kinerja 2018" [2018 Performance Report], 26; and (3) Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia LKIP Laporan Kinerja 2018" [2018 LKIP Performance Report of the NCHR] (2018), 67.

<sup>132</sup> 1) Memorandum of Understanding (MoU) between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and the National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), with the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP) as an Official Observer on Statelessness Issues in Sabah (23 April 2019); and (2) Ibid., "NCHR 2019 Annual Report", 115-116.

<sup>133</sup> For examples as recorded in: (1) "Report and Review of the NCHR's SDGs Activities 2019" (n. 99), 3-4 and 6-9; (2) "Activity Report of the NCHR's SDGs Team 2020" (n. 99), 2-5 and 8-9.

<sup>134</sup> (1) Komnas HAM, Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic, Youtube video, minutes 52-53, accessed on 30 December 2020, [https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t\\_OtM&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t_OtM&feature=youtu.be); (2) AAP/IW, "Komnas HAM Kawal Capaian SDGs pada Masa Pandemi COVID-19" [NCHR Oversee the Achievement of the SDGs during the COVID-19 Pandemic], Komnas HAM, published on 23 December 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/12/23/1635/komnas-ham-kawal-capaian-sdgs-pada-masa-pandemi-covid-19.html>; and (3) "Activity Report of the NCHR's SDGs Team 2020" (n. 99), 9.

<sup>135</sup> (1) Nur Afifa Fauzia, "Aspek Demografi Sebagai Salah Satu Pendekatan Pemantauan SDGs di Indonesia" [Demography Aspect as One of the Approach to Monitor the SDGs in Indonesia], Komnas HAM, published on 1 April 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/4/1/776/aspek-demografi-sebagai-salah-satu-pendekatan-pemantauan-sdgs-di-indonesia.html>; (2) "Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights," (29 March 2019) (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development), <https://www.unescap.org/apfsd/6/document/sid%20events/Empowering%20the%20most%20marginalized%20and%20Ensuring%20Inclusiveness%20and%20Equality.pdf>; (3) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 115; and (4) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM, "Laporan Kinerja 2019" [Performance Report 2019], 33.

background of that event, namely Goals 10 and 16.<sup>136</sup>

Domestic partners are equally important in supporting the NCHR to implement the SDGs and human rights activities. For example, in June 2015, the SDGs concept has been introduced by the NCHR in the workshop and training activities concerning the human rights cities in connection with the Wonosobo Regency development.<sup>137</sup> This activity construed as the implementation of partnership embodied in the memorandum of understanding between the NCHR and the government of Wonosobo Regency as well as the Institute for Policy Research and Advocacy (hereinafter: ELSAM) and International NGO Forum on Indonesian Development (hereinafter: INFID), which priorly has been signed by the parties in May 2015.<sup>138</sup> These workshops and training were also supported by the Ministry of Law and Human Rights as well as the Friedrich Naumann Foundation.<sup>139</sup> In November of the same year, the NCHR along with the Ministry of Law and Human Rights as well as ELSAM and INFID issued a press release concerning human rights cities and connect it with the SDGs.<sup>140</sup> The human rights friendly city theme is very relevant to Goal 11 of the SDGs.<sup>141</sup> In November 2018, the NCHR in collaboration with among others, the central, Central Java province, and Wonosobo regency government as well as INFID, have succeeded in encouraging the manifestation of the Wonosobo Declaration which supports the SDGs' success in general, whereas the SDGs Team in the NCHR related this activity with Goals 5, 10, 11, and 16.<sup>142</sup> Collaboration with the central government (Executive Office of the President of the Republic of Indonesia) and local government (Government of Jember Regency) as well as INFID related to the SDGs has been continued, for instance with the implementation of the Human Rights Festival 2019.<sup>143</sup>

<sup>136</sup> Ibid., "Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights".

<sup>137</sup> Yuli Asmini, "Loklatih Human Rights Cities di Wonosobo" [Workshop on Human Rights Cities in Wonosobo] SUAR, No. 1 of 2015, 40.

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> "Pemantauan Workshop Pengarusutamaan HAM Dalam Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah HAM" [Monitoring to the Workshop to Prioritize Human Rights in the Development of Wonosobo as a Human Rights-Friendly Regency], Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, published on 7 June 2015, <http://ham.go.id/pemantauan-workshop-pengarusutamaan-ham-dalam-pengembangan-wonosobo-sebagai-kabupaten-ramah-ham/>.

<sup>140</sup> (1) Komnas HAM, INFID, ELSAM, and Kemenkumham, "Siaran Pers Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia" [Press Release from the NCHR, INFID, ELSAM, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is Encouraging Human Rights-Friendly Cities in Indonesia]; and (2) Eva Nila Sari, "Komnas HAM RI, INFID, ELSAM and Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia" [NCHR, INFID, ELSAM, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Encourage Human Rights-Friendly Cities in Indonesia], Komnas HAM, published on 13 November 2015, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/11/13/229/komnas-ham-ri-infid-elsam-andkemenkumham-ri-dorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.html>.

<sup>141</sup> See: footnotes number 73-75.

<sup>142</sup> (1) "Deklarasi Wonosobo dalam Festival HAM Indonesia 2018" [Wonosobo Declaration in the Human Rights Festival of Indonesia in 2018], Komnas HAM, published on 15 November 2018, [komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/deklarasi-wonosobo-dalam-festival-ham-indonesia-2018.html](http://komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/deklarasi-wonosobo-dalam-festival-ham-indonesia-2018.html); (2) "NCHR 2018 Annual Report" (n. 94), 90-91; and (3) "NCHR List of SDG's Activities" (n. 99).

<sup>143</sup> (1) "Report and Review of the NCHR's SDGs Activities 2019" (n. 99), 8; and (2) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 32-34 and 110.

The partnership between the NCHR and its domestic and foreign partners also occurred when the NCHR collaborated with INFID, the United Cities and Local Governments Asia Pacific, and Raoul Wallenberg Institute held an event with the theme of human rights cities and the SDGs in South Korea.<sup>144</sup>

During the NCHR Internal FGD, it was asked through the questionnaire on how far the impacts of five classifications made for the NCHR activities towards the SDGs within this chapter is towards the achievement of the SDGs in Indonesia in relation with human rights.<sup>145</sup> Fifteen people filled the questionnaire and three of them are the commissioners of the NCHR. The following table display the answer to the questionnaire:

**IMPACT OF ACTIVITIES TOWARDS THE ACHIEVEMENT OF THE SDGs IN CONNECTION WITH HUMAN RIGHTS ACCORDING TO THE FGD'S PARTICIPANTS ON 26 JANUARY 2021 FROM THE NCHR:<sup>146</sup>**

| No. | Activities  | Impact of Activities towards the SDGs and Human Rights |                |                 |            |                 |
|-----|---|--|----------------|-----------------|------------|-----------------|
|     |   | Not Aware  | Not Beneficial | Less Beneficial | Beneficial | Very Beneficial |
| 1.  | The Establishment of the NCHR's SDGs Team             | 0  | 6,7%           | 0               | 73,3%      | 20%             |
| 2.  | The NCHR as the SDGs Coordinator for the Asia Pacific | 6,7%   | 0              | 6,7%            | 66,7%      | 20%             |
| 3.  | The SDGs Web-Based Tool based on Human Rights         | 0  | 20%            | 0               | 80%        | 0               |

<sup>144</sup> Yuli Asmini, "Forum Kota HAM Dunia dan Peran Penting Komnas HAM" [Human Rights Cities World Forum and the Important Roles of the NCHR], Komnas HAM, published on 24 October 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/24/651/forum-kota-ham-dunia-and-peran-penting-komnas-ham.html>.

<sup>145</sup> It is important to state that when a respondent is questioned with closed questions (yes or no): whether the respondent is aware or have heard of (1) The establishment of the NCHR's SDGs Team, there was 1 respondent (6.7%) answered no; (2) The NCHR as the SDGs Coordinator for Asia Pacific, there were 2 respondents (13.3%) answered no; (3) The SDGs Web-Based Tool based on Human Rights Indicator, there was 1 respondent (6.7%) answered no; (4) Annual Report and Strategic Plan, there were 3 respondents (20%) answered no; and (5) Collaboration with Foreign or Domestic Partners, there was 1 respondent (6.7%) answered no. The data used in the matrix are using respondent answers to the questions specifically made for the interest of the creation of this matrix, it is not from the closed questions.

<sup>146</sup> There were two activities left excluded from the matrix since there was a confirmation from the NCHR Internal FGD that one of the activities, namely: (1) Giving comments on the regional regulation related to the HIV/AIDS to the Regional House of Representative of East Java was not explicitly related to the SDGs (according to information from Mimin Dwi Hartono); meanwhile in another activity, namely: (2) One of the commissioners of the NCHR went as an expert witness in a criminal court proceeding related to the detention of a person who was a part of the indigenous people, it cannot be remembered whether it directly relates to the SDGs or not (according to the information from Sandrayati Moniaga), source: (1) NCHR Internal FGD (n. 7); and (2) NCHR List of SDG's Activities" (n. 99).

|    |   |      |   |      |       |       |
|----|---|------|---|------|-------|-------|
| 4. | Annual Report and Strategic Planning                | 6,7% | 0 | 6,7% | 66,7% | 20%   |
| 5. | Collaboration with Foreign and/or Domestic Partners | 6,7% | 0 | 6,7% | 60%   | 26,7% |

**ASSESSMENT INDICATOR:**

1. Not Aware: Had never been aware of such an activity at all.
2. Not Beneficial: No positive impact at all towards the achievement of the SDGs and Human Rights.
3. Less Beneficial: Only giving small positive impact to the achievement of the SDGs. The activities are hardly known even among the NCHR internally. Has not yet triggered the implementation of other SDGs activities.
4. Beneficial: Give positive impact to the achievement of the SDGs and Human Rights, however it has not yet triggered the implementation of other SDGs activities.
5. Very Beneficial: Give a very positive impact to the achievement of the SDGs and Human Rights and becomes the trigger to the implementation of other SDGs activities.

A number of interesting findings for example the collaboration between the NCHR and its either domestic and/or foreign partners was chosen as the activities with the highest vote on “very beneficial” (26.7%) towards the SDGs and human rights. The majority of the respondents stated that the 5 activities in the matrix above are in the “beneficial” category. However, there is still one respondent (6.7%) who has not been aware that the NCHR is the SDGs Coordinator for Asia Pacific (GANHRI) and has the SDGs report section in its annual report as well as the SDGs planning in its Strategic Planning; further, there is still one respondent (6.7%) who has not been aware about the collaboration that the NCHR has made with its domestic and/or foreign partners. Besides that, the SDGs web-based tool is considered as not beneficial by 3 respondents (20%).

The result obtained from the answers of 10 respondents to the questionnaire distributed at the NCHR External FGD shows that the NCHR has not yet promoted the implementation of the SDGs activities in an optimum manner to a number of strategic stakeholders outside of the NCHR. The following table displays the result of the questionnaire:

| No. | Activities   | Are You Aware and/or Have You Heard of (for the web-based tool, and/or utilized it) |     |
|-----|--|---|-----|
|     |  | Yes   | No  |
| 1.  | The NCHR Activities in Achieving the SDGs                    | 40%   | 60% |
| 2.  | The SDGs Web-Based Tool Based on the Human Rights Indicators | 20%   | 80% |

|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 3. | The SDGs in the NCHR's Annual Year and Strategic Plan        | 50% | 50% |
| 4. | The NCHR's SDGs Team   | 20% | 80% |
| 5. | The NCHR as the SDGs Coordinator for Asia Pacific            | 10% | 90% |
| 6. | SDGs Collaboration with the Foreign and/or Domestic Partners | 30% | 70% |

In principle, the NCHR needs to comprehensively integrate the implementation of Goals 1-17 of the SDGs in exercising its objectives and functions. The NCHR could start by firmly stating such an intention in their strategic documents that would become their reference in exercising its purposes and functions such as contained within the strategic plan.<sup>147</sup> Further, the result of the strategic plan's implementation is expected to be routinely reported and officially recorded in the NCHR's annual report. Sandrayati Moniaga also reminds the needs to comprehensively follow-up the identification towards the NCHR's activities that could be related with the SDGs to strengthen the annual report.

The patterns of process in the implementation of activities based on the NCHR's functions could vary. The following is one of the examples, for instance, an integration process could be initiated by discussing the problems of the SDGs and human rights in each respective goal of the SDGs.<sup>148</sup> After the discussion subject is determined, the NCHR could continue by searching for the relevant collaboration partners to conduct study and research as well as for the interest of dissemination with respect to the SDGs and human rights issues.<sup>149</sup> The study and research could take place in the form of analysis towards the international instruments related to the SDGs and human rights that necessary to be adopted by Indonesia and/or recommendation related to the establishment and revision of the rules and regulations supporting the achievement of goals and targets of the SDGs and human rights.<sup>150</sup> The study and research could be carried out through for instance, a method of approach that is comparative from the other countries that have succeeded in integrating human rights to the SDGs.<sup>151</sup> The result of this study and research then needs to be published and easily accessible to the public.<sup>152</sup> The results of the study and research then need to be distributed to the public by optimizing collaboration with the NCHR's partners in education institutions, either formal or informal.<sup>153</sup> Beka Ulung Hapsara conveyed the necessity for the existence of strategies to disseminate and execute the SDGs issues with a broader method.

In connection to the monitoring and mediating function, the NCHR principally could accept reports on the violation of human rights from various parties, as regulated under Law

<sup>147</sup> Kumiasari Novita Dewi (Education and Dissemination Department at the NCHR) reminded the importance of the integration of the SDGs aside from in the strategic plan, but also within the budget, see: NCHR Internal (n. 7).

<sup>148</sup> See: Law 39/1999 (n. 9), Article 89 Paragraph (1) Letter e.

<sup>149</sup> See: *ibid.*, Article 89 Paragraph (1) Letter f and Article 89 Paragraph (2) Letter c.

<sup>150</sup> See: *ibid.*, Article 89 Paragraph (1) Letters a and b.

<sup>151</sup> See: *ibid.*, Article 89 Paragraph (1) Letter d.

<sup>152</sup> See: *ibid.*, Article 89 Paragraph (1) Letter c.

<sup>153</sup> See: *ibid.*, Article 89 Paragraph (2) Letters a-b.



39/1999, whereas the parties have the right to submit reports.<sup>154</sup> The NCHR could choose to follow-up those reports by correlating the issues both to the articles on human rights in Law 39/1999 and to the SDGs relevant thereto. On the other hand, the public also requires an explanation, that the rights under Law 39/1999 are relevant to the SDGs, hence, they could integrate the SDGs in either of their complaint or recommendation.<sup>155</sup> Sille Stidsen from the DIHR stated the importance of “initiating dialogue with relevant duty bearers in relation to patterns of neglect and violations found in the handling of complaints”. According to Stidsen, “when such patterns emerge, it could be brought up in dialogue with the relevant ministries and local authorities—and pointed out that this neglect is out of sync with commitments under the SDGs”. The NCHR also needs to actively exercise its supervision functions, for instances, supervising the enforcement of human rights within the society and voicing out opinion in relation to human rights to a chairperson of a court and connect it with the SDGs. This act will surely strengthen the implementation and integration of the SDGs in the NCHR. In the implementation of the NCHR’s duties and authorities according to its functions, the SDGs web-based tool and human rights indicator could be optimally used as supporting instruments.

According to the activities carried out by the NCHR from 2015 until 2020 in Chapter 3, there are several activities seen as focusing on study and research (Article 89 Paragraph (1) of Law 39/1999) and dissemination (Article 89 Paragraph (2) of Law 39/1999). However, it is necessary to point out that there are no activities found as explicitly related to the SDGs and relevant human rights with mediation (Article 89 Paragraph (4) of Law 39/1999) and activities connected to the monitoring function (Article 89 Paragraph (3) of Law 39/1999).

One of the most prominent parties that could become the primary driver to ensure that the NCHR is supporting the achievement of the SDGs in relation to human rights, is the NCHR’s SDGs Team—which of course needs full support from all commissioners and staffs. From the NCHR internal parties, Asri Oktavianty Wahono (Coordinator for Mediation in the NCHR) stated within her answer to the questionnaire of the importance of evaluation for the NCHR’s SDGs Team, including the existence of a program that could support a more in-depth implementation of the SDGs and human rights in the NCHR.<sup>156</sup> The NCHR SDGs Team also needs to strengthen its performance with the strategic third party, bearing in mind that there were only 20% of the respondents who were aware of the SDGs Team existence according to the questionnaire distributed to the participants of the NCHR External FGD.

With respect to the collaboration, from the NCHR’s internal perspective, for instance, Asri Oktavianty Wahono stated that the NCHR needs to actively collaborate with the ministry and other institutions in relation to the SDGs.<sup>157</sup> From the external perspective, the fact that there were only 30% of the respondents who were aware of the NCHR’s collaboration activities with the third parties, according to the questionnaire result, shows a sign that indeed, the collaboration among the NCHR with the Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (hereinafter: Ministry of NDP / NDPA),

---

<sup>154</sup> See: *ibid*, Article 89 Paragraph (3) Letters b-g as well as Paragraph (4), Article 90, and Article 101.

<sup>155</sup> See: *ibid*, Article 89 Paragraph (3) Letters a and h.

<sup>156</sup> Also elaborated by Asri Oktavianty Wahono in the: NCHR Internal FGD (n. 7).

<sup>157</sup> *Ibid*.

other executing institutions in the President Regulation 59/2017, and other relevant parties requires improvement and better promotion.<sup>158</sup> Indriana Nugraheni (National Secretariat of the Sustainable Development Goals / Secretariat for the National Coordination Team of the Sustainable Development Goals) specifically addresses the importance for the NCHR to coordinate in a more in-depth manner with the Ministry of NDP / NDPA.<sup>159</sup> Through this collaboration, it is expected that all parties are working together to help the government in performing its duties as the party in charge of fulfilling human rights while simultaneously support the achievement of the SDGs in Indonesia.<sup>160</sup> The aforementioned collaboration with foreign partners such as the UNESCO and the DIHR will also provide a very good impact if it is improved, particularly in connection with the strengthening of the NCHR internal resources.

Only 10% of the respondents from the NCHR External FGD were aware of the NCHR position as the SDGs Coordinator for Asia Pacific, GANHRI. Internally, when answering the questionnaires, Sri Nur Fathya (Sub-Coordinator for the Department of Partnership between Institutions) also advised the NCHR to reinforce its role as the SDGs Coordinator for Asia Pacific, GANHRI. The NCHR could actually introduce and develop the web-based tool's quality to and together with the other NHRIs in the Asia Pacific region.

The SDGs web-based tool and human rights indicator possess the chance to become the consolidating element that can help the NCHR and the government to achieve the SDGs by implementing the human rights aspects. It is unfortunate that the survey result from the NCHR External FGD stated that only 20% of the respondents were aware of and/or utilize the said web-based tool. Internally, the NCHR has discussed the necessity to improve the web-based tool by the addition of human rights indicators in the other SDGs goals that have not been made.<sup>161</sup> From the NCHR's external parties, for instance, Diani Sadiawati (Expert Staff for the Minister of National Development Planning) and Indriana Nugraheni proposed several recommendations to the web-based tool, such as a display of the previously obtained achievements.<sup>162</sup> Indriana Nugraheni also stated among others, the need of displaying the technical standard of the measurable indicators.<sup>163</sup>

<sup>158</sup> See: (1) President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex; and (2) Law 39/1999 (n. 9), Article 89 Paragraph (1) Letter f, Paragraph (2) Letter e, and Article 102. See also: Article 102.

<sup>159</sup> NCHR External FGD (n. 8).

<sup>160</sup> See: (1) Law 39/1999 (n. 9), Article 8; and (2) President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex.

<sup>161</sup> See: MDH, "Partnership with UNESCO, Encouraging Evidence-Based Policy" (n. 111).

<sup>162</sup> (1) Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mengenai "Penyampaian Respon Focus Group Discussion "Dampak Pandemi COVID-19 dalam Pencapaian SDGs" [Letter Number: 022/SA.04.ND/01/2021 from Diani Sadiawati (Expert Staff for the Ministry of National Development Planning) concerning "Delivery of Response for the Focus Group Discussion "COVID-19 Pandemic Impact to the Achievement of SDGs""] (hereinafter: Letter Number: 022/SA.04.ND/01/2021 from Diani Sadiawati (Expert Staff for the Ministry of National Development Planning)] (28 January 2021); (2) Written Statement from the National Secretariat of the SDGs (29 January 2021); and (3) NCHR External FGD (n. 8).

<sup>163</sup> (1) Ibid, Written Statement from the National Secretariat of the SDGs; and (2) Ibid., NCHR External FGD. See also: (1) "Tier Classification for Global SDG Indicators: As of 28 December 2020", United Nations (managed by the United Nations Statistics Division), accessed on 8 January 2021, [https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators\\_28%20Dec%202020\\_web.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf); and (2) "SDG Indicators: Metadata Repository" United Nations (managed by United Nations Statistics Division), accessed on 8 January 2021, <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>.

Besides, the human rights indicator also needs to be related to the relevant legal products and policies, one of the examples that can be included in this regard, is the identification result of the relationship between rights and the goals in the SDGs within Law 39/1999 as elaborated in Chapter 2 of this research. The NCHR needs to introduce the human rights indicator web-based tools to the other institutions and the public, as well as establishing the indicators as an implementation guideline. Furthermore, in order to strengthen the position of the said human rights standard, it is recommended for such indicator to be recognized in the future president regulation concerning the SDGs, or at least at the level of the NCHR's regulation.

#### 4. STRENGTHENING THE POSITION AND THE ROLES OF THE NCHR: DISCUSSION AND PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

The Ministry of NDP / NDPA has an important and strategic role in planning and ensuring that the SDGs are achieved.<sup>164</sup> In the National Coordination Team for the Achievement of Sustainable Development Goals, the Ministry of NDP / Head of NDPA is taking place as the Executing Coordinator and also Steering Board Member in the team.<sup>165</sup> Meanwhile, the Deputy for the Marine and Natural Resources Department in the Ministry of NDP / NDPA is the Chief of the Executing Team from the National Coordination Team.<sup>166</sup> Furthermore,

<sup>164</sup> (1) President Regulation 59/2017 (n. 1), Articles 4-18 and 20-21; and see in general: (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia Regulation Number 7 of 2018 concerning Coordination, Planning, Monitoring, Evaluation, and Report of the Implementation of the Sustainable Development Goals] (stipulated on 26 April 2018, promulgated on 2 May 2018) (hereinafter: Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018); as well as (3) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 [Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency Decision Number Kep. 127/M.PPN/HK/11/2018 concerning the Establishment of Executing Team, Working Group and Expert Team for the Sustainable Development Goals 2017-2019] (stipulated 16 November 2018) (hereinafter: Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018).

<sup>165</sup> (1) Ibid., President Regulation 59/2017, Articles 8-9; (2) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, Article 4, Article 5 Paragraph (2), and Article 6; and (3) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018, Annex (Structure of Membership for the Executing Team, Working Group, and Expert Team for the Sustainable Development Goals 2017-2019).

<sup>166</sup> (1) Ibid., President Regulation 59/2017, Article 10; (2) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, see for instance: Article 4 and Article 7; and (3) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/20.

the Secretariat for the National Coordination Team of the Sustainable Development Goals is under the Ministry of NDP / NDPA and led by the Chief of Executing Team from the National Coordination Team.<sup>167</sup> One of the strategic roles of the Ministry of NDP / NDPA according to the President Regulation 59/2017 is its role as the party that receives the annual report of the SDGs' implementation, starting from the regional level to the national level, which is submitted by the governor, minister, and the head of institutions (including by the Head of the NCHR).<sup>168</sup> Further, the Minister of NDP / Head of NDPA will submit the SDGs report in its entirety to the President.<sup>169</sup>

The NCHR has a strong basis to support the achievement of the SDGs in all of its goals. In this research, particularly in Chapter 2, it is concluded that all goals in the SDGs could be related to the rights under Law 39/1999. Furthermore, practically, as explained in Chapter 3 of this research, it has also been proven that the NCHR has implemented activities related to the SDGs and human rights explicitly, beyond and not limited to Goals 5 and 16, in performing its duties and authorities according to the NCHR functions—despite that there are many improvements that must be done as delivered by the research team and by various parties.

Nonetheless, in President Regulation 59/2017, the Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia Regulation Number 7 of 2018 concerning Coordination, Planning, Monitoring, Evaluation, and Reporting of the Implementation of the Sustainable Development Goals (hereinafter: the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018), and Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency Decision Number Kep. 127/M.PPN/HK/11/2018 concerning the Establishment of Executing Team, Working Group, and Expert Team for the Sustainable Development Goals 2017-2019] (hereinafter: Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018), the NCHR's roles in achieving the SDGs have not yet been optimally accommodated.<sup>170</sup> As has been delivered in Chapter 1, President Regulation 59/2017 only position the NCHR as an executing institution of Goals 5 and 16.<sup>171</sup> The Minister of NDP / Head of NDPA Regulation

<sup>167</sup> (1) Ibid., President Regulation 59/2017, Article 13; (2) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, see for instance: Articles 11-13; and (3) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018.

<sup>168</sup> (1) Ibid., President Regulation 59/2017, Article 17 Paragraphs (1)-(2); and (2) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, Article 20, Article 25, and Article 27. According to the Focus Group Discussion on 26 January 2021 along with the NCHR, Sandrayati Moniaga and Mimin Dwi Hartono explained in their knowledge that there was never been any specific report given to the Ministry of NDP / Head of NDPA related to the SDGs, however Sandrayati Moniaga was once interviewed by NDPA representatives concerning Goal 16 and Mimin Dwi Hartono was once participated by attending the NDPA invitation with respect to the public consultation on the SDGs, source: NCHR Internal FGD. Diani Sadiawati and Indriana Nugraheni also stated that the NCHR also contributed on the establishment of the SDGs National Action Planning 2017-2019, see: (1) Letter Number: 022/SA.04.ND/01/2021 from Diani Sadiawati (Expert Staff for the Minister of National Development Planning) (n. 162), 3; and (2) Written Statement from the National Secretariat of the SDGs (n. 162), 4.

<sup>169</sup> (1) Ibid., President Regulation 59/2017, Article 17 (3); and Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, Article 27.

<sup>170</sup> (1) President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex, 30, 77, 79-80, and 90; (2) Ibid., Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, Annex II (129, 210, and 254-255), Sub-Annex I (448-449), Sub-Annex II (851-852), and Sub-Annex III (1319 and 1324-1325); and (3) Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Annex, 49.

<sup>171</sup> Ibid., President Regulation 59/2017, Annex 30, 77, 79-80, and 90.

7/2018 is a derivative of President Regulation 59/2017.<sup>172</sup> In the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, there is a more specific discussion up to the SDGs indicators, it does not stop only at the goals and targets of the SDGs.<sup>173</sup> In this Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, the NCHR is positioned as the source of data for Indicator 10.3.1.(b) and Indicator 16.10.1.(a) concerning the total complaints in the human rights cases, as well as in the Indicator 16.a.1 concerning quality improvement of the NCHR.<sup>174</sup> In the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, the NCHR was also positioned as an executing institution for (1) Indicator 5.2.2.(a) Program 2 in the Activities 1.1.-1.3. regarding women abuse complaint management system mechanism, (2) Indicator 10.3.1.(b) Program 1 in the Activities 1.1.-1.3. regarding severe human rights violation and violation towards marginalized community settlement mechanism, (3) Indicator 16.10.1.(a) Program 1 in the Activities 1.1.-1.5. regarding human rights violations settlement by the NCHR, and (4) Indicator 16.a.1. Program 1 in the Activities 1-6 (1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 4.3., 5.1., and 6.1.-6.2.) regarding quality improvement of the NCHR.<sup>175</sup>

It can be seen that the Minister of NDP / Head of NDPA 7/2018 is consistent in positioning the NCHR as the executing institution for the indicators related to the Target 5.2. and Target 16.10., however, it does not give any roles with respect to the Targets 16.1. and 16.3., despite that the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 has stipulated that the NCHR is the executing institution for those targets.<sup>176</sup> Furthermore, the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 is adding the NCHR as the executing institution for the indicators related to the Targets 10.3. and Target 16.a., although the NCHR is not the executing institution for the said two targets in the President Regulation 59/2017.<sup>177</sup>

The NCHR was also positioned as an institution providing data in different targets compared to its position as an executing institution in the President Regulation 59/2017, namely in the indicators related to the Targets 10.3. and 16.a.1.<sup>178</sup> Indicators in the targets aside from the ones related to the Target 16.10. are neglected in this Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018.<sup>179</sup> Meanwhile in the Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018, the NCHR is only involved in the Working Sub-Group for Goal 16.<sup>180</sup> The NCHR is not included as a member even in the Goal 5 where the President Regulation included the NCHR as the executing institution.<sup>181</sup>

<sup>172</sup> Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 (n. 164), Preamble.

<sup>173</sup> See in general: *ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*, Annex II (129, 210, and 254-255). See also: footnote numbers 71 and 83.

<sup>175</sup> *Ibid.*, Sub-Annex I (448-449), Sub-Annex II (851-852), and Sub-Annex III (1319 and 1324-1325). See also: footnote numbers 49, 71 and 83.

<sup>176</sup> Compare: (1) President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex, 30, 77, 79-80, and 90; and (2) *Ibid.*, Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 (n. 164), Sub-Annex I (448-449) and Sub-Annex III (1319).

<sup>177</sup> Compare: (1) *Ibid.*, President Regulation 59/2017; and (2) *Ibid.*, Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 (n. 164), Sub-Annex II (851-852) and Sub-Annex III (1324-1325).

<sup>178</sup> Compare: (1) *Ibid.*, President Regulation 59/2017; and (2) *Ibid.*, Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 (n. 164), Annex II (210 and 255).

<sup>179</sup> Compare: (1) *Ibid.*, President Regulation 59/2017; and (2) *Ibid.*, Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 (n. 164), Annex II (254).

<sup>180</sup> Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Annex, 49.

<sup>181</sup> Compare: (1) President Regulation 59/2017 (n. 1), Annex, 30, 77, 79-80, and 90; and (2) *Ibid.*

It is important to note that the President Regulation 59/2017 and the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 are actually in urgent need of revision. The reason is vital, President Regulation 59/2017 and the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 discussed the implementation of the SDGs in its relation to the integration to the National Middle Term Development Plan 2015-2019 (hereinafter: NMTDP 2015-2019), whereas the National Middle Term Development Plan 2020-2024 (NMTDP 2020-2024) has been enforced, hence, it is more accurate if Indonesia's SDGs are connected to the NMTDP 2020-2024 instead of the NMTDP 2015-2019.<sup>182</sup> Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018 also in need of revision as it only regulates the structure of membership of the executing team, working group as well as the special expert team for the period of 2017-2019—while at the time this research was conducted, it was already 2021.<sup>183</sup>

In a webinar in December 2020, a representative from the Ministry of NDP / Head of NDPA, Diani Sadiawati stated that NDPA has related the SDGs with the NMTDP 2020-2024.<sup>184</sup> Indriana Nugraheni in the NCHR External FGD and in her written statement responding to the key question in the NCHR External FGD has given the information that the President Regulation 59/2017 and also the Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018 are in the process of revision.<sup>185</sup> Aside from the said president regulation and minister decision, the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 is also in need of adjustment as elaborated above.

The matters important to be noted is that the revision of regulation and decision above can become the entrance for the reinforcement of human rights aspect in achieving the SDGs which could be executed by the NCHR. It is necessary to also note, that the representative of the Ministry of NDP / NDPA is actually acknowledging that the NCHR could take roles in all parts of the SDGs, not only limited to Goal 16.<sup>186</sup> The integration of the SDGs implementation to the NCHR activities is also encouraged by the representative of the Ministry of NDP / NDPA.<sup>187</sup> Diani Sadiawati and Indriana Nugraheni in their written statement for the interest of the NCHR External FGD stated the importance for the NCHR

<sup>182</sup> (1) Ibid., President Regulation 59/2017, Article 2 and Annex, See also Article 16; (2) See in general: Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 (n. 164), and (3) President Regulation Number 18 of 2020 concerning the National Middle Term Development Plan 2020-2024 (stipulated on 17 January 2020, promulgated on 20 January 2020) (hereinafter: President Regulation 18/2020).

<sup>183</sup> Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018 (n. 164), Annex.

<sup>184</sup> (1) Expert Staff to the Minister on Institutional Interrelation Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency / Head of SDGs Pillar on Law and Governance, "Covid-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs" (PowerPoint Presentation on the Webinar Side Event 3 Human Rights Festival 2020 with the theme of "NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic", 17 [16] December 2020); and (2) Komnas HAM, Side Event 3 Festival HAM 2020 Webinar NHRI's Role and SDGs' Achievements During Covid-19 Pandemic (n. 134).

<sup>185</sup> (1) NCHR External FGD (n. 8); and (2) Written Statement from the National Secretariat of the SDGs (n. 162).

<sup>186</sup> (1) "NCHR 2019 Annual Report" (n. 88), 95; and (2) MDH, "Sharing Pengetahuan SDGs dan HAM" [The SDGs and Human Rights Knowledge Sharing], Komnas HAM, published on 28 February 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019./2/28/747/sharing-pengetahuan-sdgs-dan-ham.html>.

<sup>187</sup> MDH, "Anggaran Komnas HAM Semestinya Ditambah" [NCHR Budget Should Be Increased], Komnas HAM, published 2 May 2018, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/2/527/anggaran-komnas-ham-semestinya-ditambah.html>.

to be involved in all of the goals.<sup>188</sup> However, the approach of being involved in all goals as explained by Diani Sadiawati and Indriana Nugraheni is leaning towards the optimization of the NCHR roles in the Goal 16 which could encourage the implementation of other goals in the SDGs.<sup>189</sup> Beka Ulung Hapsara reminded that human rights actually have a broader scope than the law and justice. However, it is also important to note that in the NCHR External FGD, Indriana Nugraheni stated her openness if the NCHR is formally positioned in all goals, provided that it comes with several notes.<sup>190</sup>

In the NCHR External FGD, the respondents were asked through the questionnaires, whether they think that the NCHR needs to be actively involved in achieving all goals in the SDGs by correlating them with human rights. From ten respondents who answered the questionnaire, nine answered yes (90%), and only one respondent answered no (10%). The respondent who answered no was Theresia Iswarini National Commission on the Violence Against Women, she stated that it cannot be construed as the NCHR's area of work and rather direct the responsibility of the SDGs to the government—although Theresia Iswarini also stated that the NCHR is ideally placed in a position to be involved in all goals of the SDGs.<sup>191</sup> Furthermore, she also questioned the NCHR's capability in the event that the NCHR is involved in all of the goals.<sup>192</sup>

With respect to the question on whether or not the NCHR will be capable in handling the responsibility, Indriana Nugraheni stated that the inclusion of the NCHR to all of the goals of the SDGs comes with consequences, hence, the NCHR must also be prepared, for instance to execute programs deriving from those goals.<sup>193</sup> Indriana Nugraheni also affirmed the importance of internal reinforcement in the NCHR towards the SDGs and human rights.<sup>194</sup> Muhamad Isnur from the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) also said a similar statement, the NCHR needs to measure its own capacity if they were to handle all goals in the SDGs and he reminded to refer to the strategic plan.<sup>195</sup>

Wahyu Susilo from the Migrant CARE delivered an interesting point based on his experience in managing matters related to the SDGs, in practice, the human rights aspect is not the priority in the discussion of certain SDGs, for instance, matters related to maritime issues.<sup>196</sup> Wahyu Susilo stated that the NCHR could be involved in this gap by providing technical supports.<sup>197</sup> The involvement of the NCHR in the gap of human rights was also endorsed by Shevierra Danmadiyah from ELSAM.<sup>198</sup>

<sup>188</sup> (1) Letter Number: 022/SA.04.ND/01/2021 from Diani Sadiawati (Expert Staff for the Minister of National Development Planning) (n. 162); and (2) Written Statement from the National Secretariat of the SDGs (n. 162).

<sup>189</sup> (1) Ibid; and (2) NCHR External FGD (n. 8).

<sup>190</sup> NCHR External FGD (n. 8).

<sup>191</sup> Ibid.

<sup>192</sup> Ibid.

<sup>193</sup> Ibid.

<sup>194</sup> (1) Written Statement from the National Secretariat of the SDGs (n. 162); and (2) NCHR External FGD (n. 8).

<sup>195</sup> Ibid.

<sup>196</sup> Ibid.

<sup>197</sup> Ibid.

<sup>198</sup> Ibid.

From the internal perspective of the NCHR, Sandrayati Moniaga stated that the NCHR does not intend to request a role.<sup>199</sup> What the NCHR desires, according to her, is for the NDPA to understand the NCHR's work if it is connected to the SDGs.<sup>200</sup> Sandrayati Moniaga also expresses the importance of the NCHR to improve communication with the NDPA in this regard.<sup>201</sup> Comprehension on the NCHR work will help the government to place the NCHR in the appropriate position, and this surely will strengthen the implementation of the SDGs based on human rights in Indonesia.

Beka Ulung Hapsara also stated the situation where the NCHR has not yet to be properly involved by the ministries or other institutions in the implementation of the SDGs.<sup>202</sup> He also said that the NDPA has not yet to see the NCHR's role in its entirety that has demonstrated a broad range of human rights aspect towards the SDGs.<sup>203</sup> Hairansyah (Coordinator of Sub-Commission on the Human Rights Enforcement / Commissioner for Mediation in the NCHR) agreed with the statement from Beka Ulung Hapsara on the broad nature of human rights that could be related to the SDGs.<sup>204</sup> Mimin Dwi Hartono (Coordinator for Study and Research of the National Commission on Human Rights) also mentioned about the NCHR's authority, which is large but has not yet been involved in a broader role with respect to the SDGs.<sup>205</sup>

Concerns on whether the NCHR is capable of supporting the achievement of all goals in the SDGs were expressed by Kurniasari Novita Dewi.<sup>206</sup> Asri Oktaviany Wahono, Kurniasari Novita Dewi, and Nur Afifa Fauzia (Secretary for the NCHR's SDGs Team) stipulates the SDGs had not yet been proliferated internally within the NCHR.<sup>207</sup>

Although the NCHR is indirectly supported by Law 39/1999 in achieving the SDGs, however, it is undeniable that the rules and decisions concerning the SDGs become very strategic legal products in maximizing the NCHR's roles in achieving the SDGs in terms of technical implementation. In order to maximize the NCHR's potential in achieving the SDGs, according to this preliminary research, it is indeed that ideally, the NCHR needs to be included in the rules and decisions to be revised as mentioned above. The inclusion of the NCHR in the rules and decisions needs to focus on the functions that the NCHR will exercise, particularly in ensuring the respect to human rights in all goals of the SDGs. According to Sandrayati Moniaga, it shall be more accurate to position the NCHR as the supervisor, instead of as an executing institution. Indeed, if the name remains to use executing institution, it is feared that it will present multi-interpretation on the NCHR's role outside of the monitoring function.

---

<sup>199</sup> NCHR Internal FGD (n. 7).

<sup>200</sup> Ibid.

<sup>201</sup> Ibid.

<sup>202</sup> Ibid.

<sup>203</sup> Ibid.

<sup>204</sup> Ibid.

<sup>205</sup> Ibid.

<sup>206</sup> Ibid.

<sup>207</sup> Ibid.



The NCHR's opportunity to be involved as a supervising institution and within a membership in the SDGs National Coordination Team which supervise the human rights aspects must be seen not as an additional burden for neither the NCHR nor the government, instead, it must be seen as a chance to integrate the advancement and the enforcement of human rights in a systematic and un-sporadic manner through very strategic sectors in the national level.

The correlation between human rights, the SDGs, and the NMTDP was stated by Sandrayati Moniaga and Asri Oktavianty Wahono.<sup>208</sup> It is true that the SDGs are related to the NMTDP.<sup>209</sup> The NMTDP is related to the budget.<sup>210</sup> The NCHR's presence in the said regulations and decision will strengthen the human rights budget for the NCHR.<sup>211</sup> Furthermore, the NCHR has the potential to receive the SDGs budget from other resources in the context of regulations on the SDGs at the national level under the umbrella of the presidential regulations.<sup>212</sup> The existence of the NCHR in supporting the government to achieve the SDGs by taking into account the human rights aspects, is an important matter, bearing in mind that the SDGs have a very close connection to human rights, as elaborated in Chapter 2. As a reminder, as elaborated in Chapter 2, not all targets are relevant to the NCHR, however all goals are relevant to the NCHR.

It is necessary to emphasize, that the spirit of the NCHR's involvement must be in accordance with the objectives and functions of the NCHR and to be more specific, it must be related to its duties and authorities. President regulation, minister regulation, minister decision, and legal products and policies regulating or comprising the SDGs must also comply with such matter and must not be in contrary to Law 39/1999. The NCHR does not need to work on issues that are not under its functions neither its duties and authorities. One of the strategic activities that could be immediately conducted by the NCHR is the analytical approach to the activities planning documents related to Goals 1-17 in the SDGs, and to ensure that the planning does not violate human rights. Other activities and technical discussion on such activity could be discussed more in-depth in the next research.

It is important to note that we all must remember is that the government actually has a significant interest in supporting the NCHR to execute this role. As elaborated previously, the government is responsible for the implementation of human rights in Indonesia.<sup>213</sup> The strengthening of the NCHR which is formally integrated into the SDGs and the NMTDP is expected to support the performance of the government's obligation towards human rights.

---

<sup>208</sup> Ibid.

<sup>209</sup> Ibid.

<sup>210</sup> See: (1) President Regulation 59/2017 (n. 1), Article 2 and Annex, see also Article 16; (2) See in general: Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018 (n. 164), and (3) President Regulation 18/2020.

<sup>211</sup> See: *ibid.*

<sup>212</sup> See: *ibid.*, President Regulation 59/2017, Article 19.

<sup>213</sup> See footnote number 160.

## PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

### For the NCHR and the Government:

- The NCHR needs to immediately communicate with the President as the Head of Steering Board in the National Coordination Team of the SDGs and also with the Ministry of NDP / Head of NDPA as the Executing Coordinator for the National Coordination Team of the SDGs on the strengthening of the NCHR's position and roles.<sup>214</sup> The government needs to embrace the communication in the spirit to strengthen human rights within the SDGs and optimizing the purpose, function, as well as duties and authority of the NCHR regulated under the Law 39/1999.
- The government needs to include the NCHR as the supervisor to human rights in all goals of the SDGs in the new regulations and decisions that will replace the President Regulation 59/2017, the Minister of NDP / Head of NDPA Regulation 7/2018, and the Minister of NDP / Head of NDPA Decision 127/M.PPN/HK/11/2018.
- The NCHR needs to immediately improve its internal capacity in relation to human rights and the SDGs, hence it could optimally perform its role regardless of whether or not the recommendation in the second point above is accepted.

### For the DIHR:

The DIHR could support the strengthening of the NCHR's internal capacity according to the third point above through various activities. For example, through strengthening the knowledge of the SDGs and human rights based on international standard for their internal parties. The planning of the activities for the strengthening needs to be made systematically to maximize the NCHR's role in the SDGs and human rights regardless of whether or not the NCHR is placed as a supervisory institution. We completely agree with Stidsen's comment that states "capacity building followed by cooperation on specific products is more fruitful than capacity-building alone".

---

<sup>214</sup> See: President Regulation 59/2017 (n. 1), Article 9.

## BIBLIOGRAPHY

### International Instruments:

- United Nations General Assembly Resolution 70/1. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1 (adopted on 25 September 2015).
- United Nations General Assembly Resolution 71/313. Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/71/313 (adopted on 6 July 2017).
- The Mérida Declaration: The Role of National Human Rights Institutions in Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development (adopted on 10 October 2015).

### Rules and Regulations and Decisions:

- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Republik Indonesia Nomor Kep. 127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019 [Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency Decision Number Kep. 127/M.PPN/HK/11/2018 concerning the Establishment of Executing Team, Working Group and Expert Team for the Sustainable Development Goals 2017-2019] (stipulated 16 November 2018)
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia Regulation Number 7 of 2018 concerning Coordination, Planning, Monitoring, Evaluation, and Report of the Implementation of the Sustainable Development Goals] (stipulated on 26 April 2018, promulgated on 2 May 2018)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 [President Regulation Number 18 of 2020 concerning the National Middle Term Development Plan 2020-2024] (stipulated on 17 January 2020, promulgated on 20 January 2020).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [President Regulation Number 59 of 2017 concerning the Implementation of Achievement for the Sustainable Development Goals] (stipulated on 4 July 2017, promulgated on 10 July 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial [Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 concerning the Social Conflict Management] (authorised on 10 May 2012, promulgated on 10 May 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) [Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning the Ratification of International Covenant on Civil and Political Rights] (authorised on 28 October 2015, promulgated on 28 October 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2000 concerning the Court of Human Rights] (authorised on 23 November 2000, promulgated on 23 November 2000).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights] (authorised on 23 September 1999, promulgated on 23 September 1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis [Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2008 concerning the Eradication of Discrimination Against Race and Ethnicity] (authorised on 10 November 2008, promulgated on 10 November 2008).

**Other Resources:**

“12th International Conference” GANHRI, accessed on 15 January 2021. <https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/12IC/Pages/default.aspx>.

“A Brief History of GANHRI” GANHRI, accessed on 15 January 2021. <https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/History.aspx>.

“Deklarasi Wonosobo dalam Festival HAM Indonesia 2018” [Wonosobo Declaration in the Indonesia Human Rights Festival 2018] Komnas HAM, published on 15 November 2018. <https://komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/15/682/deklarasi-wonosobo-dalam-festival-ham-indonesia-2018.html>.

“Empowering the Most Marginalized and Ensuring Inclusiveness and Equality: Realizing the SDGs through Human Rights” Asia-Pacific Forum on Sustainable Development, published on 29 March 2019. <https://www.unescap.org/apfsd/6/document/sidevents/Empowering%20the%20ost%20marginalize2nd%20suring%20Inclusiveness%20and%20Equality.pdf>.

“Pemantauan Workshop Pengarusutamaan HAM Dalam Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah HAM” [Monitoring to the Workshop to Prioritize Human Rights in the Development of Wonosobo as a Human Rights-Friendly Regency] Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, published on 7 June 2015. <http://ham.go.id/pemantauan-workshop-pengarusutamaan-ham-dalam-pengembangan-wonosobo-sebagai-kabupaten-ramah-ham/>.

“SDG Indicators” United Nations (managed by United Nations Statistics Division), accessed on 28 December 2020. <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>.

- “SDG Indicators: Metadata Repository” United Nations (managed by United Nations Statistics Division), accessed on 8 January 2021. <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>.
- “Tier Classification for Global SDG Indicators: As of 28 December 2020” United Nations (managed by United Nations Statistics Division), accessed on 8 January 2021. [https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators\\_28%20Dec%202020\\_web.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf).
- AAP/IW. “Komnas HAM Kawal Capaian SDGs pada Masa Pandemi COVID-19” [NCHR Oversee the Achievement of SDGs during the COVID-19 Pandemic] Komnas HAM, published on 23 December 2020. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/12/23/1635/komnas-ham-kawal-capaian-sdgs-pada-masa-pandemi-covid-19.html>.
- Asmini, Yuli. “Forum Kota HAM Dunia dan Peran Penting Komnas HAM” [Human Rights Cities World Forum and the Important Role of the NCHR] Komnas HAM, Published on 24 October 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/24/651/foru-m-kota-ham-dunia-dan-peran-penting-komnas-ham.html>.
- Asmini, Yuli. “Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan” [Rights to Information and Sustainable Development Agenda] SUAR, No. 3 of 2015.
- Asmini, Yuli. “Loklatih Human Rights Cities di Wonosobo” [Workshop on Human Rights Cities in Wonosobo] SUAR, No. 1 of 2015.
- Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM. “Laporan Kinerja 2018” [Performance Report 2018].
- Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM. “Laporan Kinerja 2019” [Performance Report 2019].
- Expert Staff to the Minister on Institutional Interrelation Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency / Head of SDGs Pillar on Law and Governance, “Covid-19 Pandemic: Impact on National Development and SDGs” (PowerPoint Presentation on the Webinar Side Event 3 Human Rights Festival 2020 with the theme of “NHRI’s Role and SDGs’ Achievements During Covid-19 Pandemic”, 17 [16] December 2020)
- Fauzia, Nur Afifa. “Aspek Demografi Sebagai Salah Satu Pendekatan Pemantauan SDGs di Indonesia” [Demography Aspect as One of the the SDGs Monitoring Approach in Indonesia] Komnas HAM, published on 1 April 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/4/1/776/aspek-demografi-sebagai-salah-satu-pendekatan-pemantauan-sdgs-di-indonesia.html>.
- Feri/IBN. “Integrasi HAM dalam Sustainable Development Goals” [Human Rights Integration in the Sustainable Development Goals] Komnas HAM, published on 10 September 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/10/1145/integrasi-ham-dalam-sustainable-development-goals.html>.

- Hartono, Mimin Dwi. "Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan" [Vaccination and Children's Rights to Health] Kompas.com, published on 12 August 2017. <https://sains.kompas.com/read/2017/08/12/205030323/vaksinasi-dan-hak-anak-atas-kesehatan?page=all>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019" [Strategic Plan of the National Commission on Human Rights 2015-2019].
- Komnas HAM Republik Indonesia. "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024" [Strategic Plan of the National Commission on Human Rights 2020-2024].
- Komnas HAM, INFID, ELSAM, and Kemenkumham. "Siaran Pers Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia" [Press Release from the NCHR, INFID, ELSAM, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is Encouraging Human Rights-Friendly Cities in Indonesia].
- Komnas HAM, UNESCO, and UNSDG. "Human Rights Based Development in Indonesia" accessed on 2 January 2021. <https://sdg.komnasham.go.id/en/sdgs/>.
- Komnas HAM. "Komnas HAM List of the SDGs Activities" [NCHR's List of the SDGs' Activities].
- Komnas HAM. "Laporan dan Review Kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM 2019" [Report and Review of the NCHR's Sustainable Development Goals (SDGs) Activities 2019].
- Komnas HAM. "Laporan Kegiatan Tim Sustainable Development Goals (SDGs) Komnas HAM Tahun 2020" [Activity Report of the NCHR's Sustainable Development Goals (SDGs) Team 2020].
- Komnas HAM. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2017" [NCHR 2017 Annual Report] (2017).
- Komnas HAM. Side Event 3 Human Rights Festival 2020 Webinar NHRI's Role and SDG's Achievements During Covid-19 Pandemic. Youtube video, on minute 52-53, accessed on 30 December 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t\\_OtM&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=XaeYD3t_OtM&feature=youtu.be).
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. "Linking SDGs and Human Rights: Demography Aspects" (Final Report) (2019).
- Surat Nomor: 022/SA.04.ND/01/2021 dari Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) mengenai "Penyampaian Respon Focus Group Discussion "Dampak Pandemi COVID-19 dalam Pencapaian SDGs" [Letter Number: 022/SA.04.ND/01/2021 from Diani Sadiawati (Expert Staff for the Ministry of National Development Planning) concerning "Delivery of Response for the Focus Group Discussion "COVID-19 Pandemic Impact to the Achievement of SDGs""] (28 Januari 2021).

- MDH. “Anggaran Komnas HAM Semestinya Ditambah” [NCHR Budget Should Be Increased] Komnas HAM, published on 2 May 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/2/527/anggaran-komnas-ham-semestinya-ditambah.html>.
- MDH. “Disiapkan, Perangkat Monitoring SDGs Berbasis Web” [Prepared, Web-based SDGs Monitoring Devices] Komnas HAM, published on 18 October 2017. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/18/425/disiapkan-perangkat-monitoring-sdgs-berbasis-web.html>.
- MDH. “Kerjasama dengan UNESCO, Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti” [Partnership with UNESCO, Encourages Evidence-Based Policies] Komnas HAM, published on 20 March 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/20/1014/kerjasama-a-dengan-unesco-mendorong-kebijakan-berbasis-bukti.html>.
- MDH. “Komnas HAM-UNESCO Kerjasama Mengarusutamakan SDGs dan HAM” [NCHR-UNESCO Partnership Prioritize the SDGs and Human Rights] Komnas HAM, published on 20 April 2017. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/4/20/315/komnas-ham-unesco-kerjasama-mengarusutamakan-sdgs-dan-ham.html>.
- MDH. “Pendekatan HAM untuk Mencapai SDGs” [Human Rights Approach to Achieve the SDGs] Komnas HAM, published on 30 March 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/30/511/pendekatan-ham-untuk-mencapai-sdgs.html>.
- MDH. “Sharing Pengetahuan SDGs dan HAM” [The SDGs and Human Rights Knowledge Sharing] Komnas HAM, published on 28 February 2019. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019./2/28/747/sharing-pengetahuan-sdgs-dan-ham.html>.
- Memorandum of Understanding (MOU) between the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) and the National Commission on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM), with the Commission on the Human Rights of the Philippines (CHRP) as an Official Observer on Statelessness Issues in Sabah (23 April 2019).
- NCHR External Focus Group Discussion with the Research Team (29 January 2021).
- NCHR Internal Focus Group Discussion with the Research Team (26 January 2021).
- Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) dan the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Hubungan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia [Memorandum of Understanding between the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia (NCHR) and the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) concerning the Partnership in Promoting Connection between the Sustainable Development Goals and the Human Rights in Indonesia] (12 June 2017).
- Office of the High Commissioner for Human Rights. “Summary Table on the Linkages Between the SDGs and Relevant International Human Rights Instruments” accessed on 30 December 2020. [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG\\_HR\\_Table.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf).

Office of the High Commissioner for Human Rights. "Transforming Our World: Human Rights in the 2030 Agenda for Sustainable Development" Accessed on 30 December 2020. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost2015.pdf>.

RO/OL-3. "GANHRI Anugerahi Penghargaan Tertinggi Kepada Komnas HAM 'Akreditasi A'" [GANHRI Granted the Highest Award to the NCHR 'A Accreditation'] *Mediaindonesia.com*, published on 24 February 2018. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-Hukum/146685/ganhri-anugerahi-penghargaan-tertinggi-kepada-komnas-ham-akreditasi-a>.

Sari, Eva Nila. "Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia" [NCHR, INFID, ELSAM, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Encourage Human Rights-Friendly Cities in Indonesia] *Komnas HAM*, published on 13 November 2015. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/11/13/229/komnas-ham-ri-infid-elsam-dan-kemenkumham-ri-dorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.html>.

Tim Penyusun Laporan Kinerja Biro Renwakes Komnas HAM. "LKIP 2017 Biro Perencanaan, Pengawasan Internal and Kerjasama" [Planning, Internal Supervision and Partnership Bureau LKIP 2017].

Tim Penyusun Laporan Kinerja Komnas HAM. "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia LKIP Laporan Kinerja 2018" [2018 LKIP Performance Report of the NCHR] (2018).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015. "Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM: Laporan Tahunan Komnas HAM 2015" [Restitution of Rights of the Victim of the Human Rights Violation: NCHR 2015 Annual Report] (2016).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016. "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016" [The Fulfillment of Rights of the Minority and Vulnerable Group in Indonesia: NCHR 2016 Annual Report].

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2018" [NCHR 2018 Annual Report] (2019).

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019. "Laporan Tahunan Komnas HAM 2019" [NCHR 2019 Annual Report] (2020).

Written Statement from the National Secretariat of the SDGs (29 January 2021).



# Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to University of Sussex

Student Paper

<1 %

2

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

3

[ip.apmd.ac.id](http://ip.apmd.ac.id)

Internet Source

<1 %

4

[registrar.staging.fsu.edu](http://registrar.staging.fsu.edu)

Internet Source

<1 %

5

Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Student Paper

<1 %

6

[www.jstage.jst.go.jp](http://www.jstage.jst.go.jp)

Internet Source

<1 %

7

Susan Blackburn. "Gender violence and the Indonesian political transition", Asian Studies Review, 1999

Publication

<1 %

|    |   |      |
|----|---|------|
| 8  | <a href="https://indonesiadevelopmentforum.com">indonesiadevelopmentforum.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 9  | <a href="https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com">rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 10 | <a href="https://pppmonitor.adb.org">pppmonitor.adb.org</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 11 | <a href="https://voi.id">voi.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 12 | <a href="https://jdih.bappenas.go.id">jdih.bappenas.go.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 13 | <a href="https://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 14 | <a href="https://perpustakaan.komnasham.go.id">perpustakaan.komnasham.go.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 15 | Dwi Amalia Sari, Chris Margules, Han She Lim, Jeffrey A. Sayer et al. "Performance Auditing to Assess the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia", Sustainability, 2022<br>Publication | <1 % |
| 16 | Submitted to Universitas Islam Indonesia<br>Student Paper   | <1 % |
| 17 | Primi Suharmadhi Putri. "Local communities and transparency in Indonesian mining"   | <1 % |

# legislation", Journal of Energy & Natural Resources Law, 2022

Publication

18

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1 %

19

Xing Li, Ting Wu, Hong-Juan Zhang, De-Yan Yang. "National innovation systems and the achievement of sustainable development goals: Effect of knowledge-based dynamic capability", Journal of Innovation & Knowledge, 2023

Publication

<1 %

20

[peraturan.go.id](http://peraturan.go.id)

Internet Source

<1 %

21

Bagus Hermanto. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia", The Theory and Practice of Legislation, 2022

Publication

<1 %

22

[www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com)

Internet Source

<1 %

23

Harkristuti Harkrisnowo. "Chapter 15 Multiculturalism in Indonesia: Human Rights in Practice", Springer Science and Business Media LLC, 2010

Publication

<1 %

Submitted to University of Melbourne

24

Student Paper

<1 %

---

25

[ocs.unud.ac.id](http://ocs.unud.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

26

Submitted to Telkom University

Student Paper

<1 %

---

27

[en.unesco.org](http://en.unesco.org)

Internet Source

<1 %

---

28

[pdf.usaid.gov](http://pdf.usaid.gov)

Internet Source

<1 %

---

29

[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Internet Source

<1 %

---

30

[www.tandfonline.com](http://www.tandfonline.com)

Internet Source

<1 %

---

31

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

---

32

Submitted to Ritsumeikan Asia Pacific University

Student Paper

<1 %

---

33

Submitted to Australian National University

Student Paper

<1 %

---

34

[peraturanpedia.id](http://peraturanpedia.id)

Internet Source

<1 %

---

35

[unycommunity.com](http://unycommunity.com)

Internet Source

<1 %

36

Submitted to 于 2012-05-21 提交至 University of Melbourne

Student Paper

<1 %

37

"International Court of Justice (ICJ): Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Portugal, United Kingdom, Netherlands, Italy, Germany, Canada, France, Belgium)", International Legal Materials, 2017

Publication

<1 %

38

Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Student Paper

<1 %

39

Submitted to GRIPS National Graduate Institute for Policy Studies

Student Paper

<1 %

40

Jesper Katomero, Yola Georgiadou. "The Elephant in the Room: Informality in Tanzania's Rural Waterscape", ISPRS International Journal of Geo-Information, 2018

Publication

<1 %

41

Submitted to The Robert Gordon University

Student Paper

<1 %

42

Submitted to Tilburg University

Student Paper

<1 %

|    |   |      |
|----|---|------|
| 43 | Submitted to Udayana University<br>Student Paper  | <1 % |
| 44 | Submitted to University of New South Wales<br>Student Paper   | <1 % |
| 45 | Submitted to University of Nottingham<br>Student Paper  | <1 % |
| 46 | <a href="http://policy.asiapacificenergy.org">policy.asiapacificenergy.org</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 47 | Submitted to Shanghai University of Finance and Economics<br>Student Paper  | <1 % |
| 48 | Submitted to Universitas International Batam<br>Student Paper   | <1 % |
| 49 | <a href="http://today.line.me">today.line.me</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 50 | Fuadillah Pangestu, Sukardi. "The Readiness of Automotive Workshop And Laboratory in Vocational Education High School in Facing 4.0 Industrial Era", Journal of Physics: Conference Series, 2019<br>Publication | <1 % |
| 51 | <a href="http://archive.org">archive.org</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 52 | <a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a><br>Internet Source   | <1 % |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 53 | <a href="https://ortax.org">ortax.org</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 54 | <a href="http://www.nusantarahasanajournal.com">www.nusantarahasanajournal.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 55 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 56 | <a href="https://zenodo.org">zenodo.org</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 57 | Erin I. Castellás, Jarrod Ormiston. "Impact Investment and the Sustainable Development Goals: Embedding Field-level Frames in Organisational Practice", Emerald, 2018<br>Publication             | <1 % |
| 58 | Nikos Th. Nikolinakos. "EU Policy and Legal Framework for Artificial Intelligence, Robotics and Related Technologies - The AI Act", Springer Science and Business Media LLC, 2023<br>Publication | <1 % |
| 59 | Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia<br>Student Paper   | <1 % |
| 60 | Volume III — Europe, 1974.<br>Publication  | <1 % |
| 61 | <a href="http://ferdinand-andilolo.blogspot.com">ferdinand-andilolo.blogspot.com</a><br>Internet Source  | <1 % |

62 journal.ipb.ac.id Internet Source <1 %

---

63 republika.co.id Internet Source <1 %

---

64 sdgs.bappenas.go.id Internet Source <1 %

---

65 www.hops.id Internet Source <1 %

---

66 Abednego Andhana Prakosajaya, Aziza Dwimas Hendarini. "PENGARUH ETIKA DAN KEBIJAKAN ARKEOLOGI TERHADAP KETIADAAN PERAN ARKEOLOGI DALAM DISKUSI KONFLIK PASCA G/30/S 1965 DI INDONESIA", Kindai Etam : Jurnal Penelitian Arkeologi, 2021  
Publication

---

67 "GLOSSARY", Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2003  
Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On